KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

LAPORAN KINERJA

BTKLPP KELAS I MAKASSAR

Tahun Pelaksanaan 2022

Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Makassar, Januari 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis, BTKLPP Kelas I Makassar telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, rencana kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2020 – 2024. RAK ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perjanjian kinerja yang dibuat setiap tahun.

Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen dari BTKLPP Kelas I Makassar dalam mendukung Reformasi Birokrasi, yakni terwujudnya *Good Governance* menuju manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BTKLPP Kelas I Makassar ini merupakan salah satu sarana komunikasi yang memuat informasi mengenai seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dan capaiannya selama kurun waktu 1 periode anggaran tahun 2022. Laporan kinerja ini menjadi tolok ukur dalam menilai pencapaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka mendukung perwujudan pelaporan kinerja dan keuangan negara yang akuntabel.

Hasil pengukuran kinerja BTKLPP Kelas I Makassar yang dilakukan terhadap 8 (delapan) indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan mencapai 57 rekomendasi dari target 46 rekomendasi atau sebesar 124%;
2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan mencapai 87% dari target 75% atau sebesar 116%;
3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam mencapai 100% dari target 95% atau sebesar 105,26%;
4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan mencapai 4 jenis dari target 3 jenis atau sebesar 133%;
5. Nilai kinerja anggaran mencapai 86,61 dari target 85 atau sebesar 101,9%;
6. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 94,02 dari target 93 atau sebesar 101,1%;
7. Kinerja implementasi satker WBK mencapai 86,15 dari target 75 atau sebesar 114,9%;
8. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL mencapai 100% dari target 80% atau sebesar 125%.

Rerata persentase capaian kinerja sebesar 115,2%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja adalah Rp28.007.561.642 atau 96,32% dari total pagu Rp29.078.247.000. Berdasarkan capaian target dan realisasi anggaran serta capaian kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2022 telah dilaksanakan secara efisien, dengan nilai efisiensi sebesar 16,16%.

Capaian target kinerja ini dapat berhasil karena didukung berbagai faktor, antara lain: 1) Kerjasama seluruh unsur internal BTKLPP Kelas I Makassar, baik unsur teknis ataupun administratif; 2) Peningkatan kapasitas SDM, baik kualitas ataupun kuantitas; 3) Peningkatan kerjasama dan jejaring, baik dengan Unit utama (Eselon 1), sesama UPT Kemenkes ataupun instansi wilayah layanan (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Puskesmas); 4) Peningkatan kemampuan laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar; 5) Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan; dan 6) Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan izinnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja merupakan satu perwujudan dari pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban kinerja serta merupakan sarana dalam mengevaluasi capaian kinerja atas seluruh pelaksanaan kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar selama periode anggaran tahun 2022.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja memuat uraian dan penjelasan mengenai perencanaan kinerja BTKLPP Kelas I Makassar beserta analisis capaiannya serta strategi yang ditempuh oleh BTKLPP Kelas I Makassar selama tahun 2022.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja tahun 2022 ini dapat memberi gambaran pelaksanaan tugas yang diberikan BTKLPP Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pengendali Teknis Kesehatan di Indonesia.

Kepala,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Maman Sudirman, ST, M. Kes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR DIAGRAM
DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 3
D. Dasar Hukum 4
E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) 4
F. Kegiatan Organisasi 10
G. Struktur Organisasi 11
H. Sistematika Penyajian ..... .25

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja 26
B. Perjanjian Kinerja 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 30
B. Realisasi Anggaran……103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……110
B. Tindak Lanjut……..110

LAMPIRAN.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, beserta revisinya
Lampiran 2. Analisa SMART Indikator Kinerja
Lampiran 3. Matrik RAK Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020 – 2024
Lampiran 4. Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022
Lampiran 5. Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 6. Capaian Kinerja, Realisasi Penggunaan Anggaran, dan Efisiensi Indikator Tahun 2022
Lampiran 7. Rencana Kerja Tahun 2022, beserta revisinya
Lampiran 8. Pernyataan Reviu atas Pelaporan Kinerja T.A 2022
Lampiran 9. SK Tim Penyusun LAKIP dan SAKIP
Lampiran 10. SOP Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 ……. 13

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 ……... 15

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022…….……...…… 16

Tabel 1.4 Perbandingan Alokasi DIPA dan Realisasi Belanja di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 …….. 17

Tabel 1.5 Perbandingan Target, Capaian dan Realisasi Belanja PNBP di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 …… 18

Tabel 1.6 Klasifikasi Surat Masuk dan Surat Keluar di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 ……..… 18

Tabel 1.7 Daftar Sarana Perlengkapan Pengadaan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 ……..... 19

Tabel 1.8 Daftar Alat Laboratorium Pengadaan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020, 2021 dan 2022……..... 23

Tabel 2.1 Perencanaan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022……... 26

Tabel 2.2 Matriks Rencana Aksi Kegiatan Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024……..... 27

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar TA 2022..... 28

Tabel 3.1 Persentase Pengukuran Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2021 sampai dengan 2022 30

Tabel 3.2 Perbandingan Indikator Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado……..... 37

Tabel 3.3 Pagu Anggaran dan Realisasi Jumlah Surveilans Faktor Risiko Penyakit berbasis Laboratorium sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ……..... 40

Tabel 3.4 Perbandingan Indikator Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan

dengan standar Nasional (Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024)……..... 52
Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado……..... 52
Tabel 3.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022……... 55
Tabel 3.7 Perbandingan Indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 jam antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado……..... 60
Tabel 3.8 Pagu Anggaran dan Realisasi Respon Signal KLB/Bencana kurang dari 24 Jam sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ……. 62
Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado….. 67
Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang Dihasilkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 …… 69
Tabel 3.11 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Standar Nasional (Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024)...…… 74
Tabel 3.12 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado……..... 75
Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ……..... 78
Tabel 3.14 Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado.....…….. 83
Tabel 3.15 Pagu Anggaran dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ……..... 86
Tabel 3.16 Nilai Kinerja Implemantasi Satker WBK Tahun 2022 ……... 88

Tabel 3.17 Perbandingan Indikator Kinerja Implementasi Satker WBK antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado..……..... 92
Tabel 3.18 Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Implementasi Satker WBK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 …….. 94
Tabel 3.19 Perbandingan Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado ……..... 99
Tabel 3.20 Pagu Anggaran dan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sampai dengan tanggal 31 Desember 2022... 102
Tabel 3.21 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022……..... 104
Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022..... 104
Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022 ……. 105
Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2022…… 106
Tabel 3.25 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, dan 2022 ……..... 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Makassar ……	12
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022 ……	72
Gambar 3.2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.....…….	80

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Jumlah Pegawai per 31 Desember Tahun 2022……...	13
Diagram 1.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022…….....	14
Diagram 1.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 20212…….....	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir; Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 …….. 35

Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024; Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan..... 36

Grafik 3.3 Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado.....……..... 37

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 …….. 50

Grafik 3.5 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024; Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan.……. 51

Grafik 3.6 Perbandingan target dan realisasi indikator Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado..…….. 53

Grafik 3.7 Perbandingan Target dan Capaian indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam di Wilayah Layanan Tahun 2020-2022 ……. 58

Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam di Wilayah Layanan Tahun 2020-2024...…….. 59

Grafik 3.9 Perbandingan target dan realisasi indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 jam antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado..... 61

Grafik 3.10 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir; Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan..... 65

Grafik 3.11	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024; Jumlah Teknologi Tepat guna yang Dihasilkan …….....	66
Grafik 3.12	Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado...…….....	67
Grafik 3.13	Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020, 2021, dan 2022…….....	73
Grafik 3.14	Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024…….....	74
Grafik 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado.....	76
Grafik 3.16	Perbandingan Target dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, 2021 dan 2022.....…...	81
Grafik 3.17	Perbandingan target dan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Tahun 2020-2024..……	82
Grafik 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado……..	84
Grafik 3.19	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Implementasi Satker WBK Tahun 2022.....……...	90
Grafik 3.20	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Implementasi Satker WBK Tahun 2020-2024..…….	91
Grafik 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Impelmentasi Satker WBK Antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado .....……..	92
Grafik 3.22	Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020, 2021 dan 2022.....…..	98
Grafik 3.23	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024; Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.....…….	99
Grafik 3.24	Perbandingan target dan realisasi indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado……	100

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan pembangunan sumber daya yang berkualitas serta membenahi tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pembangunan integritas dan loyalitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, serta penyediaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Hal tersebut diwujudkan melalui pelaporan yang terintegrasi, baik realisasi anggaran ataupun realisasi capaian output yang berkualitas dan akuntabel, salah satunya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Untuk melaksanakan Visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan Visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan Masyarakat Bebas Penyakit dan Kesehatan Lingkungan yang Berkualitas” Selaras dengan Visi Ditjen P2P, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar mempunyai Visi “Mewujudkan Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko Berbasis Laboratorium yang Berkualitas di Wilayah Layanan”.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui menurunkan angka kematian

ibu dan bayi; menurunkan angka *stunting* pada balita; memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. BTKLPP Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media informasi yang digunakan oleh kementerian lembaga, pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan program kerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). LAKIP disusun sebagai wujud pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang disusun berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kesejahteraan masyarakat (Winda, 2017).

BTKLPP Kelas I Makassar secara aktif terus berupaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan program kerja di bidang kesehataan yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) sebagai unit eselon I dan Kementerian Kesehatan R.I sekaligus membantu terwujudnya program nasional pemerintah.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, BTKLPP Kelas I Makassar senantiasa terus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada *output* dan *outcome*, serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. LAKIP BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 menunjukkan pencapaian keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia, khususnya di wilayah layanan yang disusun secara sistematis, informatif, transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

LAKIP BTKLPP Kelas I Makassar merupakan sumber informasi yang menyeluruh dari institusi BTKLPP Kelas I Makassar, baik dalam hal perencanaan, proses ataupun capaian output.

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka BTKLPP Kelas I Makassar memiliki tujuan strategis yaitu meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Dalam mencapai tujuan strategis, maka ditetapkan sasaran strategis, yaitu terwujudnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit dan meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

LAKIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja tahun 2022 sekaligus sebagai bahan acuan rekomendasi kegiatan untuk tahun 2022 dan seterusnya. LAKIP ini berfungsi pula sebagai sarana bagi unit utama dalam melakukan penilaian atas capaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar selama 1 tahun anggaran 2022.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BTKLPP Kelas I Makassar mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, serta Kesehatan Matra.

Dalam melaksanakan tugas, BTKLPP Kelas I Makassar menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. Pelaksanaan surveilans epidemiologi;
2. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
3. Pelaksanaan laboratorium rujukan;
4. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;
7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra;
10. Pengelolaan data dan sisitem informasi;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
12. Pelaksanaan urusan adminstrasi UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

D. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BTKLPP Kelas I Makassar disusun berdasarkan landasan hukum berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 (dengan Revisi Nomor 422 Tahun 2017) tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21/MENKES/PER/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

E. Permasalahan Utama *(Strategic Issued)*

BTKLPP Kelas I Makassar mengemban tugas dan fungsinya sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Sebagai unit pelaksana teknis binaan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan, BTKLPP Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada tantangan dan permasalahan, baik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ataupun Penyakit Terabaikan.

Permasalahan utama yang menjadi tantangan bagi BTKLPP Kelas I Makassar dalam melaksanakan layanan dan program diantaranya:

1. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Belum Optimal

   BTKLPP Kelas I Makassar telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan diantaranya:

   a. *Sharing* sumber daya belum maksimal, baik dalam hal data, anggaran, sarana/prasarana pendukung ataupun kolaborasi kegiatan.
   b. Masih terdapat adanya tumpang tindih wewenang dalam tugas pokok dan fungsi di Pemerintah Daerah dalam wilayah layanan BTKLPP Kelas I Makassar.

2. Tenaga (Sumber Daya Manusia)

   Secara umum, sumber daya manusia di BTKLPP Kelas I Makassar telah mencukupi, baik kualitas ataupun kuantitas. Namun demikian, pemerataan kemampuan masih menjadi permasalahan sehingga masih didapatkan tugas dan fungsi ganda, antara lain untuk instalasi TTG (Teknologi Tepat Guna).

3. Karakteristik Wilayah Layanan

   BTKLPP Kelas I Makassar memiliki 4 Provinsi dengan 60 Kabupaten/Kota sebagai wilayah layanan dengan berbagai jenis penyakit dan karakter lingkungan. Beberapa wilayah layanan BTKLPP Kelas I Makassar merupakan wilayah endemis malaria, filariasis dan kusta, dimana target yang ingin dicapai adalah eliminasi.

   a. Malaria

      Situasi Penyakit Malaria di wilayah layanan yang terdiri dari 60 kabupaten/kota, 44 kabupaten/kota telah mencapai eliminasi malaria dan 16 kabupaten/kota dalam kategori endemisitas rendah. Target capaian program malaria adalah mencapai eliminasi malaria di Pulau Sulawesi pada tahun 2030, termasuk 4 Provinsi wilayah layanan BTKLPP Kelas I Makassar. Eliminasi malaria akan dicapai dengan tidak ditemukannya kasus indegenius pada satu kabupaten/kota selama 3 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, BTKLPP Kelas I Makassar berperan dalam memetakan wilayah Reseptivitas daerah malaria untuk memudahkan intervensi dalam pencegahan penularan setempat kasus malaria.

      Peta Situasi Malaria di Kabupaten/Kota wilayah layanan BTKLPP Kelas I Makassar seperti berikut:

      1) Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
      2) Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

b. Filariasis

Situasi Penyakit Filariasis pada 4 wilayah layanan adalah jumlah kabupaten/kota 4 wilayah layanan sebanyak 60 kabupaten/kota. Sesuai hasil pemetaan endemisitas terdapat 29 kabupaten/kota yang dinyatakan endemisitas yaitu 4 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 4 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, 9 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan 12 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil program yang telah dicapai sampai dengan tahun 2021 yang mencapai eliminasi ada 6 kabupaten/kota, yaitu: 2 kabupaten di Sulawesi Selatan, 1 kabupaten di Sulawesi Barat, 1 kabupaten di Sulawesi Tengah dan 2 kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di BTKLPP Kelas I Makassar guna mendukung eliminasi filariasis diantaranya:

1) Survey Dampak POPM Filariasis di Kabupaten Banggai Tahun 2022.
2) Survey Dampak POPM Filariasis di Kabupaten Muna Tahun 2022.
3) Survey Dampak POPM Filariasis di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022.

c. Kecacingan (*Soil Transmission Helminths*)

Kecacingan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Kecacingan menggambarkan masalah kesehatan masyarakat khususnya di daerah tropis dimana kondisisanitasi masih belum memadai. Ada tiga jenis cacing yang umumnya menginfeksi anak-anak yaitu: *Ascaris iumbhcoides* (cacing gelang), *Ancylostoma duodenale* (cacing tambang) dan *Trichiuris trichiura* (cacing cambuk). Cacingan secara umum mengakibatkan kerugian langsung oleh karena adanya gangguan pada *intake* makanan, pencemaan, penyerapan serta metabolismenya dan memberikan dampak yang sangat nyata bagi kesehatan anak. Infeksi cacing berhubungan erat dengan kehilangan mikronutrien, malabsorbsi vitamin A pada anak prasekolah yang mengakibatkan malnutrisi, anemi dan retardasi pertumbuhan (Stunting). Pemerintah menetapkan target program penanggulangan cacingan berupa reduksi cacingan yaitu penurunan prevalensi cacingan sampai dengan di bawah 10% (sepuluh persen) di setiap daerah kabupaten/kota, dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan terpadu untuk mencapai reduksi sesuai target yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah cacingan tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan antara lain surveilans cacingan

dan POPM Cacingan. Terdapat 3 kegiatan utama dalam surveilans kecacingan yaitu penemuan kasus cacingan, survei faktor risiko dan survel prevalensi cacingan. Survei Evaluasi Prevalensi kecacingan dilakukan pada daerah yang telah melaksanakan POPM cacingan selama 5 tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan BTKLPP kelas I makassar untuk Tahun 2022 adalah:

1. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Wajo, Luwu Utara, Bulukumba dan Gowa di provinsi Sulawesi Selatan
2. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Bombana dan Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

d. Kusta

Kusta telah dinyatakan eliminasi di Indonesia pada tahun 2000, namun situasi epidemiologi kusta di Indonesia cenderung statis dengan angka prevalensi 0,7 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 dengan jumlah kasus baru dan proporsi cacat tingkat 2, serta proporsi kusta anak yang tinggi (di atas 10%). Oleh karena itu, sebagai salah satu pusat pengendalian penyakit kusta sekaligus rujukan laboratorium kusta, BTKLPP Kelas I Makassar melaksanakan kegiatan Surveilans Monitoring IM dan IB pada pasien kusta di Kota Makassar.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, seiring dengan meningkatnya permasalahan kesehatan lingkungan akibat dinamika masyarakat dan alam telah disepakati berbagai komitmen untuk meningkatkan jangkauan dan pelayanan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Air merupakan salah satu media lingkungan yang dapat menjadi media perantara penularan penyakit. Banyak penyakit menular melalui media air, yaitu kelompok *"waterborne diseasses*", seperti diare, *typhoid*, kolera, dan lainnya. Pada tahun 2021, sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar sebanyak 25.918 sarana (73,0%), yang artinya sudah memenuhi target RPJMN 2021 yaitu sebesar 64% (Data Profil Kesehatan Indonesia, 2021). Namun, Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan persentase terendah pada sarana air minum diawasi/diperiksa kualitas air minum yang sesuai standar, yaitu sebesar 7,3%. Berdasarkan hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) tahun 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), proporsi rumah tangga menurut akses air minum aman berdasarkan parameter fisik (TDS),

kimia (Nitrat, Nitrit, pH) dan biologi (*E. coli*) di Sulawesi tahun 2020 hanya sebesar 11,6%. Data dari BPS yang dipublikasikan melalui Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020 secara nasional menunjukkan sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air isi ulang (29,1%). Oleh karena itu, BTKLPP Kelas I Makassar sebagai UPT Kementerian Kesehatan melaksanakan Kajian Faktor Risiko Bersumber Air di Wilayah Layanan yang meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Selain air, makanan juga merupakan media lingkungan yang dapat menjadi perantara penularan penyakit. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan terutama penyakit yang diakibatkan oleh pangan atau *foodborne diseases*, seperti: diare, *typhoid*, kolera, disentri, hepatitis, dan keracunan makanan. Berdasarkan Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021, persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5.458 (48,1%) dari 11.346 TPP terdaftar, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3.223 (81,1%) dari 3.972 TPP terdaftar, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.005 (44,4%) dari 4.516 TPP terdaftar, dan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 707 (48,6%) dari 1.455 TPP terdaftar. Kondisi ini menggambarkan masih ada tempat pengelolaan pangan yang belum menerapkan higiene sanitasi pangan agar pangan yang dihasilkan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, BTKLPP Kelas I Makassar melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengelolaan Pangan di Wilayah Layanan.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia telah menjadi ancaman serius terutama di kalangan petani, terutama di sektor kesehatan. Di antara berbagai jenis pestisida, golongan *organophosphate* dan karbamat adalah yang paling umum digunakan oleh petani. Jenis pestisida yang paling banyak digunakan pada negara berkembang adalah jenis insektisida. Insektisida yang bersifat anti *cholinesterase* merupakan insektisida sintetik yang digunakan untuk pengendalian hama tanaman. Insektisida ini berperan dalam penerusan rangsangan saraf, sehingga menyebabkan gangguan fungsi saraf. Salah satu populasi yang berisiko untuk mengalami keracunan pestisida dengan dampak negatif jangka panjang adalah perempuan usia subur yang tinggal di daerah pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2008, diperkirakan sekitar 15 juta perempuan bekerja di sektor pertanian.

Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sering dianggap sebagai penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh penambangan emas skala kecil atau tambang emas rakyat. Pengolahan bijih dilakukan dengan proses amalgamasi dimana merkuri (Hg) digunakan sebagai media pengikat emas. Pada proses amalgamasi emas yang dilakukan oleh penduduk secara tradisional, merkuri dapat terlepas ke lingkungan pada tahap pencucian dan penggarangan. Pada proses pencucian, limbah yang umumnya masih mengandung merkuri dibuang langsung ke badan air atau ke atas tanah. Hal ini disebabkan merkuri tersebut tercampur/ terpecah menjadi butiran-butiran halus yang sifatnya sukar dipisahkan pada proses penggilingan yang dilakukan bersamaan dengan proses amalgamasi, sehingga dalam proses pencucian, merkuri terbawa dalam limbah (*tailing*). Pembuangan *tailing* langsung ke atas tanah tanpa perlakuan menyebabkan tanah tercemar merkuri sehingga kemungkinan terjadi akumulasi merkuri pada tanaman pangan yang berada di sekitarnya. Selain itu dapat pula menyebabkan infiltrasi Hg ke air tanah yang digunakan oleh penduduk sebagai sumber air bersih.

Pencemaran merkuri banyak sekali ditemukan pada penambang emas tradisional. Penambangan emas tanpa ijin (PETI) ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Pajanan merkuri dalam waktu lama mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, terutama yang terpapar oleh kondisi lingkungan yang tercemar merkuri. Keracunan merkuri yang biasanya terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan biasanya bersifat kronik. Untuk mengetahui adanya pajanan merkuri (Hg) di dalam tubuh dapat diketahui melalui pengukuran kadar polutan di dalam jaringan tubuh, seperti rambut, darah, urin, kuku dan ASI (Air Susu Ibu).

Disamping itu, ada juga penyakit menular dari sarana yang tercemar ke manusia, salah satunya adalah *Legionnaire's disease* yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Legionella pneumophila*. Di Indonesia, kasus ini terjadi pada sejumlah tempat antara lain di Bali (1996), di Karawaci Tangerang (1999) dan di sejumlah kota lainnya. Dari hasil survei tahun 2001, pada air menara sistem pendingin di hotel-hotel yang ada di Jakarta dan Denpasar ditemukan hampir 20% dari petugas pengelola air menara sistem pendingin tersebut, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah para petugas yang pernah terpajan oleh bakteri *Legionella* (Lampiran Kepmenkes No. 1538 Tahun 2003).

Kementerian Kesehatan RI mengklasifikasikan penyakit radang paru-paru Legionella sebagai *New Emerging Diseases* (New-EIDs) yang saat ini perlu diwaspadai, sebab berpotensi memicu kejadian luar biasa (KLB). Legionella

merupakan penyakit infeksi bakteri akut yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan dapat menimbulkan KLB, sehingga perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan tepat dan cepat. Oleh sebab itu, BTKLPP Kelas I Makassar melakukan Surveilans Faktor Risiko Legionellosis di Wilayah Layanan sebagai upaya antisipatif dalam rangka kewaspadaan dini.

4. Pandemi COVID-19

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), BTKLPP Kelas I Makassar menjadi salah satu laboratorium rujukan pemeriksaan sampel COVID-19. Guna menunjang peran tersebut, BTKLPP Kelas I Makassar melakukan peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana laboratorium.

Dalam 3 tahun terakhir Sampai bulan Desember 2022 Instalasi Virologi BTKLPP Kelas I Makassar telah melakukan pemeriksaan sampel COVID-19 sebanyak 100.710 sampel yang berasal dari fasyankes-fasyankes di wilayah kerja BTKLPP Kelas I Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara), dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 31.635 sampel, tahun 2021 sebanyak 51.255 sampel dan tahun 2022 sebanyak 17.820 sampel.

Selain menjadi Laboratorium Rujukan, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (Covid-19), BTKLPP Kelas I Makassar menjadi salah satu Laboratorium Pembina Provinsi yang membantu dinas kesehatan provinsi untuk melakukan pembinaan terhadap laboratorium pemeriksa di Provinsi. Kondisi Pandemi COVID-19 pada tahun 2022 menunjukkan jumlah sampel yang berkurang dan telah didukung oleh sumber daya yang lengkap dan memadai sehingga pandemi COVID-19 tidak menyebabkan tertundanya berbagai kegiatan yang telah direncanakan BTKLPP Kelas I Makassar.

Selain Pandemi, kejadian luar biasa penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebarluas lintas kabupaten/kota, Provinsi bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya. Dalam rangka mencegah terjadinya KLB, dilakukan kegiatan deteksi dini berupa kegiatan Survey Sentinel.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Survey Sentinel Dengue di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Survey Sentinel Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Surveilans Polio Lingkungan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

F. Kegiatan Organisasi

BTKLPP Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Tugas Kementerian Kesehatan memiliki tujuan meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis laboratorium. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung peningkatan kinerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah layanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BTKLPP Kelas I Makassar melaksanakan dua kegiatan, yakni:

1. Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
   a. Pelayanan Publik Lainnya;
   b. Penyelidikan dan Pengujian Penyakit;
   c. Sarana Bidang Kesehatan;
   d. Penelitian dan Pengembangan Modeling;
   e. Penelitian dan Pengembangan yang dipatenkan;
   f. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal.
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P.
   a. Layanan Perkantoran;
   b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal;
   c. Layanan Umum;
   d. Layanan SDM;
   e. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Keuangan;
   f. Layanan Kehumasan dan Protokoler;
   g. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan; dan
   h. Pengelolaan Keuangan Negara.

G. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 78 Tahun 2020, struktur organisasi BTKLPP Kelas I Makassar disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Makassar

Instalasi

Pembentukan instalasi BTKLPP Kelas I Makassar didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar Nomor HK.02.03/1/177/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Jenis Instalasi pada BTKLPP Kelas I Makassar. Adapun instalasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Laboratorium Faktor Risiko Lingkungan;
2. Instalasi Laboratorium Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
3. Instalasi Laboratorium Intervensi Perubahan Perilaku;
4. Instalasi Laboratorium Virologi;
5. Instalasi Laboratorium Mikrobiologi;
6. Instalasi Laboratorium Parasitologi;
7. Instalasi Laboratorium Teknologi Tepat Guna;
8. Instalasi Uji Resistensi dan Efektifitas;
9. Instalasi Mutu, Pemeliharaan, dan Kalibrasi;
10. Instalasi Media, Reagensia, Limbah, dan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3);
11. Instalasi Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat.

Unsur Dukungan Manajemen BTKLPP Kelas I Makassar meliputi:

1. **Kepegawaian**

Dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan operasional BTKLPP Kelas I Makassar didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Data kepegawaian per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 68 orang dengan komposisi sebagai berikut:

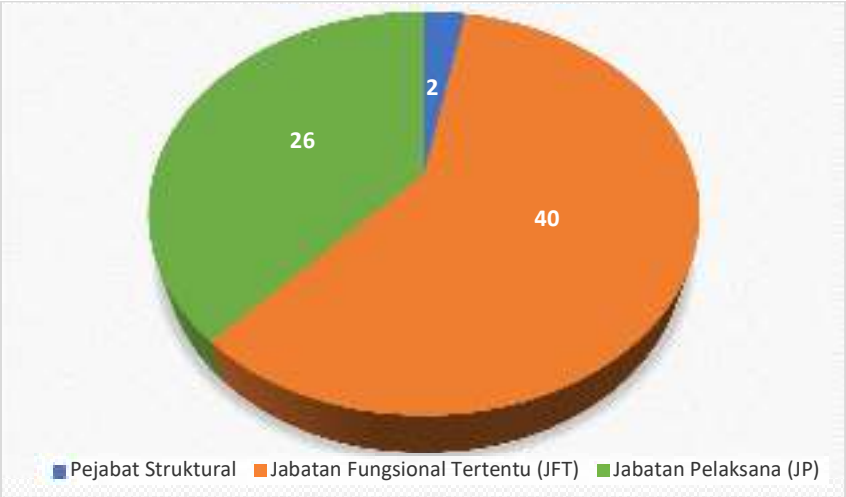

Diagram 1.1 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022

Adapun tingkat pendidikan pegawai BTKLPP Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jurusan	Jumlah
1.	Doktor Engineering	Teknik	1
2.	Magister Kesehatan	S2 Kesehatan Masyarakat	6
		S2 Kesehatan	1
		Magister Epidemiologi	4
		Magister Ilmu Kesehatan	1
3.	Magister Sains	S2 Sains	1
		S2 Biomedik	3
		S2 Kimia	1
4.	Magister Administrasi	S2 Ilmu Administrasi	1
5.	Magister Teknik	S2 Teknik Mesin	1
6.	Magister Akuntansi	S2 Akuntansi	2
7.	Magister Hukum	S2 Hukum	1
8.	Dokter	Dokter Umum	2

No	Kualifikasi Pendidikan	Jurusan	Jumlah
9.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	12
10.	Sarjana Sains	Biologi	2
		Fisika Teknik	1
		Farmasi	2
11.	Sarjana Ekonomi	Ekonomi Akuntansi	1
12.	Sarjana Sosial	Ilmu Adminstrasi Negara	1
13.	Diploma IV	Analis Kesehatan	1
		Kesehatan Lingkungan	1
14.	Diploma III	Kesehatan Lingkungan	6
		Analisis Kesehatan	1
		Teknik Kimia Analisis	3
		Analis Kimia	1
		Perpustakaan	1
		Teknik informatika	1
		Akuntansi	1
15	SMAK	Analis Kimia	1
16.	SMA/SMK		5
17	SMP		2
	Jumlah		**68**

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar, 2022

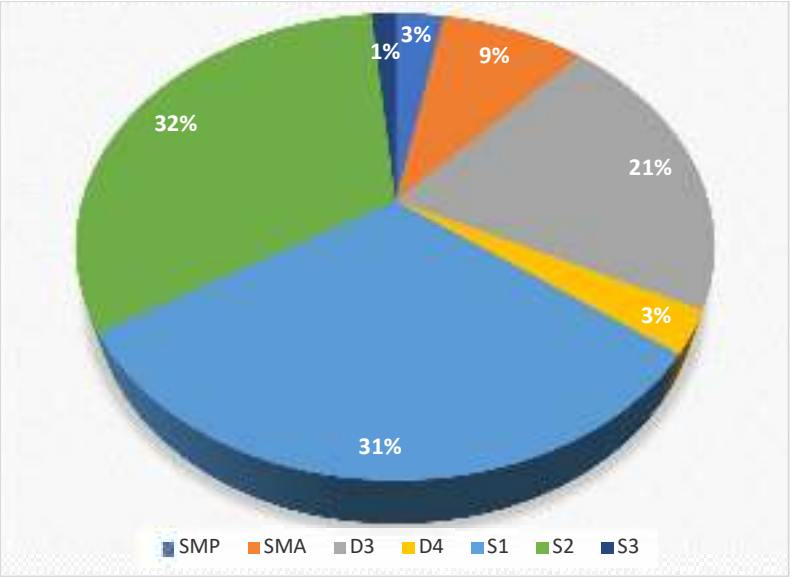

Diagram 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

1) Distribusi Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Pangkat/Golongan.

SDM BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Tingkat Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk I, IV/b	2
2	Pembina, IV/a	10
3	Penata Tk I, III/d	9
4	Penata, III/c	12
5	Penata Muda Tk I, III/b	9
6	Penata Muda, III/a	10
7	Pengatur Tk I, II/d	3
8	Pengatur, II/c	8
9	Pengatur Muda Tk I, II/b	3
10	Juru Tk I, I/d	1
11	Juru Muda Tk I, I/c	1
	Jumlah	**68**

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar, 2022

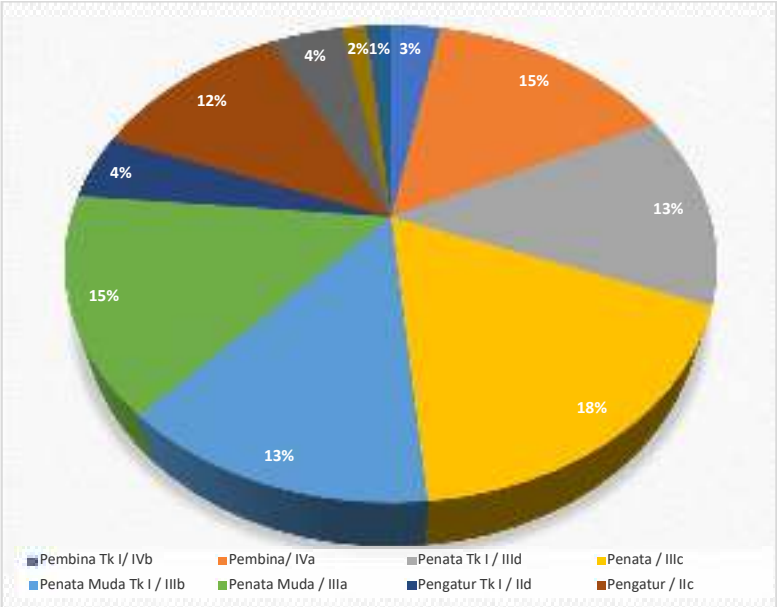

Diagram 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

2) Distribusi Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar Berdasarkan Jabatan

Distribusi Jabatan Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
1	Struktural	Kepala Kantor	1
		Kepala Subbag Administrasi Umum	1
2	Fungsional Tertentu	Pranata Lab. Kes. Ahli Madya	1
		Pranata Lab. Kes. Ahli Muda	7
		Pranata Lab. Kes. Ahli Pertama	3
		Pranata Lab. Kes. Mahir	3
		Pranata Lab. Kes. Terampil	2
		Epidimiolog Kesehatan Ahli Madya	2
		Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	5
		Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2
		Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
		Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1
		Sanitarian Ahli Muda	4
		Sanitarian Terampil	2
		Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1
		Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
		Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
		Arsiparis Ahli Muda	1
		Arsiparis Terampil	1
3	Jabatan Pelaksana	Pranata Lab, Kesehatan Ahli	1
		Pranata Lab. Kesehatan	2
		Epidemiolog Kesehatan Ahli	1
		Epidemiolog Kesehatan Terampil	2
		Entomolog Kesehatan Ahli	1
		Entomolog Kesehatan Terampil	1
		Sanitarian Ahli	4
		Analis Kebijakan Barang Milik Negara	1
		Perencana	1
		Arsiparis/Pranata Kearsipan	4
		Pranata komputer terampil	1
		Pranata Keuangan APBM Terampil	1
		Pengemudi	1
		Pengadministrasi umum	1
		Petugas Keamanan	2
		Pengelola Instalasi Air dan Listrik	1
		Pramubakti	1
		Jumlah	**68**

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar 2022

Di samping tenaga yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), BTKLPP Kelas I Makassar juga didukung oleh Tenaga Kontrak, yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

3) Kenaikan Pangkat

Pengusulan proses kenaikan pangkat/golongan untuk pegawai lingkup BTKLPP Kelas I Makassar pada tahun 2022 sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kenaikan pangkat dari gol. I/b ke I/c : 1 orang
b) Kenaikan pangkat dari gol. II/d ke III/a : 2 orang
c) Kenaikan pangkat dari gol. III/a ke III/b : 1 orang
d) Kenaikan pangkat dari gol. III/b ke III/c : 1 orang
e) Kenaikan pangkat dari gol. III/c ke III/d : 4 orang
f) Kenaikan pangkat dari gol. III/d ke IV/a : 1 orang
g) Kenaikan pangkat dari gol. IV/a ke IV/b : 1 orang

4) Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala pegawai lingkup BTKLPP Kelas I Makassar pada tahun 2022 sebanyak 34 orang dengan rincian sebagai berikut:

a) Periode Januari 2022 : 3 orang
b) Periode Februari 2022 : 2 orang
c) Periode Maret 2022 : 11 orang
d) Periode Juli 2022 : 1 orang
e) Periode Desember 2022 : 17 orang

2. Keuangan

1) Anggaran DIPA Tahun 2022

Anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BTKLPP Kelas I Makassar bersumber pada DIPA tahun 2022 dengan total anggaran setelah revisi sebesar Rp. 29.078.247.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 96,32% atau sebesar Rp. 28.007.561.642,- (dua puluh delapan miliar tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran tahun 2020 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Perbandingan Alokasi DIPA dan Realisasi Belanja di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020 s.d Tahun 2022

No.	Tahun	Alokasi DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2020	25.476.526.000	24.227.784.559	95,10
2	2021	45.432.106.000	44.761.808.187	98,52
3	2022	29.078.247.000	28.007.561.642	96,32

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

2) Pencapaian PNBP

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BTKLPP Kelas I Makassar pada tahun 2022 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan capaian realisasi PNBP sebesar Rp. 656.246.321,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau 104,17%. Penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 376.049.206,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah) atau 66,32%, dari pagu penggunaan anggaran sebesar Rp. 567.000.000,-.

Tabel 1.5 Perbandingan Target, Capaian dan Realisasi Belanja PNBP di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2018 s.d Tahun 2022

No	Tahun	Target PNBP (Rp)	Capaian Target PNBP (Rp)	Capaian Target (%)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian Realisasi Belanja (%)
1.	2018	540.000.000	613.019.000	112,78	369.965.500	76,12
2.	2019	550.000.000	855.143.560	155,48	386.721.208	78,13
3.	2020	560.000.000	365.064.000	65,19	221.812.388	44,01
4.	2021	570.000.000	640.449.100	112,36	397.061.024	77,40
5.	2022	630.000.000	656.246.321	104,17	376.049.206	66,32

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

3. Umum dan Perlengkapan

Guna memperlancar urusan kerumahtanggaan kantor BTKLPP Kelas I Makassar, bagian umum dan perlengkapan telah melakukan beberapa proses kegiatan diantaranya:

1) Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat di BTKLPP Kelas I Makassar, baik surat masuk maupun surat keluar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6 Klasifikasi Surat Masuk dan Surat Keluar di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Kode	Klasifikasi Surat Masuk	Jumlah Surat
1	AR	Kearsipan	37
2	HK	Hukum	89
3	IR	Informatika	03
4	KM	Komunikasi Publik	47
5	KN	Kekayaan Negara	308
6	KP	Kepegawaian	499
7	KR	Kerumahtanggaan	41
8	KU	Keuangan	182
9	OT	Organisasi dan Tata Laksana	34

No	Kode	Klasifikasi Surat Masuk	Jumlah Surat
10	PP	Pendidikan dan Pengajaran	10
11	PR	Perencanaan	112
12	PS	Pengawasan	88
13	UM	Umum	100
14	DL	Pelatihan SDM Kesehatan	149
15	HJ	Haji	39
16	KL	Kesehatan Lingkungan	105
17	PK	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	01
18	PV	P2 Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	179
19	SR	Surveilans dan Karantina Kesehatan	70
20	TL	Pengembangan Teknologi Laboratorium	576
21	PM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	117
		Jumlah	2.786

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan terkait Kearsipan sebagai berikut:

a) Pengelolaan arsip yang terdiri dari:
   - Membuat arsip
   - Menerima arsip
   - Melakukan pemberkasan arsip aktif
   - Melakukan pemberkasan arsip terjaga

b) Perawatan arsip

c) Pelayanan arsip

2) Perlengkapan

Adapun sarana perlengkapan untuk memperlancar kegiatan operasional kantor BTKLPP Kelas I Makassar terdiri dari peralatan meubel, alat pengolah data, alat audio visual, serta perlengkapan lainnya. Perlengkapan yang dimaksud tampak pada tabel di bawah.

Tabel 1.7 Daftar Sarana Perlengkapan Pengadaan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Nama Perlengkapan	Jumlah
1	Kursi	61 buah
2	Lemari	10 buah
3	Meja	36 buah
4	Karpet	1 buah
5	Peralatan Sound sistem	4 buah
6	Gorden	2 Set

No	Nama Perlengkapan	Jumlah
7	Microphone	4 buah
8	Handy Talky	3 buah
9	Pintu Elektrik	1 buah
10	Alat Laboratorium Kwalitas udara	1 buah
11	Tablet PC	1 buah
12	Alat Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	1buah
13	Air Condisioner	4 buah
14	Televisi	3 buah
15	Perangkat informasi dan teknologi	1 set
16	Alat Laboratorium Makanan lainnya	1 buah
17	Rak Penyimpanan	1 buah
18	Lap Top	2buah
19	Telepon	9 buah
20	Gardu Listrik	1 buah

Sumber: Sub. Bag. Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar. Sarana dan prasarana dibagi dalam dua kelompok yaitu sarana pokok dan sarana penunjang.

1) Sarana Pokok

Sarana pokok yang dimiliki oleh BTKLPP Kelas I Makassar, yaitu:

a) Gedung

Pada tahun 2010, berdasarkan SK Dirjen PP & PL Nomor HK.03.01/D/1.4/6687/2011 tentang Pengalihan Kedudukan Pusat Latihan Kusta Nasional di Makassar dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso ke BTKLPP Kelas I Makassar, gedung dan bangunan ini sebagian telah dihapus dan dibangun gedung baru pada tahun 2012 untuk perkantoran dan tahun 2013 untuk gedung laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar. BTKLPP Kelas I Makassar memiliki tanah seluas 6.568 m^2 dan luas tanah untuk bangunan 1.736 m^2, luas tanah untuk sarana lingkungan 2.416 m^2, serta luas tanah kosong 2.416 m^2. Pada Tahun 2019 telah dibangun Laboratorium Biomolekuler guna menunjang instalasi laboratorium virologi seluas 366 m^2. Gedung ini telah dimanfaatkan dalam rangka menjalankan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar sebagai Laboratorium Rujukan COVID-19. Pada tahun 2021 juga dilakukan renovasi bangunan gedung laboratorium dan sarana penunjang lainnya seluas 1.878 m^2.

b) Peralatan Laboratorium

Jumlah peralatan laboratorium yang dimiliki BTKLPP Kelas I Makassar memadai untuk melakukan pengujian sampel faktor risiko lingkungan untuk matriks air, padatan, gas/udara dan radiasi. Adapun penempatan peralatan sudah sesuai dengan persyaratan akomodasi dan lingkungan laboratorium SNI/ISO IEC 17025:2008 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Laboratorium Faktor Risiko terdiri dari instalasi yaitu Instalasi Laboratorium Fisika, Kimia Padat, Air dan B3 yang memiliki beberapa peralatan canggih, seperti ICP (*Inductivety Coupled Plasma*) untuk pengujian logam secara ionisasi, AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometer*) yang dilengkapi dengan *Grafit Furnace* untuk pengujian logam dalam level PPT, Spektrofotometer UV-VIS untuk pengujian senyawa kimia, *Microwave Digestion* untuk preparasi cepat sampel padatan, selain itu juga terdapat peralatan untuk pemeriksaan sampel di lapangan seperti pH meter portable, Do meter, TDS meter serta Water Test & security Food. Di Instalasi Laboratorium Biologi dan Klinis telah memiliki peralatan MAS (*Microbiological Air Sampler*) untuk pengujian mikrobiologi udara, Mikroskop *zoom stereo*, Digital Colony Counter untuk menghitung jumlah pertumbuhan coloni secara automatis, dan ARIS *microbiological Identification* untuk pengujian dan identifikasi jenis bakteri secara cepat. Di laboratorium Fisika, Kimia Gas, Udara dan Radiasi telah memiliki peralatan *CO-Analizer* untuk pengujian Karbon monoksida, *Impinger air Sampler* untuk menangkap senyawa kimia diudara, peralatan *High Volume Air Sampler* dengan *Flow Controller* dan *Calibration Kit* untuk penangkap debu total di udara ambien, *Portable Emition Gas Analyzer* untuk mengukur emisi sumber tidak bergerak, *Sound Level Meter* dan *Calibrator* untuk mengukur tingkat kebisingan lingkungan yang terkalibrasi, *Vibration Meter* untuk mengukur getaran, *HazDust meter* untuk pengukuran total suspended particulat, PM 10 mikron, PM 2,5 mikron dan PM-10 meter untuk pengukuran partikulat 10 mikron. Di Laboratorium Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit menggunakan Mikroskop Stereo dengan komputerisasi untuk identifikasi jenis vektor, peralatan PCR untuk mengetahui/ konfirmasi vektor pembawa penyakit dan peralatan vektor lapangan untuk survei cepat di lapangan.

Laboratorium penyakit terdiri dari Instalasi Laboratorium Virologi dan Immunologi, serta Instalasi Laboratorium Parasitologi, untuk mendukung instalasi-instalasi tersebut Laboratorium dilengkapi dengan peralatan-

peralatan antara lain alat Polimerasy Chain Reaction (PCR), Tes Cepat Molekuler (TCM), ELISA yang digunakan di Instalasi Virologi dan Immunologi untuk pemeriksaan secara molekuler.

Pada tahun 2020, pengadaan peralatan laboratorium difokuskan untuk pengembangan laboratorium Virologi dan hanya sebagian kecil untuk Laboratorium Lingkungan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar dituntut dapat melakukan pengujian sampel COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratotorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019. BTKLPP kelas I Makassar ditunjuk sebagai Laboratorium Pemeriksa COVID-19 untuk 4 provinsi wilayah layanan dengan kode Laboratorium C.55. Jumlah alat yang diadakan sebanyak 27 unit (terlampir pada tabel).

Pada tahun 2021 penambahan alat untuk mengembangkan kemampuan Laboratorium Kimia dan Biologi Lingkungan khususnya pemeriksaam sampel air dilapangan dan perlakuan penyimpanan sampel yang memenuhi syarat. Selain itu dilakukan penambahan alat untuk pengembangan Laboratorium Virologi untuk pemeriksaan sampel Virus dan Laboratorium Entomologi untuk mendukung pengembangan pemeriksaan vektor dengan Jumlah alat sebanyak 9 Unit (terlampir pada tabel).

Pada tahun 2022 terdapat penambahan peralatan laboratorium dari penganggaran sendiri berupa peralatan untuk melakukan pengukuran udara ambien selama 24 jam dengan output hasil indeks standar pencemaran udara sesuai standar peraturan LH terbaru, dan penambahan peralatan Spektrofotometer untuk pengembangan pengujian parameter Sianida (CN) pada sampel air dan makanan. Pada tahun 2022 juga terdapat dropping peralatan dari kemenkes berupa mesin PCR dan peralatan Luminex untuk pengukuran sampel secara serologi total penambahan alat di tahun 2022 sebanyak 4 Unit (terlampir pada tabel).

Tabel 1.8 Daftar Alat Laboratorium Pengadaan di BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020, 2021, dan 2022

	Nama / Jenis Pengadaan Alat Laboratorium		
No	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	PCR (*Biorad CFX96 Real Time*)	pH meter (*Thermo Scientific*)	*Air Quality Monitoring System (AQMS Pro)*
2	*UV Sterilizer* (*TSN 88 UV Room Sterilizer*)	Inkubator (CAPP Medium)	Spektrophotometer UV-Visible (Spectroquant Prove 600)
3	*Infrared Thermometer*	Freezer (GEA)	PCR (Quanstudio 5)
4	*Laboratory Firdge/Freezer (Thermo Revco Ultra Low* 490 L)	Alat ekstraksi *otomatic* (*Genolution*)	Luminex MAGPIX (NxTAG Enabled)
5	*Micropippets*	BSC Kelas II (Esco)	
6	*Autoclave (Equitron Vertical Stedd)*	*Centrifuge low temperature* (Eppendor 5430R)	
7	*Microcentrifuge* (Tomy MDX-310)	Alat ekstraksi *otomatic* (Qiagen)	
8	*Firdge/Freezer* (Binder/*Ultra Guard UF V* 500)	Mikropipet 100 – 1000 µ	
9	*Vortex Mixer* (Biosan / V-1 Plus)	Alat bedah tikus	
10	*Autoclave* (Tomy / SX-500)		
11	*Centrifuge* (Tomy / Multispin)		
12	*Rainin Pipet Carausal Stand*		
13	*Multichannel Pipet* (Rainin 20 - 200 µl)		
14	*Multichannel Pipet* (Rainin 300 - 500 µl)		
15	*Centrifuge* (*Tomy Multi Spin Mini Centrifuge*)		
16	*Uninteruoted Power Supply* (UPS)		
17	*Freezer* -n 30 ° C, *Refrigerator* (*Thermo Scientific* 2 -8 °C)		
18	*Vortex Mixer* (Biosan V-1 Plus)		
19	*Bacteriological Colony Counter* (*Interscience Scan* 500)		
20	*Automatic Pipet Dispenser* (Rainin DX – 10)		
21	BSC Class II Type A2 ESCO		
22	*Loop Sterilizer (Glowzone* LF4 001.000)		
23	*Hanna Chlorin Photometer*		
24	*Analytical Balance* (*Ohaus Adventurer* – AX224)		
25	*Staplex USA – Portable HVAS*		
26	Temperatur Monitor (*Delta OHM Humidity Barometer*)		

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Dengan bertambahnya peralatan ini, maka dapat meningkatkan jumlah parameter dan kualitas pemeriksaan yang diuji pada laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar.

2) Sarana Penunjang

Untuk pelaksanaan operasional perkantoran pada BTKLPP Kelas I Makassar ditunjang oleh sarana penunjang yang meliputi:

a. Air

Untuk kebutuhan air bersih kantor BTKLPP Kelas I Makassar diperoleh dari PDAM Kota Makassar.

b. Listrik

Daya listrik yang tersedia di kantor BTKLPP Kelas I Makassar sebesar 23.000 KVA digunakan untuk pengoperasian peralatan laboratorium dan alat penerangan, serta peralatan penunjang lainnya.

Pada Tahun 2022 dilakukan penambahan daya salah satu sumber listrik dari 147.000 KVA menjadi 555.000 KVA, guna menunjang operasional kantor BTKLPP Kelas I Makassar, baik di gedung induk ataupun gedung laboratorium.

c. Telepon / Jaringan Internet

Telepon yang dipergunakan kantor BTKLPP Kelas I Makassar sebanyak 1 (satu) unit sambungan, 0411-871620 untuk telepon dan *faximile*. Selain itu, BTKLPP Kelas I Makassar dilengkapi pula dengan *website* sebagai media informasi dengan alamat: www.btklmakassar.or.id dan email: btklmakassar@gmail.com.

Dengan perkembangan media komunikasi dan teknologi dimana terjadi perubahan dari pertemuan langsung (luring) menjadi daring dilakukan pengembangan jaringan *Local Area Network* (LAN) di beberapa ruangan. Disamping itu, ditambahkan juga unit alat komunikasi telepon (PABX) guna menunjang komunikasi, serta *Handytalky* dalam menunjang komunikasi satuan pengamanan.

d. Peralatan Kantor

Kantor BTKLPP Kelas I Makassar telah memiliki beberapa unit alat sarana komunikasi dan alat audio visual yang terdiri dari televisi, *sound system*, kamera, *handycam*, LCD/layar proyektor yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor. Pada tahun 2022, terdapat penambahan peralatan penunjang perkantoran, seperti: laptop, kursi kerja, lemari, televisi, *Air Conditioner*, Pintu Eletrik dan alat penunjang lainnya.

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diuraikan ke dalam 5 bagian dengan rincian sebagai berikut.

Ringkasan Eksekutif menguraikan secara singkat capaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar selama periode anggaran tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024.

Bab I : Pendahuluan

Bab I menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi organisasi, dasar hukum, isu strategis, kegiatan organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Bab II menguraikan perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab III menguraikan capaian kinerja organisasi, sasaran program dan sasaran kegiatan dan realisasi anggaran yang memuat penjelasan rinci dan analisis pengukuran kinerja.

Bab IV : Penutup

Bab IV memuat kesimpulan dan harapan untuk pencapaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

Lampiran

Bagian ini memuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mendukung penyusunan Laporan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Arah pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2020-2024, salah satunya adalah penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (*continuum of care*). Pendekatan ini dilaksanakan antara lain melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Arah ini selanjutnya dirumuskan dalam rencana kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dengan konsep surveilans berbasis laboratorium dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi B/BTKLPP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut, BTKLPP Kelas I Makassar telah menetapkan sasaran kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2024.

Indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar pada bulan Agustus 2022 dan target pencapaiannya pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perencanaan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Program/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan	Rekomendasi	50
		2. Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan	Persen (%)	90
		3. Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam	Persen (%)	95
		4. Teknologi Tepat Guna Yang Dihasilkan	Jenis	3
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5. Nilai Kinerja Anggaran		90
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		90
		7. Kinerja Implementasi Satker WBK		85
		8. Persentase Penigkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	Persen (%)	80

Sumber: Dokumen RAK Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar, 2022

1. Rencana Aksi Kegiatan (2020-2024)

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Kelas Makassar disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan Rencana strategis (Renstra) Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta dirancang untuk mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah khususnya pembangunan di

bidang kesehatan. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan reviu terhadap RAK awal dan Revisi-1, maka diterbitkan RAK Revisi-2 sebagai RAK revisi terakhir s.d. tahun 2022. Dalam dokumen RAK Revisi-2 yang terbit bulan Agustus 2022 ini, terdapat perubahan target pada beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Aksi Kegiatan Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan	21	40	50	60	65
2	Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan	25%	50%	90%	95%	100%
3	Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam	100%	95%	95%	96%	97%
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3	3	3	4	5
5	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	90	93	95
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	80	90	93	95
7	Kinerja Implementasi Satker WBK	70	75	85	88	90
8	Persentase Penigkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	45%	80%	80%	80%	80%

Sumber: Dokumen RAK Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024

2. Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja BTKLPP Kelas I Makassar sebagai berikut.

a. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan;
b. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan;
c. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam;
d. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan;
e. Nilai kinerja anggaran;
f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
g. Kinerja implementasi satker WBK;
h. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar merupakan dokumen yang memperjanjikan rencana kinerja antara Kepala BTKLPP Kelas I Makassar dengan Direktur Jenderal P2P untuk mewujudkan target kinerja sasaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2022. Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar disusun berdasarkan target kinerja yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2020 - 2024. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 dilakukan pada bulan Desember 2021, yaitu setelah diterimanya pengesahan DIPA BTKLPP Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2022, kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan pada awal tahun 2022.

Pada tahun anggaran berjalan dilakukan revisi Perjanjian Kinerja, karena terdapat penambahan pagu anggaran kegiatan pelaksanaan G-20 namun tidak terdapat perubahan target indikator. Adapun Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan	rekomendasi	46
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan	persen	75
3.	Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam	persen	95
4.	Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan	jenis	3
5.	Nilai Kinerja Anggaran		85
6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93
7.	Kinerja Implementasi Satker WBK		75
8.	Persentase Penigkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	persen	80

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan Sub. Bagian Administrasi Umum dan seluruh substansi di lingkup BTKLPP Kelas I Makassar. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan uraian mengenai kinerja, realisasi keuangan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022. Selanjutnya, dilakukan analisis dan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya.

Analisis dan pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara mengakumulasikan seluruh jumlah capaian realisasi kegiatan kemudian memperbandingkan antara realisasi dengan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dengan Ditjen P2P. Adapun rumus yang digunakan ialah:

$$\text{Capaian kinerja (Persentase)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\,\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan. Faktor-faktor pendukung dan kendala tersebut selanjutnya dipelajari agar dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2021 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Persentase Pengukuran Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2021 sampai dengan 2022

No	Indikator Kinerja	Persentase Capaian (%)	
		2021	2022
1.	Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan	105	124
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan	133	116
3.	Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam	105	105,26
4.	Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan	100	133
5.	Nilai Kinerja Anggaran	106,5	101,9
6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	108	101,1
7.	Kinerja Implementasi Satker WBK	116,17	114,9
8.	Persentase Penigkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	125	125
	Nilai Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Satker	**112,4**	**115,2**

Sumber: Data Primer Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan **Tabel 3.1** dapat dikemukakan bahwa hasil pengukuran kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2022 menunjukkan nilai rata-rata capaian kinerja satker adalah 115,2%.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022, secara keseluruhan BTKLPP Kelas I Makassar telah menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Hal ini tampak dari kegiatan yang terealisasi telah memenuhi target yang ditetapkan. BTKLPP Kelas I Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dan berfokus pada hal-hal yang belum memenuhi harapan. Hal ini bertujuan untuk mencapai target yang diharapkan dimasa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja BTKLPP Kelas I Makassar yang disajikan berikut ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan anggaran/dana dalam rentang waktu tahun 2022.

Indikator 1. Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan.

Pengertian

Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium adalah kegiatan sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan menanggulangi penyakit dan faktor risikonya melalui proses pengumpulan data berbasis laboratorium dan pengolahan, serta analisis data.

Definisi Operasional

Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP.

Cara Perhitungan

Jumlah surveilans, kajian, rekomendasi survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP selama 1 (satu) tahun.

Capaian Indikator

a. **Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target : 46
Realisasi : 57
% Capaian : 57/46 x 100% = 124%

Realisasi yang dicapai adalah:

1. Pemetaan Reseptivitas Malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemetaan Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Survei Evaluasi Dampak POPM Filariasis Alternatif di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Surveilans Sentinel Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Surveilans Zoonosis (Brucellosis) di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Surveilans Pemantauan Indeks Morfologi dan Indeks Bakteriologi Kusta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Surveilans Penemuan Kasus TB baru dan Pemantauan Pengobatan di Tempat Khusus Provinsi Sulawesi Barat;
19. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
22. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
25. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

26. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Tanah dan Bahan Pangan) di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
35. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Surveilans Faktor Risiko Legionellosis di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
38. Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I (Erapo) di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
39. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
40. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
41. Surveilans pada Situasi Khusus (Nataru) di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
42. Surveilans pada Situasi Khusus (Pekan Olahraga Provinsi) di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

43. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan di Wilayah Layanan (Provinsi Sulawesi Tenggara) dalam rangka Hari Nusantara;
44. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dalam rangka Pelaksanaan PE Kasus Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
45. Gambaran Kualitas Air Badan Air dan Air Laut Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar;
46. Gambaran Kualitas Air Bersih Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar;
47. Gambaran Kualitas Air Limbah Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar;
48. Gambaran Kualitas Air Minum Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar;
49. Gambaran Kualitas Makanan dan Swab (Peralatan Makan, Rectal dan Tangan) Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
50. Gambaran Kualitas Udara Ambien Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
51. Survei Monitoring Resistensi Vektor Malaria di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
52. Survei Sentinel Tikus di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
53. Survei Perubahan Iklim Vektor Malaria di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (Musim Penghujan dan Musim Kemarau);
54. Survei Perilaku Vektor di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
55. Survei Monitoring Resistensi Vektor DBD di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
56. Pengembangan Pengujian dan Kendali Mutu Laboratorium Penyakit; dan
57. Pengembangan Pengujian dan Kendali Mutu Laboratorium Faktor Risiko.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator *Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan* oleh BTKLPP Kelas I Makassar merupakan indikator yang sama dengan tahun 2020 dan 2021. Adapun hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu adalah seperti yang tampak pada grafik berikut:

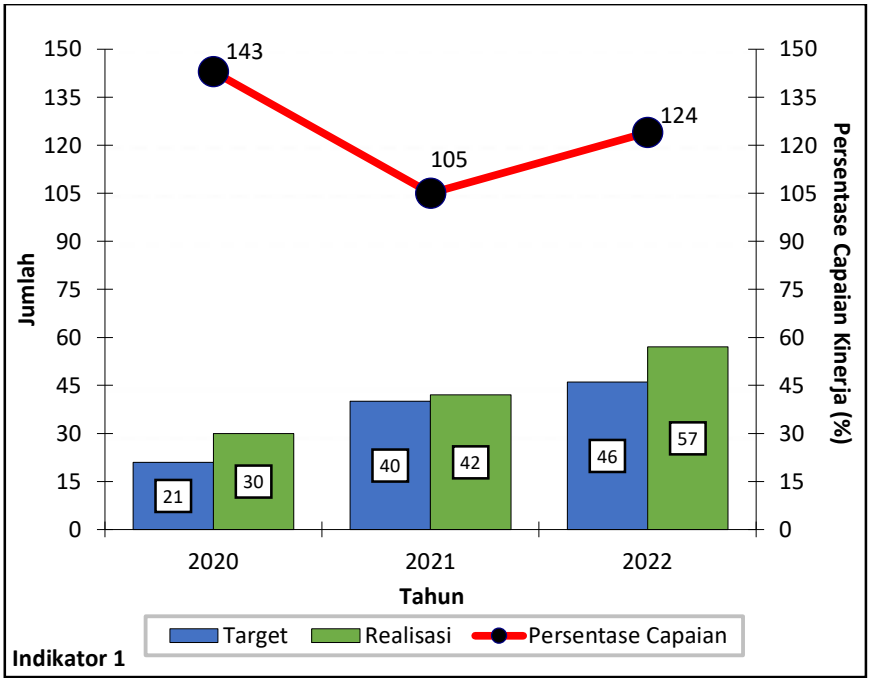

Grafik 3.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja, serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir; Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan Tahun 2020 s.d Tahun 2022

Berdasarkan **Grafik 3.1** di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi peningkatan persentase capaian kinerja dari tahun 2020 ke tahun 2021; namun ada peningkatan capaian kinerja 19% dari tahun 2021 ke tahun 2022, dimana pada tahun 2022 tercapai 124%. Terjadi peningkatan kinerja tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan adanya revisi kegiatan dari kegiatan 8 *Transmission Assessment Survey* (TAS) menjadi 3 kegiatan TAS alternatif dan 5 kegiatan Survey Evaluasi Prevalensi Kecacingan. Revisi ini sebagai akibat dari tidak tersedianya *Brugia Rapid*, tetapi sedikit lebih rendah dari tahun 2020 karena di tahun 2020 banyak kegiatan survey yang dilaksanakan di kantor sendiri dalam rangka pemenuhan kantor bebas nyamuk dan kantor yang berhias.

c. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 236. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (30), tahun 2021 (42), tahun 2022 (57), dan untuk

tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka realisasi tercapai sebesar 54,66% (129/236x100% = 54,66%). Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa realisasi kinerja BTKLPP Kelas I Makassar sudah mencapai 54,66% (pada tahun ke-3).

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

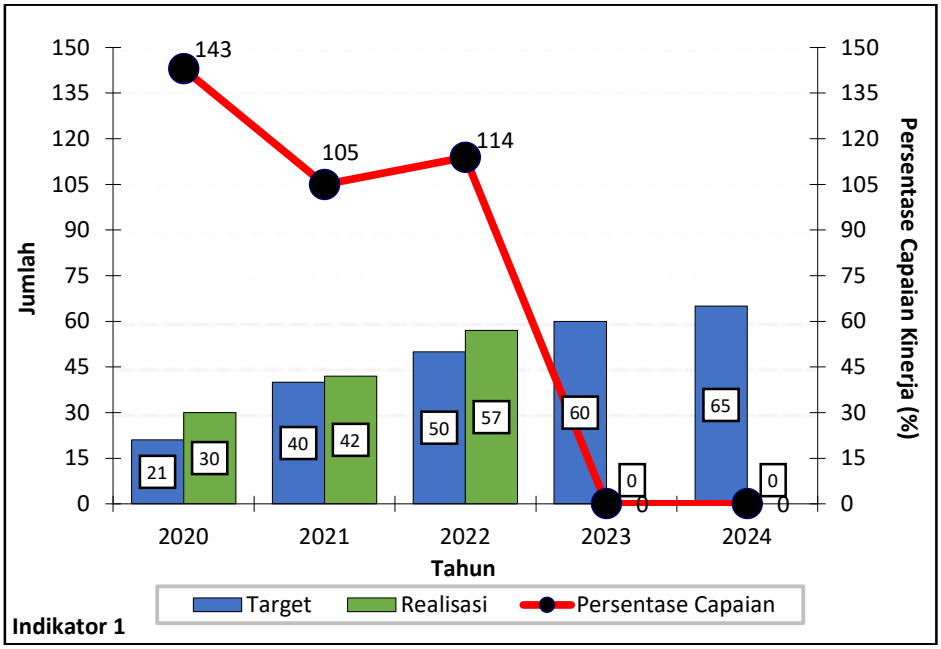

Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024; Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan

Berdasarkan **Grafik 3.2** dapat dikemukakan bahwa target yang telah ditentukan pada pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun ke depan belum tercapai karena pencapaian tahun 2020 – 2022 sebesar 54,66%, hal ini dikarenakan pelaksanaan rencana aksi kegiatan masih pada periode tahun ketiga (2020-2022).

d. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator *Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan* dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP

Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Indikator Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan		
	Target (Rekomendasi)	Realisasi (Rekomendasi)	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	46	57	124
BTKLPP Kelas I Palembang	149	159	106,71
BTKLPP Kelas I Batam	76	76	100
BTKLPP Kelas I Manado	24	24	100

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.2** dapat dikemukakan bahwa keempat satker sama-sama menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal, yakni sebesar ≥100%. Meskipun keempat satker menetapkan target yang berbeda, satker setingkat ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi BTKLPP Kelas I Makassar lebih tinggi dari satker setingkat karena adanya revisi kegiatan dari kegiatan *Transmission Assessment Survey* (TAS) menjadi TAS alternatif Survey Evaluasi Prevalensi Kecacingan, sehingga realisasi rekomendasi di BTKLPP Kelas I Makassar melebihi target.

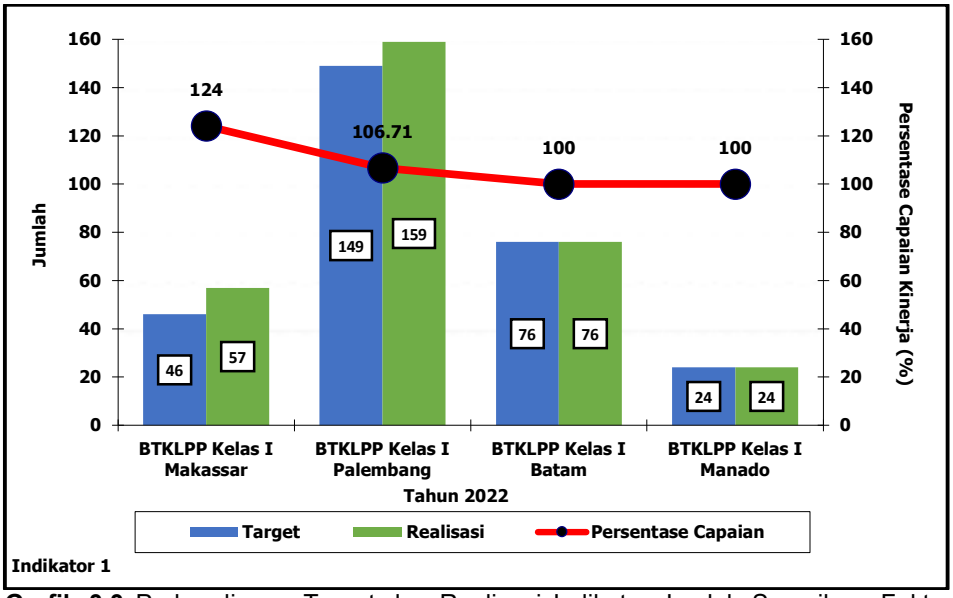

Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Dari **Grafik 3.3** menunjukkan bahwa perbandingan hasil kinerja antara BTKLPP Kelas I Makassar dan 3 (tiga) satker setingkat lainnya sama-sama mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing satker. Penetapan target yang berbeda dimungkinkan mengingat perbedaan kondisi wilayah layanan maupun ketersediaan sumber daya pada masing-masing satker. Jika dibandingkan dengan keempat satker, realisasi indikator BTKLPP Kelas I Makassar berada pada urutan ketiga setelah BTKLPP Kelas I Palembang (159 rekomendasi) dan BTKLPP Kelas I Batam (76 rekomendasi).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2020-2022, dunia dihadapkan pada adanya pandemi COVID-19, hal ini menuntut semua unsur untuk melakukan adaptasi kebiasaaan baru. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi BTKLPP Kelas I Makassar dalam mencapai target kinerja termasuk target persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit yang dimanfaatkan. Salah satu upaya dalam mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan kegiatan pembuatan Kajian Data Pasif dari hasil data laboratorium. Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena tim dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan kinerja antara lain:

a. Adanya kerjasama seluruh unsur, baik teknis ataupun administratif dalam internal BTKLPP Kelas I Makassar;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas;
c. Peningkatan jejaring kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait;
d. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan beberapa tahun sebelumnya;
e. Penetapan kebijakan internal yang mendukung capaian kinerja dengan tetap mengedepankan keamanan di masa pandemi.

<u>Masalah yang dihadapi</u>

(1) Faktor Internal:
   a. Belum dilakukan transfer ilmu pada sebagian besar kegiatan pelatihan atau pertemuan.
   b. Alat lapangan belum bisa sepenuhnya mendukung kegiatan pada daerah sulit.

(2) Faktor Eksternal:
   Alat bahan pengujian (RDT *Brugia malayi*) tidak tersedia.

Alternatif solusi yang dilakukan

(1) Menjaga dan meningkatkan koordinasi, serta kerjasama internal BTKLPP Kelas I Makassar;
(2) Evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
(3) Meningkatkan jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait; dan
(4) Melaksanakan rekomendasi dari Direktorat P2M untuk mengganti kegiatan TAS menjadi Survei alternatif/Brugia Impact Survey (BIS) melalui revisi internal.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator 1 didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   Sumber daya ini merupakan SDM yang terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan surveilans/kajian faktor risiko penyakit berbasis laboratorium pengembangan pengujian, kendali mutu laboratorium, dan sebagainya. Sebagai laboratorium penguji dan kalibrasi serta tambahan penugasan sebagai laboratorium pemeriksa sampel COVID-19 di wilayah layanan, maka SDM yang terbatas jumlahnya harus diatur penugasannya demi kelancaran pemeriksaan sampel COVID-19 yang cukup banyak jumlahnya serta menuntut hasil yang cepat dan akurat. Di samping pemeriksaan COVID-19, pelayanan pemeriksaan sampel di luar COVID-19, terutama UKL-UPL harus juga tetap berjalan. Untuk itu, dilakukan pengaturan jadwal melalui sistem shift dengan memberdayakan personil laboratorium yang sudah ada. Ini merupakan salah satu bentuk efisiensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja. Efisiensi SDM juga dilakukan dengan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan di Substansi dan Instalasi, untuk memastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten.

2. *Money*

   Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kegiatan, dilakukan revisi pada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai rekomendasi pusat. Efisiensi penggunaan dana/anggaran juga dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp 3.487.081.283,- atau 99,12% dari alokasi pagu Rp 3.518.146.000,-.

Tabel 3.3 Pagu Anggaran dan Realisasi Jumlah Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Surveilans FR dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	3.518.146.000,-	3.487.081.283,-	99,12

Sumber: Sub. Bag. Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.3** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit berbasis Laboratorium yang dilaksanakan, serapan anggaran sebesar 99,12%.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp3.518.146.000,- ; RAKi = Rp3.487.081.283,- ; CKi = 124% (1,24), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(3.518.146.000\text{x } 1{,}24) - 3.487.081.283}{(3.518.146.000 \text{ x } 1{,}24)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{872.360.747}{4.359.442.030}\ x\ 100\%$$

$$= 20{,}01\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 20,01%.

3. *Material*s

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan bahan-bahan, antara lain media, reagensia dan bahan habis pakai lainnya tersedia melalui pengadaan dengan anggaran satker sendiri.

4. *Method*

   Kegiatan dilakukan secara luring namun masih terdapat beberapa pertemuan yang diselenggarakan secara virtual menggunakan platform *Zoom Meeting*/ *Google Meet*, atau sejenisnya.

5. *Machine*

   Pemanfaatan seluruh peralatan laboratorium secara maksimal sehingga pengujian sampel dapat dilakukan merujuk pada *Gold Standar*d, salah satunya pemanfaatan mesin ELISA untuk pengujian sampel dengan metode antigen/antibody; pemanfaatan mesin PCR untuk pengujian virus, bakteri, dan parasit, serta penegasan identifikasi vektor penyakit dan *serotype*. Selain itu, juga dimanfaatkan alat pengujian sampel udara ambien yaitu alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*) untuk pengukuran udara ambien selama 24 jam dengan output hasil indeks standar pencemaran udara.

h. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target kinerja terkait *Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan* menjadi satu kesatuan dengan adanya upaya untuk mencapai indikator diantaranya:

1) Kerjasama internal BTKLPP Kelas I Makassar, baik unsur teknis ataupun administratif;
2) Peningkatan kapasitas SDM, baik kualitas ataupun kuantitas secara berkesinambungan;
3) Peningkatan kerjasama dan jejaring, baik dengan Unit utama (Eselon 1), sesama UPT Kemenkes ataupun wilayah layanan (Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, dan Puskesmas);
4) Peningkatan kemampuan laboratorium yang berkelanjutan;
5) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor, seperti institusi Pendidikan, TNI/ Polri, Badan / Balai terkait dan Tokoh masyarakat;
6) Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator 2. Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan

Pengertian

Rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan adalah tindak lanjut atas hasil dari kegiatan sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan menanggulangi penyakit dan faktor risikonya melalui proses pengumpulan data berbasis laboratorium dan pengolahan, serta analisis data.

Defenisi Operasional

Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh B/BTKLPP dan *stakeholder* terkait dalam periode 3 tahun terakhir.

Cara Perhitungan

Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang dilaksanakan/dimanfaatkan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait sampai dengan 3 tahun sejak rekomendasi dikeluarkan dibagi jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang disampaikan kepada *stakeholder* terkait selama 3 (tiga) tahun terakhir dikali 100%.

Capaian Indikator

a. **Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir**

Target : 75%
Realisasi : 87%
% Capaian : 87/75 x 100% = 116%

Realisasi yang dicapai adalah:
Rekomendasi yang telah dimanfaatkan oleh BTKLPP Kelas I Makassar dan *stakeholder* terkait sebesar 87%. Adapun persentase capaian yang diperoleh adalah 116%.

Rekomendasi yang dimanfaatkan adalah:

1. Uji RDT Malaria di Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
2. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis Pre-TAS di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
3. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis Pre-TAS di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
4. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis Pre-TAS di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
5. Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis (S3A) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
6. Survei Kepadatan Tikus di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020;
7. Survei Perilaku Vektor DBD di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020;
8. Surveilans Monitoring IM dan IB pada Pasien Kusta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
9. Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
10. Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
11. Survei Perilaku Vektor DBD di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
12. Kajian FR Penyakit/Gangguan Pernafasan pada Masyarakat yg bermukim di sekitar Lokasi Pertambangan Semen di Kelurahan Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
13. Kajian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
14. Surveilans Faktor Risiko Natal dan Tahun Baru di Malino Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
15. Kajian Faktor Risiko Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
16. Kajian Faktor Risiko Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
17. Kajian Faktor Risiko Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

18. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Bersumber Air melalui DAMIU di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
19. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Bersumber Air melalui DAMIU di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
20. Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I (Erapo) di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
21. Gambaran Kualitas Air Minum dan Kejadian Diare di Kota Kendari berdasarkan Data Profil Kesehatan Kota Kendari Tahun 2018-2019;
22. Kajian Kuantitas dan Kualitas Air Minum berdasarkan Jenis Sarana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
23. Kajian Faktor Risiko Penyakit Menular melalui Makanan (*Foodborne Diseases*) berdasarkan Data Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
24. Kajian Faktor Risiko Penyakit Menular melalui Makanan (*Foodborne Diseases*) berdasarkan Data Profil Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah 2018;
25. Gambaran Kualitas Air Minum di Provinsi Sulawesi Selatan (Kajian Data Pasif Hasil Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2019);
26. Dampak Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makan/Minum di sekitar Kantor BTKLPP Kelas I Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
27. Melakukan Pemeriksaan Sampel Lingkungan Tahun 2020;
28. Melakukan Pemeriksaan Sampel COVID-19 Tahun 2020;
29. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre-TAS) di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
30. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre-TAS) di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
31. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre-TAS) di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
32. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre-TAS) di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
33. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis (Pre-TAS) di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
34. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis (TAS 1) di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
35. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis (TAS 2) di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

36. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (TAS 3) di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
37. Surveilans S3A di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
38. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
39. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
40. Survei Brucellosis di Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
41. Survei Brucellosis di Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
42. Surveilans DBD di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
43. Pemetaan Luas Wilayah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
44. Pemetaan Luas Wilayah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
45. Surveilans Monitoring IM dan IB pada Pasien Kusta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
46. Surveilans Faktor Risiko Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
47. Surveilans Faktor Risiko Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
48. Surveilans Faktor Risiko Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
49. Surveilans Faktor Risiko Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
50. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021;
51. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
52. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
53. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

54. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021;
55. Kajian Faktor Risiko Penyakit terhadap KesMas sekitar Pertambangan Emas di Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tengggara Tahun 2021;
56. Kajian Faktor Risiko Legionellosis di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
57. Kajian Faktor Risiko Legionellosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
58. Analisis Faktor Risiko Merkuri terhadap Kesehatan Masyarakat sekitar Penambang Emas Tradisional di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
59. Kajian Faktor Risiko Penyakit pada Tempat Pengolahan Makanan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasan Baru di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
60. Kajian Faktor Risiko Legionellosis di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
61. Kajian Faktor Risiko Penyakit terhadap Kesehatan Masyarakat di sekitar Penambangan Emas di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
62. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makanan di Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021;
63. Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I (Erapo) di Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
64. Kajian Faktor Risiko Lingkungan Penyakit DBD di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
65. Melakukan Pemeriksaan Sampel Lingkungan Tahun 2021;
66. Melakukan Pemeriksaan Sampel COVID-19 Tahun 2021;
67. Pemetaan Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
68. Survei Evaluasi Dampak POPM Filariasis Alternatif di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
69. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
70. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;

71. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
72. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
73. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
74. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
75. Survei EvaluasiPrevalensi Kecacingan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
76. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
77. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
78. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
79. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
80. Surveilans Sentinel Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
81. Surveilans Zoonosis (Brucellosis) di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
82. Surveilans Pemantauan Indeks Morfologi dan Indeks Bakteriologi Kusta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
83. Surveilans Penemuan Kasus TB baru dan Pemantauan Pengobatan di Tempat Khusus Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;
84. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
85. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
86. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
87. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
88. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;

89. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
90. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
91. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
92. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
93. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
94. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
95. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
96. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
97. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Tanah dan Bahan Pangan) di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
98. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Konawe Utara Prov. Sul-Tra Tahun 2022;
99. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
100. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
101. Surveilans Faktor Risiko Legionellosis di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
102. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan Tahun 2022;
103. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022;

104. Surveilans pada Situasi Khusus (Nataru) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Tahun 2022;
105. Surveilans pada Situasi Khusus (Porprov) di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Tahun 2022;
106. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan di Wilayah Layanan (Provinsi Sulawesi Tenggara) dalam rangka Hari Nusantara Tahun 2022;
107. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dalam rangka pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
108. Gambaran Kualitas Air Bersih Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
109. Gambaran Kualitas Air Limbah Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
110. Gambaran Kualitas Air Minum Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
111. Gambaran Kualitas Makanan dan Swab (Peralatan Makan, Rectal dan Tangan) Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
112. Gambaran Kualitas Udara Ambien Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
113. Survei Sentinel Tikus di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
114. Survei Perubahan Iklim Vektor Malaria di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (Musim Penghujan dan Musim Kemarau) Tahun 2022.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Keberhasilan capaian kinerja Indikator ini dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hasil kinerja terkait tampak pada grafik berikut:

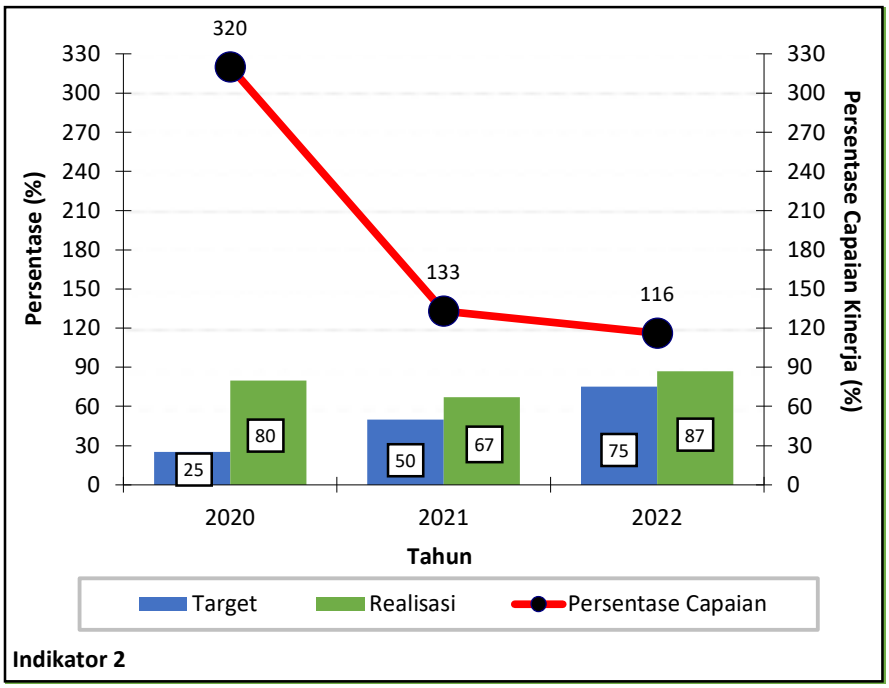

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2020 s.d Tahun 2022

Berdasarkan **Grafik 3.4** dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 tercapai 320%, pada tahun 2021 tercapai 133% dan 116% di tahun 2022. Terjadi penurunan persentase capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena banyak kegiatan dilaksanakan di semester kedua sehingga lintas program/lintas sektor belum memanfaatkan rekomendasi yang sudah disampaikan.

c. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 360%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (80%), tahun 2021 (67%), tahun 2022 (87%), dan untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka realisasi tercapai sebesar 65% (234%/360%x100% = 65%). Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa realisasi kinerja BTKLPP Kelas I Makassar baru mencapai 65% (pada tahun ke-3).

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

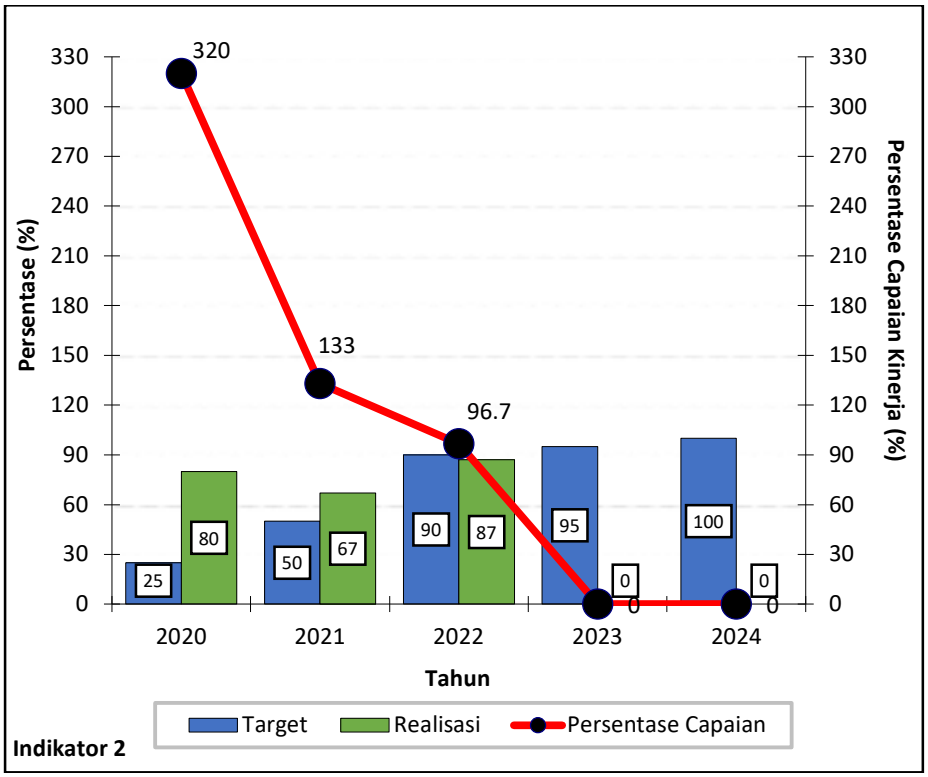

Grafik 3.5 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024; Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan

Berdasarkan **Grafik 3.5** dapat dikemukakan bahwa target yang telah ditentukan pada pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun ke depan belum tercapai karena pencapaian tahun 2020–2022 sebesar 65%, hal ini dikarenakan pelaksanaan rencana aksi kegiatan masih pada periode tahun ketiga (2020-2022).

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2022 atas Perubahan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Indikator Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan dengan Standar Nasional (Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024)

Indikator Kinerja	Target Nasional Tahun 2022	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan	90%	87%	96,7%

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Dari **Tabel 3.4** menunjukkan bahwa realisasi untuk *Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit yang dimanfaatkan* belum mencapai target nasional untuk tahun 2022; dimana standar nasional (Renstra 2020-2024) tahun 2022 sebesar 90% dan realisasi sebesar 87% dengan persentase capaian sebesar 96,7%. Hal ini dikarenakan selain kegiatan yang dilaksanakan di semester kedua, beberapa rekomendasi kegiatan tahun 2020 dan 2021 merupakan rekomendasi terhadap surveilans data pasif sehingga belum dimanfaatkan oleh lintas sektor dan lintas program.

d. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator *Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan* dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan		
	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	75	87	116
BTKLPP Kelas I Palembang	75	81,03	108,04
BTKLPP Kelas I Batam	75	75	100
BTKLPP Kelas I Manado	50	67,7	135,4

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.5** dapat dikemukakan bahwa BTKLPP Kelas I Makassar telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 116%, demikian pula dengan BTKLPP Kelas I Palembang dengan capaian kinerja sebesar 108,04%, BTKLPP Kelas I Batam dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan BTKLPP Kelas I Manado dengan capaian kinerja sebesar 135,4%. Meskipun BTKLPP Kelas I Makassar, Palembang, dan Batam menetapkan target yang sama (75%), akan tetapi BTKLPP Kelas I Makassar dapat memaksimalkan capaian kinerjanya lebih tinggi dari kinerja satker setingkat.

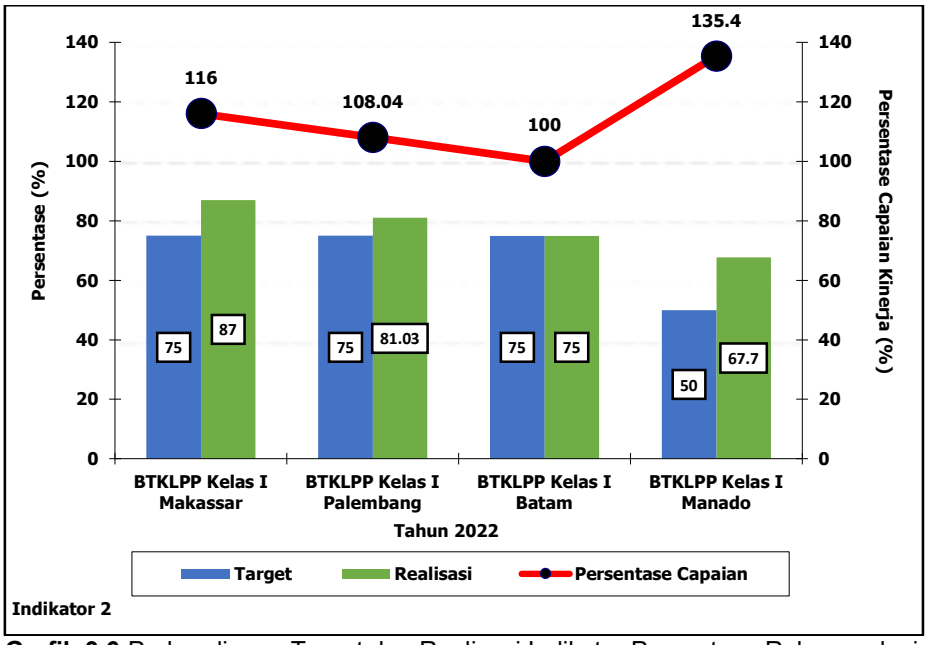

Grafik 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Dari **Grafik 3.6** menunjukkan bahwa perbandingan hasil kinerja keempat satker sama-sama mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing satker, dengan realisasi tertinggi dicapai oleh BTKLPP Kelas I Makassar sebesar 87%. Hal ini dimungkinkan mengingat perbedaan kondisi wilayah layanan pada masing-masing satker untuk pemanfaatan rekomendasi yang sudah disampaikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena sebagian rekomendasi yang dihasilkan menunjang program prioritas nasional. Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan kinerja antara lain:

a. Rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan;
b. Peningkatan jejaring kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait;
c. Rekomendasi yang disampaikan dengan metode advokasi yang tepat sasaran dapat memberikan keberhasilan dalam memicu *stakeholder* untuk memanfaatkan rekomendasi yang diberikan.

Masalah yang dihadapi

(1) Pelaksanaan rekomendasi di tahun anggaran berjalan belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lintas sektor dikarenakan belum dianggarkan pada tahun anggaran berjalan;
(2) Keterbatasan kewenangan terhadap wilayah layanan dalam pemanfaatan hasil rekomendasi yang disampaikan;
(3) Keterbatasan anggaran untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan.
(4) Beberapa program bukan merupakan prioritas bagi pemerintah daerah sehingga rekomendasi yang disampaikan tidak langsung dimanfaatkan.

Alternatif Solusi yang dilakukan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi, diperlukan beberapa alternatif solusi antara lain:

(1) Meningkatkan koordinasi eksternal dan melakukan evaluasi berkala terhadap rekomendasi yang dikeluarkan;
(2) Melakukan pendekatan jejaring dan advokasi dengan memberikan gambaran terhadap kebutuhan penerapan rekomendasi dan dampaknya;
(3) Mengkomunikasikan melalui WA/surat terkait pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi;
(4) Penyelenggaraan diseminasi informasi hasil kajian/rekomendasi (advokasi) pada tingkat pengambil kebijakan (pemerintah daerah);
(5) Evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
(6) Melakukan pemetaan awal terhadap hasil pelaksanaan kegiatan surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium;
(7) Meningkatkan jejaring kerjasama lintas program (sesama UPT Kemenkes misalnya Litbangkes) dan lintas sektor (Pemda setempat).

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   Efisiensi SDM dilakukan dengan memberdayakan tim surveilans/kajian untuk memantau tindak lanjut/pemanfaatan rekomendasi oleh stakeholders terkait. Efisiensi SDM juga dilakukan dengan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan di Substansi dan Instalasi, untuk memastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten.

2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran juga dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp 180.300.995,- atau 98,48% dari alokasi pagu Rp 183.092.000,-.

Tabel 3.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Surveilans FR dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	183.092.000,-	180.300.995,-	98,48

Sumber: Sub. Bag. Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.6** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan, serapan anggaran sebesar 98,48%.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp183.092.000,- ; RAKi = Rp180.300.995,- ; CKi = 116% (1,16), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(183.092.000 \text{x } 1{,}16) - 180.300.995}{(183.092.000 \text{ x } 1{,}16)} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{32.085.725}{212.386.720} \; x \; 100\%$$

$$= 15{,}11\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,11%.

3. *Material*s

   Dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pemanfaatan sumber daya material dari program pemerintah pusat. Sebagai contoh, dalam pengobatan selektif untuk yang positif cacingan, obatnya disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

4. *Method*

   Pendekatan terhadap pengambil kebijakan daerah setempat dalam membangun jejaring kerjasama. Contohnya adalah berkoordinasi dengan pemda setempat melalui telepon atau WA; penyampaian rekomendasi disampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan tertinggi di daerah setempat.

5. *Machine*

   Dalam pelaksanaan tindak lanjut atau pemanfaatan rekomendasi hasil surveilans/kajian faktor risiko, sumber daya dapat diefisiensi melalui pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki stakeholders terkait. Sebagai contoh, untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi berupa pertemuan LP/LS dengan menyediakan sarana berupa ruang pertemuan beserta perlengkapan tanpa perlu menyewa.

h. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target kinerja terkait *Persentase Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan* menjadi satu kesatuan dengan adanya upaya untuk mencapai indikator diantaranya:

1) Kerjasama internal BTKLPP Kelas I Makassar, baik unsur teknis ataupun administratif;
2) Peningkatan kapasitas SDM, baik kualitas ataupun kuantitas secara berkesinambungan;

3) Peningkatan kerjasama dan jejaring, baik dengan Unit utama (Eselon 1), sesama UPT Kemenkes ataupun wilayah layanan (Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, dan Puskesmas);
4) Peningkatan kemampuan laboratorium yang berkelanjutan;
5) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor, seperti institusi Pendidikan, TNI/ Polri, Badan / Balai terkait dan Tokoh masyarakat;
6) Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator 3. Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam

Pengertian

Definisi KLB menurut Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010, Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Definisi Operasional

Respon Signal Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya kurang dari 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, laporan penerimaan spesimen.

Cara Perhitungan

(A/B)*100%

A = Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang direspon oleh B/BTKLPP < 24 jam dalam 1 (satu) tahun

B = Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang diterima oleh B/BTKLPP dalam 1 (satu) tahun

Capaian Indikator

a. **Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target : 95%

Realisasi : 100%

% Capaian : 105,26%

Realisasi yang dicapai adalah:

1. Kasus COVID-19 Varian Omicron di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;

2. KLB DBD di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif ATIPICAL di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif ATIPICAL di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama tahun 2022 capaian kegiatan *Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam* di wilayah layanan BTKLPP Kelas I Makassar sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan persentase capaian sebesar 105,26%.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022 target capaian indikator ini sebesar 105,26% dan menghasilkan realisasi sebanyak 4 respon signal. Perbandingan capaian indikator selama 3 Tahun seperti grafik berikut:

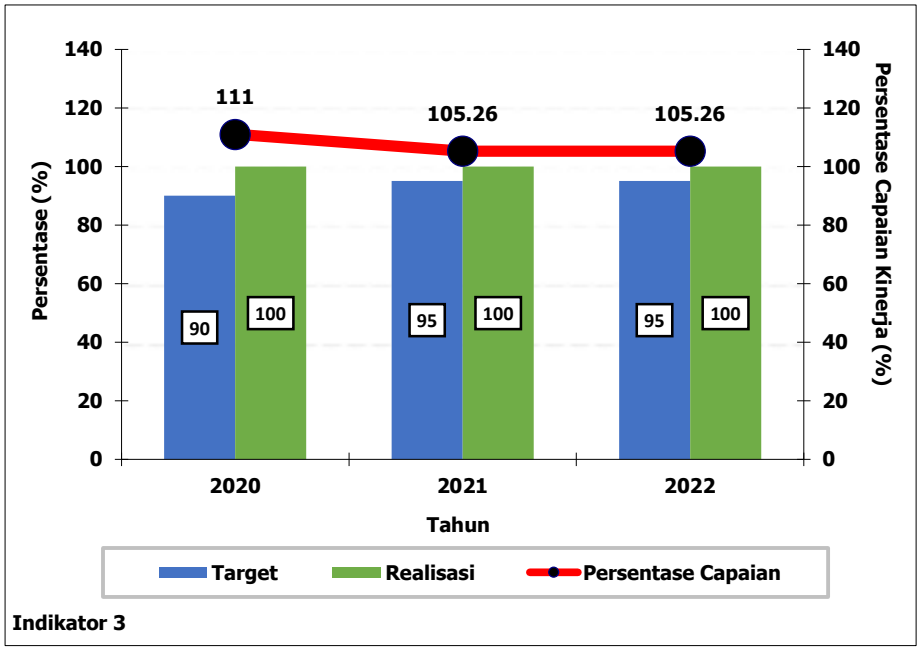

Grafik 3.7 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam di Wilayah Layanan Tahun 2020-2022

Dari **Grafik 3.7** di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, target *Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam* di Wilayah Layanan BTKLPP Kelas I Makassar telah melebihi target yang tertuang dalam RAK dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 95%, dimana capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 105,26%. Terjadi penurunan persentase capaian di tahun 2022

dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disebabkan karena tahun 2020 terjadi peningkatan kegiatan PE COVID-19.

c. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 473%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (100%), tahun 2021 (100%), tahun 2022 (100%), dan untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka realisasi tercapai sebesar 63,42% (300%/473%x100% = 63,42%). Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa realisasi kinerja BTKLPP Kelas I Makassar baru mencapai 63,42% (pada tahun ke-3).

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

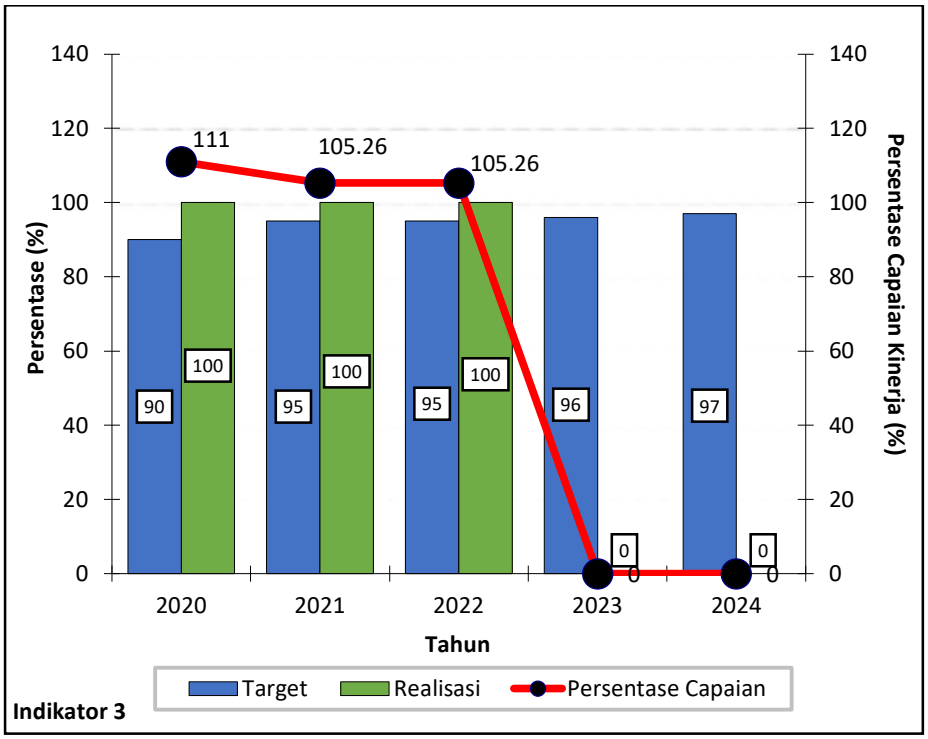

Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam di Wilayah Layanan Tahun 2020-2024

Berdasarkan **Grafik 3.8** dapat dikemukakan bahwa target yang telah ditentukan pada pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun ke depan belum tercapai karena pencapaian tahun 2020 – 2022 sebesar 63,42%, hal ini dikarenakan pelaksanaan rencana aksi kegiatan masih pada periode tahun ketiga (2020-2022).

e. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 jam dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 jam antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 jam		
	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	95	100	105,26
BTKLPP Kelas I Palembang	95	100	105,26
BTKLPP Kelas I Batam	95	100	105,26
BTKLPP Kelas I Manado	95	100	105,26

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.7** dapat dikemukakan bahwa keempat satker setingkat sama-sama menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal, yakni sebesar ≥95%.

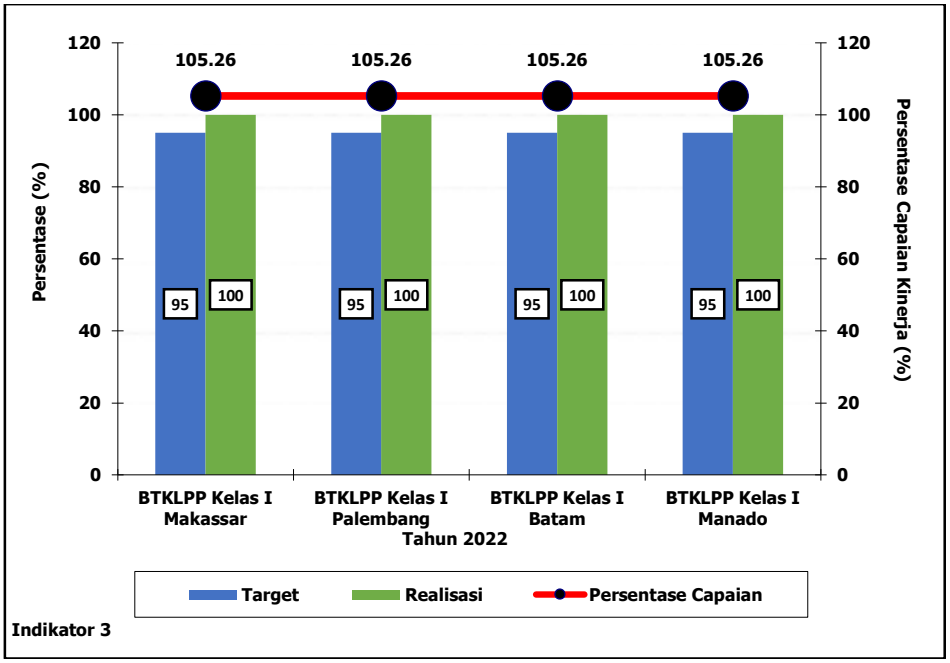

Grafik 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Dari **Grafik 3.9** menunjukkan bahwa perbandingan hasil kinerja dari keempat satker setingkat menetapkan target yang sama untuk indikator ini, yaitu 95%, dengan realisasi kinerja yang juga sama, yaitu 100%, sehingga keempat satker setingkat sama-sama mencapai target kinerja lebih dari atau sama dengan 95%.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena tim dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan pernyataan kinerja antara lain:

1) Kerjasama tim yang solid;
2) Kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi (SKDR), sehingga informasi dugaan bencana/pencemaran dapat direspon secara cepat dan tepat;
3) Meningkatnya jejaring dan kerjasama dengan wilayah layanan;
4) Dukungan logistik (*buffer stock*) yang memadai.

Masalah yang Dihadapi

(1) Faktor Internal:

Pemanfaatan SDM yang terlatih belum optimal.

(2) Faktor Eksternal:

Adanya kebijakan BPJS yang tidak menanggung biaya pengobatan bagi korban KLB apabila dikeluarkan W1 sehingga daerah enggan untuk mengeluarkan W1 walaupun sudah terjadi KLB.

Alternatif solusi yang dilakukan meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan penanganan KLB/ Wabah dan bencana;
b. Penyiapan *rapid test kit* untuk pemeriksaan sampel di lapangan;
c. Menambah tenaga yang kompeten Tim Gerak Cepat (TGC); dan
d. Komunikasi yang intensif dengan *stakeholder* dan pihak terkait di wilayah layanan.

g. Analisis atas Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   Sumber daya ini merupakan SDM yang terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan respon sinyal KLB/bencana kurang dari 24 jam. Tahun 2022, KLB yang direspon adalah Omicron, DBD, dan Gangguan Ginjal Akut Progresif ATIPICAL. Pelaksanaan respon dilaksanakan secara bersama lintas substansi.

2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran juga dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp 491.419.047,- atau 98,36% dari alokasi pagu Rp 499.636.000,-.

Tabel 3.8 Pagu Anggaran dan Realisasi Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Respon Signal KLB/ Bencana kurang dari 24 Jam	499.636.000,-	491.419.047,-	98,36

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.8** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator kinerja Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam, serapan anggaran sebesar

98,36% dan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp499.636.000,- ; RAKi = Rp491.419.047,- ; CKi = 105,26% (1,05), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(499.636.000\text{x } 1{,}05) - 491.419.047}{(499.636.000 \text{ x } 1{,}05)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{34.513.585}{525.932.632}\ x\ 100\%$$

$$= 6{,}56\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 6,56%.

3. *Material*s

   Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan bahan-bahan, antara lain reagen dan bahan habis pakai.

4. *Method*

   Pelaksanaan investigasi KLB dilaksanakan sesuai dengan Juknis dan SOP yang tersedia.

5. *Machine*

   Peralatan laboratorium di BTKLPP Kelas I Makassar sudah memenuhi untuk pemeriksaan sampel-sampel hasil penyelidikan KLB.

h. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian lebih dari target, dikarenakan:

a. Adanya peningkatan jejaring dan kerjasama dengan wilayah layanan;
b. Pemanfaatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR);

c. Pemanfaatan dukungan media komunikasi online (*whatsapp*) sebagai sarana dalam mendukung kelancaran komunikasi dengan *stakeholder*; dan
d. Adanya integrasi dari Pusat (Direktorat Surveilans Karantina dan Kesehatan) dalam pertemuan dan pelatihan terkait penyakit KLB.

Indikator 4. Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Pengertian

Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang diciptakan untuk masyarakat tertentu dengan memperlihatkan aspek lingkungan, ekonomi dan politik masyarakat.

Definisi Operasional

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun.

Capaian Indikator

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target : 3
Realisasi : 4
% Capaian : 133%

Realisasi yang dicapai adalah:

1. Pengolahan Air Bersih dengan Proses Desinfeksi menggunakan Chlorinator Sistem Infus;
2. Pengolahan Air Bersih Saringan Sederhana untuk menurunkan Kekeruhan, TDS;
3. Septic Tank Apung; dan
4. Septic Tank Vertikal.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target capaian kinerja tahun 2022 adalah 3 jenis dengan realisasi sebanyak 4 jenis. Kegiatan dan hasil capaian kinerja 133%. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi yang dihasilkan sebanyak 3 jenis dari 3 jenis yang ditargetkan sehingga capaian tahun 2020 dan 2021 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, capaian kinerja mengalami peningkatan.

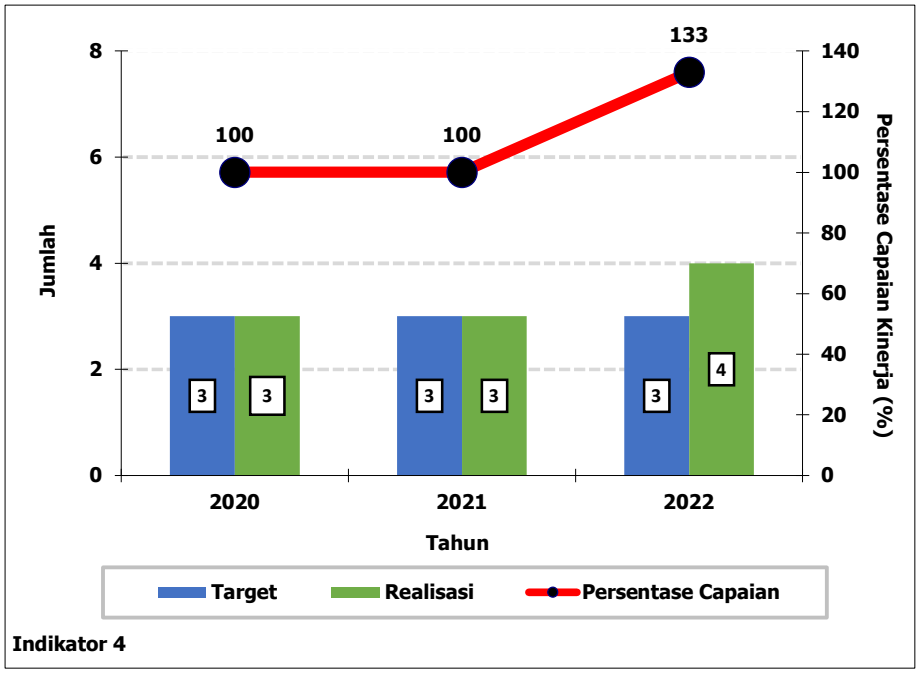

Grafik 3.10 Perbandingan antara Realisasi Kinerja, serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir; Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Berdasarkan **Grafik 3.10** di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan persentase capaian pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya penambahan satu jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berasal dari modifikasi TTG Septik tank menjadi TTG Septik tank Apung dan TTG Septik tank Vertikal, hal ini didasari dari adanya permasalahan di wilayah layanan yang membutuhkan TTG tersebut.

c. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 18. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (3), tahun 2021 (3), tahun 2022 (4), dan untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka realisasi tercapai sebesar 55,55% (10/18x100% = 55,55%). Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa realisasi kinerja BTKLPP Kelas I Makassar baru mencapai 55,55% (pada tahun ke-3).

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

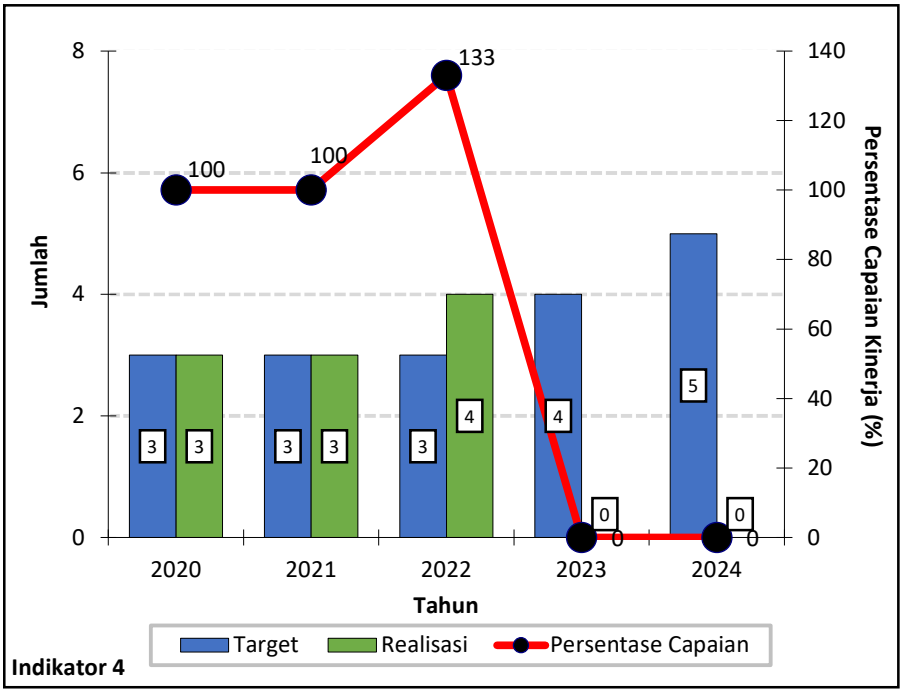

Grafik 3.11 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024; Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Berdasarkan **Grafik 3.11** dapat dikemukakan bahwa target yang telah ditentukan pada pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun ke depan belum tercapai karena pencapaian tahun 2020 – 2022 sebesar 55,55%, hal ini dikarenakan pelaksanaan rencana aksi kegiatan masih pada periode tahun ketiga (2020-2022).

e. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan		
	Target (Jenis)	Realisasi (Jenis)	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	3	4	133
BTKLPP Kelas I Palembang	4	4	100
BTKLPP Kelas I Batam	3	2	66,67
BTKLPP Kelas I Manado	4	4	100

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.9** dapat dikemukakan bahwa capaian TTG pada BTKLPP Kelas I Makassar melampaui capaian TTG pada 3 (tiga) satker setingkat. Meskipun terdapat dua satker menetapkan target yang lebih tinggi, akan tetapi memiliki realisasi yang sama, dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan, BTKLPP Kelas I Makassar memiliki realisasi yang melebihi dari target sehingga mencapai kinerja yang optimal sebesar 133%.

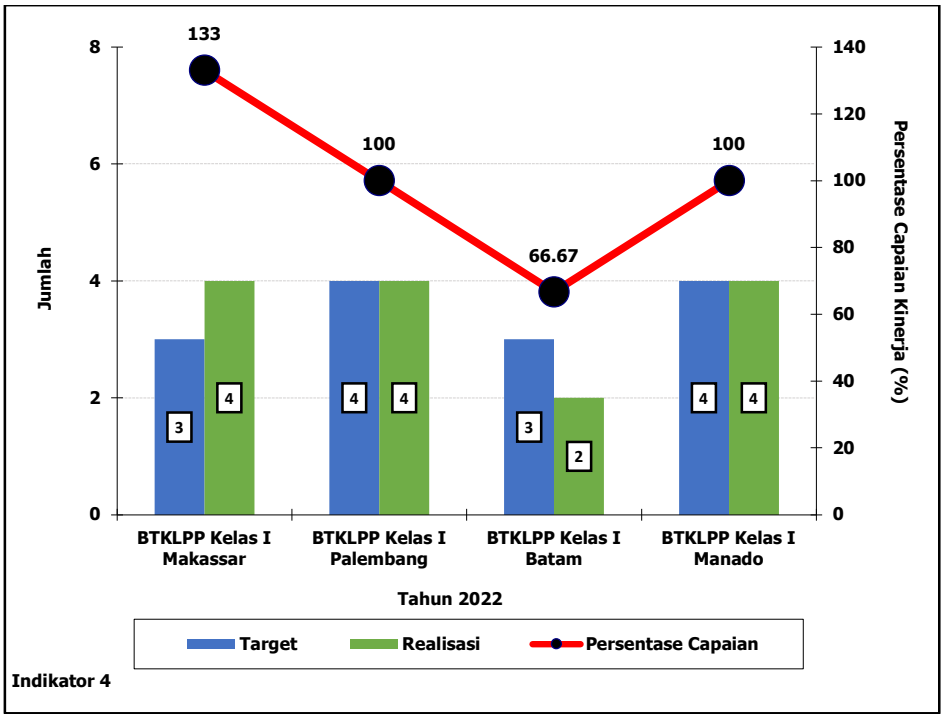

Grafik 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Berdasarkan **Grafik 3.12** digambarkan bahwa target indikator relatif hampir sama dari keempat satker setingkat. Terdapat dua satker yang memiliki target 4 jenis dengan capaian 100% dan terdapat dua satker lainnya yang memiliki target 3 jenis, BTKLPP Kelas I Makassar adalah salah satunya, namun capaiannya melebihi dari target sehingga BTKLPP Kelas I makassar memiliki capaian kinerja tertinggi dari ketiga BTKLPP Kelas I Lainnya.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam hal capaian indikator kinerja ini diperoleh karena tim dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang menunjang pencapaian keberhasilan pernyataan kinerja antara lain:

1. Adanya dorongan motivasi dari pimpinan;
2. Adanya inovasi dan kerjasama tim yang solid;
3. Anggaran yang sangat mendukung dalam pembuatan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
4. Dukungan dari Direktorat Kesehatan Lingkungan menjadi tim teknis pembuat rekomendasi TTG di wilayah layanan.

Masalah yang dihadapi

(1) Faktor Internal:

Tahapan penemuan teknologi tepat guna diawali dengan proses penelitian dan uji coba berskala laboratorium, dimana ada kemungkinan kegagalan dalam uji coba. Sampai saat ini belum ada mekanisme pertanggungjawaban untuk produk yang tidak berhasil sesuai dengan perencanaan penelitian (kejadian yang tidak dapat diprediksi), sehingga mengakibatkan pengembangan TTG hanya mampu dilakukan dengan skala terbatas atau hanya untuk produk yang diyakini berhasil keluarannya.

Selain itu, belum adanya SDM yang khusus menangani TTG, serta keterbatasan pengetahuan SDM yang memahami secara baik teknik tentang pengembangan, rancangan dan penapisan TTG.

(2) Faktor Eksternal :

Kontinuitas Pengawasan terhadap penggunaan TTG di masyarakat belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah setempat.

Alternatif Solusi yang Dilakukan:

1. Dilakukan koordinasi kepada unit utama untuk **mendapatkan** rujukan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada diseksi ADKL, SE dan PTL, khususnya yang tergabung dalam Tim TTG. Mengembangkan model/teknologi sebagai solusi terhadap terjadinya masalah penyakit maupun faktor risikonya;
3. Mengusulkan diklat teknis Teknologi Tepat Guna.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   Efisiensi SDM juga dilakukan dengan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan pada setiap Substansi, untuk memastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten. Salah satunya adalah penerbitan SK Kepala BTKLPP Kelas I Makassar No. HK.02.03/1/853/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pengelola Instalasi Teknologi Tepat Guna BTKLPP Kelas I Makassar.
2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp79.440.470,- atau 96,91% dari alokasi pagu Rp81.971.800,-.

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Teknologi Tepat Guna Bidang P2P yang dihasilkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	81.971.800,-	79.440.470,-	96,91

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Berdasarkan **Tabel 3.10** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator kinerja Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan, serapan anggaran sebesar 96,91%.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp81.971.800,-; RAKi = Rp79.440.470,-; CKi = 133% (1,33), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(81.971.800 \text{ x } 1{,}33) - 79.440.470}{(81.971.800 \text{ x } 1{,}33)} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{29.855.263}{109.295.733} \; x \; 100\%$$

$$= 27{,}32\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 27,32%.

3. *Material*s

   Efisiensi material dalam menghasilkan TTG yang dirancang dan dibuat sendiri oleh Tim TTG BTKLPP Kelas I Makassar. Metode ini dapat menghindari kemahalan produk.

4. *Method*

   Pelaksanaan uji fungsi yang disinergikan dengan sosialisasi penggunaan/ implementasi TTG di lokasi tempat TTG diserahkan, sehingga efisien dalam tenaga dan anggaran.

5. *Machine*

   Efisiensi peralatan dalam menghasilkan TTG yang dirancang dan dibuat sendiri oleh Tim TTG BTKLPP Kelas I Makassar. Metode ini dapat menghindari kemahalan produk.

h. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. TTG yang dihasilkan dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
2. TTG yang dihasilkan disosialisasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Indikator 5. Nilai Kinerja Anggaran

Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

Cara Penghitungan

Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan.

Capaian Indikator

a. **Membandingkan antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

   Target : 85

   Realisasi : 86,61

   % Capaian : 86,61/85 x 100% = 101,9%

   Adapun hasil atau capaian nilai kinerja anggaran secara spesifik dihitung dari target dan capaian kumulatif dengan memperhitungkan realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali realisasi indikator kegiatan dibagi dengan target indikator kegiatan. Target akhir periode (Desember) adalah target pada perjanjian kinerja, yakni 85. Jumlah kumulatif didasarkan pada monitoring *E-Monev* Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (*Dashboard E-Monev DJA*). Pada Tahun 2022, data *E-monev* DJA menujukkan data capaian/realisasi kinerja anggaran sebagai berikut:

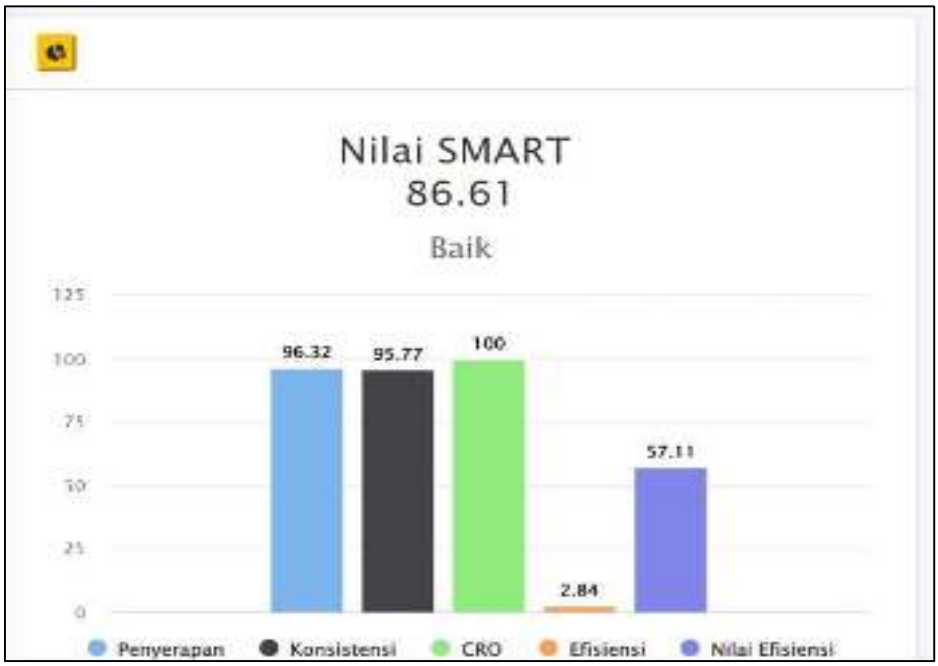

Sumber: E-monev DJA BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan **Gambar 3.1** dapat dikemukakan bahwa Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara optimal dengan capaian sebanyak 86,61 dari yang ditargetkan sebesar 85. Hal ini berarti seluruh pelaksaanan kegiatan terkait dengan indikator ini dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 85, capaian kinerja sebesar 86,61 sehingga persentase capaian adalah 101,9%. Untuk tahun 2020, target yang ditetapkan 80 dan capaian kinerja sebesar 93. Sedangkan tahun 2021, target yang ditetapkan 83 dan capaian kinerja sebesar 88,44. Persentase capaian untuk tahun 2020 adalah 116% dan tahun 2021 adalah 106,5%.

Adapun target dan capaian indikator nilai kinerja anggaran disajikan pada grafik berikut:

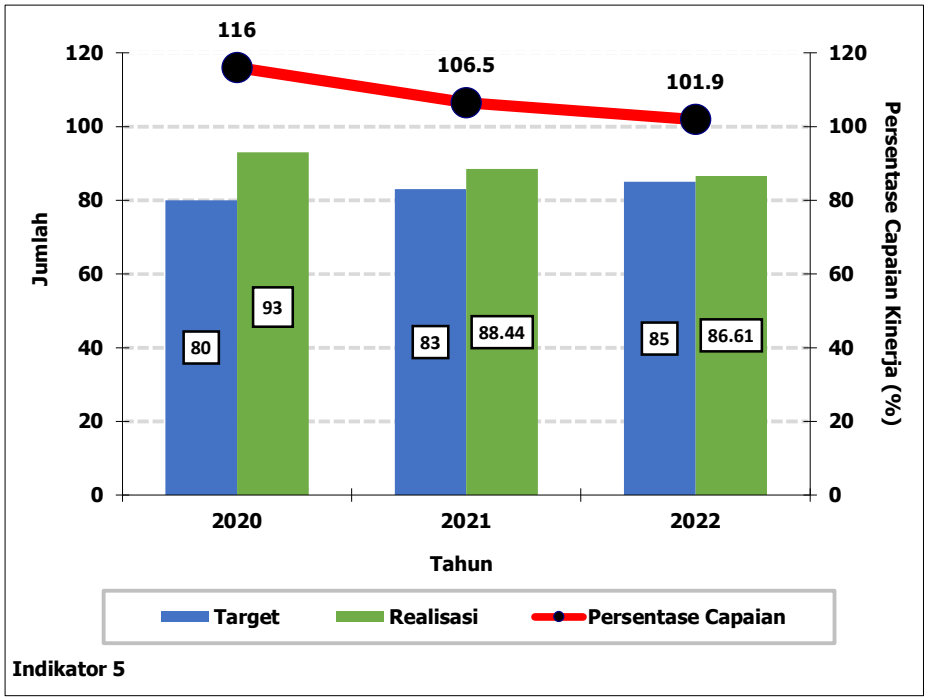

Grafik 3.13 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020, 2021, dan 2022

Dari **Grafik 3.13** menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 dengan capaian tahun 2020 dan 2021, maka terjadi penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena efisiensi di tahun 2022 sebesar 2,84 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021, dimana efisiensinya sebesar 7,76.

c. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang berjumlah 441. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (93), tahun 2021 (88,44), tahun 2022 (86,61), dan untuk tahun 2023 sampai dengan 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka baru tercapai sebesar 60,78% (268,05/441x100% = 60,78%). Sehingga dapat dikemukakan bahwa hingga tahun 2022 realisasi kinerja mencapai target kinerja yang telah ditetapkan belum tercapai karena masih di tahun ketiga kinerja 5 tahunan.

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

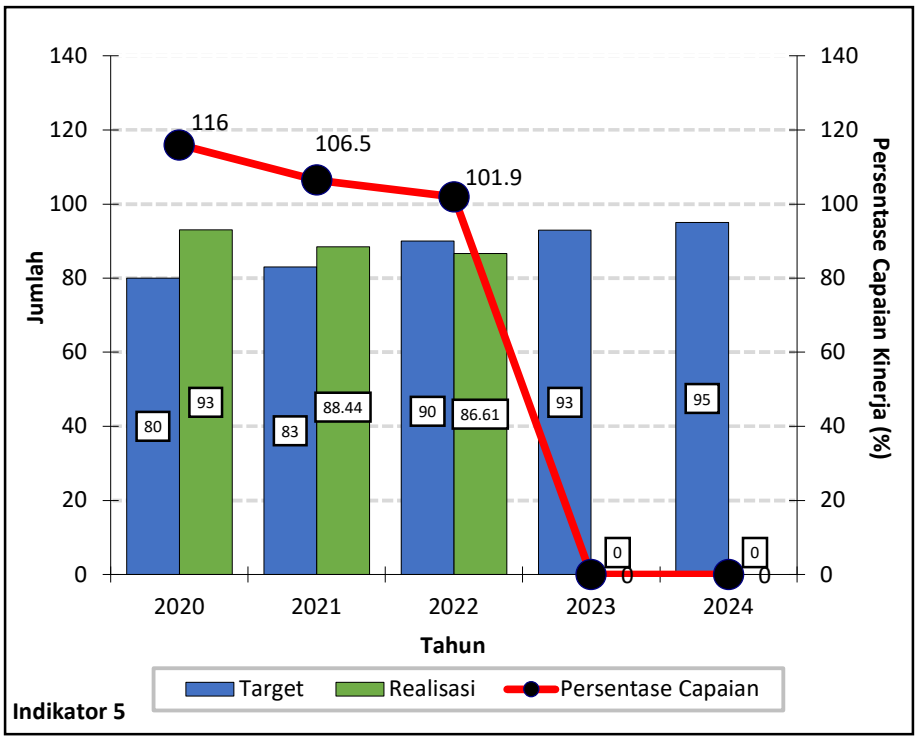

Grafik 3.14 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan **Grafik 3.14** dapat dikemukakan bahwa pada periode tahun 2022 kegiatan belum memperlihatkan trend yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun kedepan, akan tetapi trend capaian s/d akhir tahun 2022 sebesar 268,05 melebihi target yang telah ditentukan sebesar 253 dari tahun 2020-2022. Diharapkan trend positif ini terus dapat ditingkatkan hingga tahun 2024.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2022 atas Perubahan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Standar Nasional (Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024)

Indikator Kinerja	Target Nasional Tahun 2022	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Kinerja Anggaran	86	86,61	100,7%

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Dari **Tabel 3.11** diatas menunjukkan bahwa target untuk *Nilai Kinerja Anggaran* telah mencapai target nasional untuk tahun 2022; dimana standar nasional (Renstra 2020-2024) tahun 2022 sebesar 86 dan realisasi sebesar 86,61.

e. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator Nilai Kerja Anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Nilai Kinerja Anggaran		
	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	85	86,61	101,9
BTKLPP Kelas I Palembang	85	92,25	108,53
BTKLPP Kelas I Batam	80	83	103,75
BTKLPP Kelas I Manado	85	90,44	106,4

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.12** dapat dikemukakan bahwa capaian nilai kinerja anggaran BTKLPP Kelas I Makassar telah melebihi target yang telah ditentukan dengan realisasi kinerja sebesar 86,61 atau sebesar 101,9% dari target 85, begitupun dengan realisasi capaian nilai kinerja anggaran dari tiga satker lainnya juga dapat melebihi target yang telah ditentukan masing-masing satker.

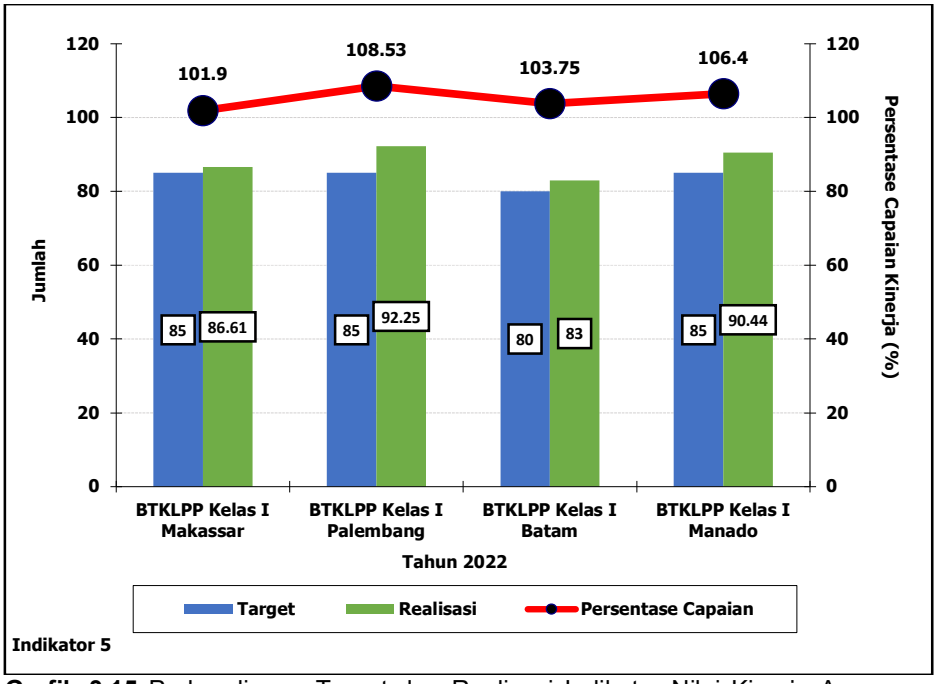

Grafik 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Berdasarkan **Grafik 3.15** dapat dikemukakan bahwa terdapat satu BTKLPP Kelas I yang menetapkan target berbeda dari tiga BTKLPP Kelas I lainnya untuk indikator ini, yang mana semuanya mencapai realisasi di atas target. Dari empat satker setingkat, realisasi BTKLPP Kelas I Makassar berada pada urutan ketiga, yaitu 86,61 setelah BTKLPP Kelas I Palembang (92,25) dan BTKLPP Kelas I Manado (90,44).

f. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2022 didukung oleh hal-hal berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi antar pegawai dijalankan melalui komunikasi yang efektif sehingga tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Mekanisme perencanan yang semakin baik.
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulan berjalan untuk memastikan pekerjaan dan tugas telah dilakukan dengan baik dan benar.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan sudah diimplementasikan dengan baik.

Faktor pendukung yang dimaksud berasal dari pihak eksternal, meliputi:

1. Pemerintah

   Dalam rangka mendukung kelancaran pelakanaan kegiatan dan ketepatan penggunaan anggaran, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, seperti diterbitkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

2. Kementerian Keuangan

   Kementerian Keuangan juga senantiasa mengeluarkan kebijakan yang mendukung kelancaran dan optimalisasi penggunaan anggaran yang bertujuan mempercepat penyerapan anggaran sehingga belanja negara dapat digunakan secara efektif dan tepat guna. Untuk itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Kendala/Masalah yang Dihadapi

a. Realisasi anggaran di semester pertama masih rendah karena adanya kegiatan yang direncanakan terealisasi di semester pertama, namun kegiatannya baru terlaksana di semester kedua;
b. Rendahnya nilai capaian output kegiatan di semester pertama karena adanya kegiatan yang baru terlaksana di semester kedua.

Pemecahan Masalah

Adapun alternatif pemecahan masalah ditempuh melalui cara berikut:

a. Mengoptimalkan penyerapan anggaran di semester kedua dengan melakukan revisi kegiatan;
b. Mempercepat pelaksanaan kegiatan di semester kedua sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur, baik teknis ataupun manajemen.

g. Analisis Pemanfaatan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   Mengoptimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan monev anggaran dan kinerja dan menetapkan penanggungjawab evaluasi kinerja anggaran di masing-masing subtansi yang akan melaporkan realisasi kegiatan setiap bulannya.

2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp 3.963.190.516,- atau 99,26% dari alokasi pagu Rp 3.992.608.000,-.

   Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran	3.992.608.000,-	3.963.190.516,-	99,26

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.13** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran, serapan anggaran sebesar 99,26% dan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\boxed{E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%}$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp3.992.608.000,- ; RAKi = Rp3.963.190.516,- ; CKi = 101,9% (1,019), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(3.992.608.000 \text{ x } 1{,}019) - 3.963.190.516}{(3.992.608.000 \text{ x } 1{,}019)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{105.042.177}{4.068.232.693}\ x\ 100\%$$

$$= 2{,}58\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,58%.

3. *Material*s

   Efisiensi dilakukan melalui penyediaan data-data yang berasal dari satu sumber, misal data realisasi anggaran dari pengelola keuangan sekalipun penanggung jawab penggunaan anggaran tersebut ada di Bidang/Bagian.

4. *Method*

   Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan redesain/ penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang tetap mematuhi protokol kesehatan membuat beberapa kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka, dialihkan secara virtual/*online* menggunakan platform *Zoom Meeting*/*Google Meet*/webinar, dengan tetap memenuhi tujuan.

5. *Machine*

   Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan perangkat pengolahan data yang tersedia untuk berbagai kebutuhan, termasuk monev anggaran dan kinerja.

h. Analisis Faktor Pendukung dan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka efektifitas penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator, BTKLPP Kelas I Makassar menempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembagian tugas (*job description*) bagi setiap pegawai telah mengacu pada prinsip *the right man on the right place* sehingga setiap pegawai dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya secara optimal sehingga hasil pekerjaanya semakin baik dan berkualitas.
2. Optimaliasi penggunaan anggaran/ dana dilakukan secara efektif dan efisien sehingga target kinerja dapat dicapai secara maksimal.

Indikator 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

<u>Pengertian</u>

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Definisi Operasional

Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Capaian Indikator

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target : 93
Realisasi : 94,02
% Capaian : 94,02/93 x 100% = 101,1%

Adapun hasil atau capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran secara spesifik dihitung dari target dan capaian kumulatif dengan memperhitungkan realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali realisasi indikator kegiatan dibagi dengan target indikator kegiatan. Target akhir periode (Desember) adalah target pada perjanjian kinerja, yakni 93. Jumlah kumulatif didasarkan pada monitoring OM-SPAN pada konten *monev* PA Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2022 data *monev* PA menunjukkan data capaian/realisasi kinerja anggaran sebagai berikut:

Sumber: OM-SPAN Kementerian Keuangan, Januari 2023

Gambar 3.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan capaian 94,02 dari yang ditargetkan sebesar 93 atau sama dengan capaian sebesar 101,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran BTKLPP Kelas I Makassar dilaksanakan secara optimal sehingga capaian melebihi dari target yang telah ditentukan dan ini menunjukkan manajemen pengelolaan anggaran BTKLPP Kelas I Makassar bekerja secara maksimal.

b. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2021 dengan Tahun 2020

Berdasarkan data tiga tahun terakhir ini, terdapat fluktuasi capaian. Capaian kinerja yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 93 dan realisasinya sebesar 94,02 dengan persentase capaian kinerja 101,1%. Untuk tahun 2020 dan 2021, target yang ditetapkan 80 dan realisasi yang dihasilkan sebesar 98 di tahun 2020 dan sebesar 86,77 di tahun 2021.

Adapun target dan capaian indikator nilai kinerja anggaran dilihat pada grafik berikut.

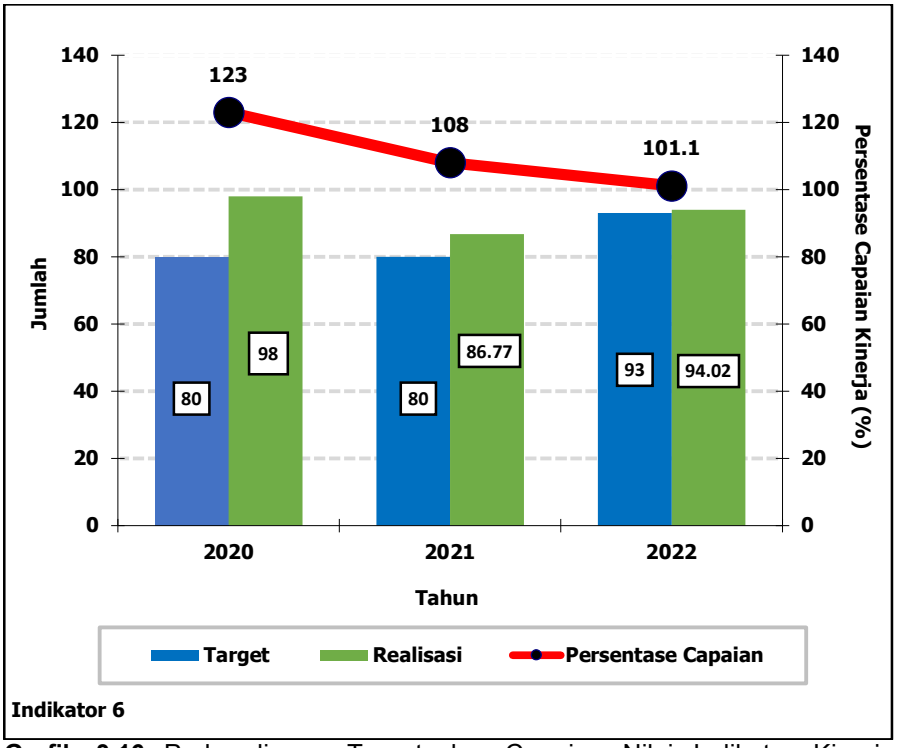

Grafik 3.16 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, 2021, dan 2022

Dari Grafik 3.16 menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2020 dan tahun 2022, maka persentase capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 101,1%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan lebih tinggi daripada target tahun sebelumnya. Apabila berdasarkan nilai yang dicapai, maka capaian tahun 2022 (94,02) lebih tinggi daripada capaian tahun 2021 (86,77), yang disebabkan oleh:

1. Diviasi Hal.III DIPA pada tahun 2022 sebesar 8,30 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,11;

2. Penyerapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 16,69 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,15;
3. Pengelolaan UP dan TUP pada tahun 2022 sebesar 9,72 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 8,00; dan
4. Capaian output pada tahun 2022 sebesar 25 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 12,68.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 438. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (98), tahun 2021 (86,77), tahun 2022 (94,02), dan untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka realisasi tercapai sebesar 63,65% (278,79/ 438 x 100% = 63,65%).

Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa realisasi kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dari tahun 2020 sampai 2022 mencapai 63,65 %. Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

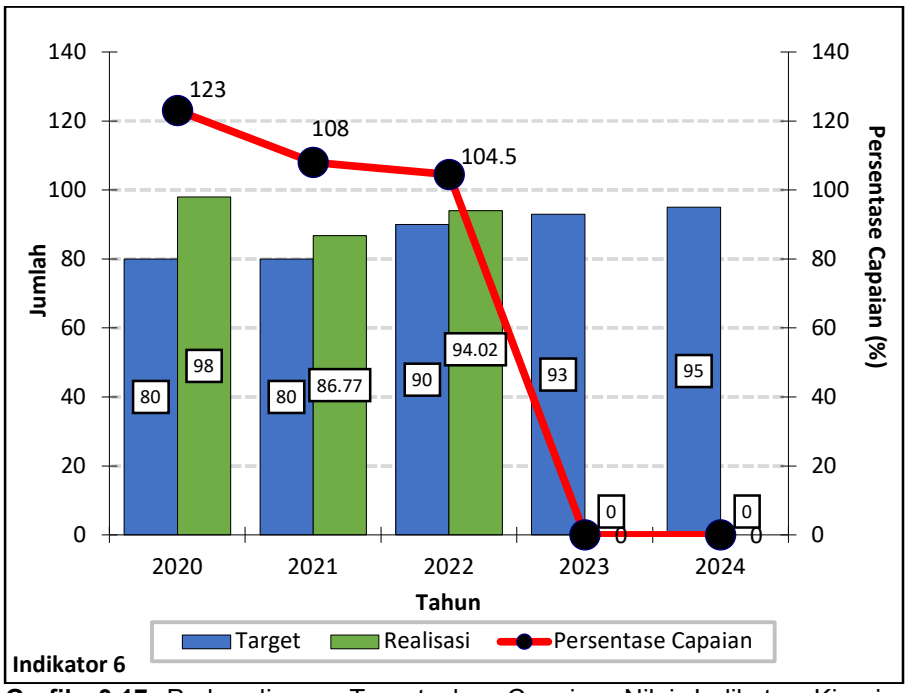

Grafik 3.17 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan **Grafik 3.17** dapat dikemukakan bahwa target yang telah ditentukan pada pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun ke depan belum tercapai karena pencapaian tahun 2020 - 2022 sebesar 63,65%, hal ini dikarenakan pelaksanaan rencana aksi kegiatan masih pada periode tahun ketiga (2020-2022), akan tetapi pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 94,02 melebihi target tahun 2022 yang telah ditentukan, yaitu sebesar 90.

d. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	93	94,02	101,1
BTKLPP Kelas I Palembang	93	90,86	97,7
BTKLPP Kelas I Batam	80	88,54	110,68
BTKLPP Kelas I Manado	87	89,14	102,46

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.14** dapat dikemukakan bahwa BTKLPP Kelas I Makassar telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 101,1%, demikian pula dengan BTKLPP Kelas I Batam dengan capaian kinerja 110,68%, serta BTKLPP Kelas I Manado dengan capaian kinerja 102,46%. Capaian kinerja BTKLPP Kelas I Batam dan BTKLPP Kelas I Manado lebih tinggi di bandingkan dengan BTKLPP Kelas I Makassar, disebabkan karena target yang ditentukan oleh BTKLPP Kelas I Makassar lebih tinggi daripada kedua satker setingkat tersebut.

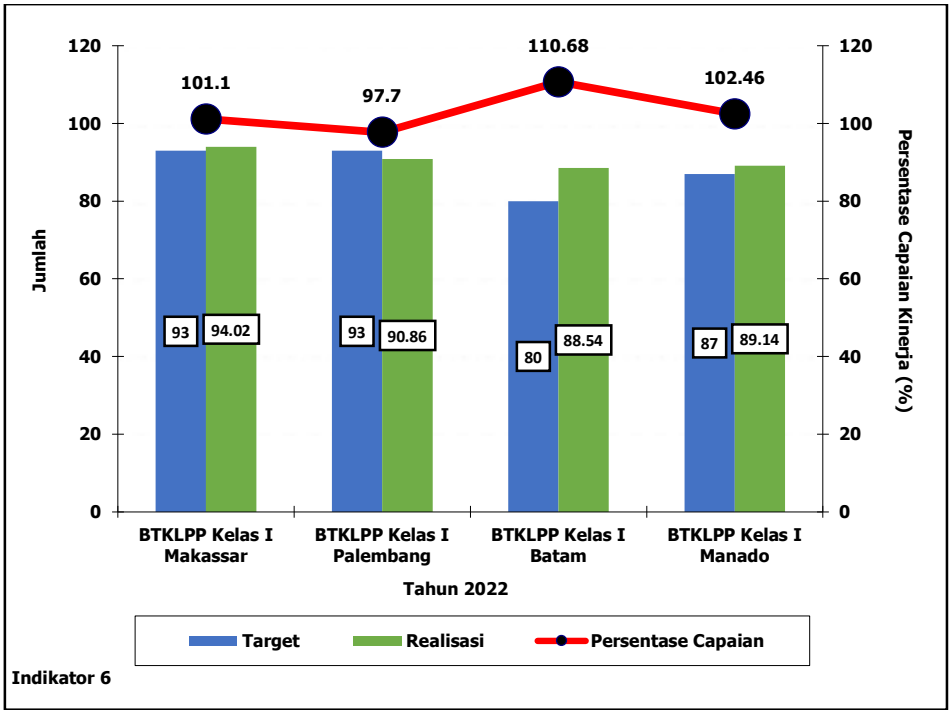

Grafik 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Berdasarkan **Grafik 3.18** dapat dikemukakan bahwa dari keempat satker setingkat, realisasi BTKLPP Kelas I Makassar lebih tinggi, yaitu sebesar 94,02. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran BTKLPP Kelas I Makassar mencapai 96,32% sehingga nilai IKPA yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan satker setingkat lainnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2022 didukung oleh hal-hal berikut:

a. Koordinasi dan komunikasi antar pegawai dijalankan melalui komunikasi yang efektif sehingga tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
b. Mekanisme perencanaan pelaksanaan kegiatan yang semakin baik;
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulan berjalan untuk memastikan pekerjaan dan tugas telah dilakukan dengan baik dan benar; dan
d. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap kegiatan.

Faktor pendukung yang dimaksud berasal dari pihak eksternal, meliputi:

1. Pemerintah

   Dalam rangka mendukung kelancaran pelakanaan kegiatan dan ketepatan penggunaan anggaran, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, seperti diterbitkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mendukung program pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Kementerian Keuangan

   Kementerian Keuangan juga senantiasa mengeluarkan kebijakan yang mendukung kelancaran dan optimalisasi penggunaan anggaran yang bertujuan mempercepat penyerapan anggaran sehingga belanja negara dapat digunakan secara efektif dan tepat guna. Untuk itu Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, dan Perencanaan Pelaksanaan Kegitan. Selain itu juga adanya kebijakan tentang langkah langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara.

Kendala/masalah yang dihadapi:

1. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berbasis *online* masih sering *maintenance*;
2. Akses Informasi melalui internet yang masih terbatas;
3. Pemahaman yang terbatas tentang unsur penilaian IKPA.

Pemecahan Masalah:

Adapun alternatif pemecahan masalah ditempuh melalui cara berikut:

a. Mengoptimalkan SDM yang tersedia;
b. Memanfaatkan perangkat lainnya/modem *mobile*, laptop atau desktop komputer;
c. Melakukan koordinasi internal; dan
d. Melakukan konsultasi kepada pihak eksternal terkait, seperti KPPN dan KPKNL.

f. Analisis Pemanfaatan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   Memberdayakan SDM yang dimiliki seoptimal mungkin dalam pengelolaan anggaran serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten. Contohnya adalah PNS yang tugas utamanya sebagai JP Perencana, diberdayakan untuk memantau indikator-indikator nilai IKPA bersama pengelola keuangan secara rutin, sehingga dapat melakukan upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam pencapaian nilai IKPA.

2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp 164.500.015,- atau 98,45% dari alokasi pagu Rp 167.084.000,-.

   Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

Tabel 3.15 Pagu Anggaran dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran	167.084.000,-	164.500.015,-	98,45

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.15** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran, serapan anggaran sebesar 98,45% dan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp167.084.000,- ; RAKi = Rp164.500.015,- ; CKi = 101,1% (1,011), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(167.084.000 \text{ x } 1{,}011) - 164.500.015}{(167.084.000 \text{ x } 1{,}011)} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{4.416.519}{168.916.534} \; x \; 100\%$$

$$= 2{,}61\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,61%.

3. *Material*s

   Penggunaan material dalam pencapaian keberhasilan indikator ini adalah perangkat alat teknologi informasi, sistem informasi yang akurat serta alat pengolah data yang canggih.

4. *Method*

   Metode dalam melaksanakan upaya memenuhi pencapaian nilai IKPA adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Indikator penilaian IKPA secara rutin di tiap bulannya. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, pagu minus); kepatuhan terhadap regulasi (data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPJ bendahara, dispensasi SPM); efektivitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D); efisiensi pelaksanaan kegiatan (renkas, kesalahan SPM).

5. *Machine*

   Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan perangkat jaringan teknologi informasi dan pengolahan data yang tersedia untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan pemantauan/ monitoring capaian realisasi.

g. Analisis Faktor Pendukung dan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka efektifitas penggunaan sumber daya untuk mencapai keberhasilan indikator ini, BTKLPP Kelas I Makassar menempuh upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pembagian tugas (*job description*) bagi setiap pegawai telah mengacu pada prinsip *the right man on the right place* sehingga setiap pegawai dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya secara optimal sehingga hasil pekerjaanya semakin baik dan berkualitas.
b. Optimalisasi penggunaan anggaran/ dana dilakukan secara efektif dan efisien sehingga target kinerja dapat dicapai secara maksimal.

Indikator 7. Kinerja Implementasi Satker WBK

Pengertian

Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah bentuk implementasi dari predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik.

Definisi Operasional

Perolehan Nilai Implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*Self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P (*Pre-Assesment*).

Cara Penghitungan

Nilai implementasi Satker WBK dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

Capaian Indikator

a. **Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target : 75

Realisasi : 86,15

% Capaian : 86,15/75 x 100% = 114,9%

Adapun hasil yang dicapai berupa dokumen yang dihasilkan dari semua kelompok kerja (pokja) berdasarkan surat keputusan kepala BTKLPP Kelas I Makassar. Nilai Kinerja Implementasi Satker WBK Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan memenuhi semua unsur penilaian WBK, baik Unsur Penunjang ataupun Unsur Pengungkit sebagai berikut:

Tabel 3.16 Nilai Kinerja Implemantasi Satker WBK Tahun 2022

No	Keterangan		WBK Syarat Minimal	Capaian
	Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)		**75**	**86.15**
A	Komponen Pengungkit (60%)			
	1	Manajemen Perubahan	60%	84.75%
	2	Penataan Tatalaksana	60%	88.69%
	3	Penataan Sistem Manjemen SDM	60%	91.23%

No	Keterangan		WBK Syarat Minimal	Capaian
	4	Penguatan Akuntabilitas	60%	81.37%
	5	Penguatan Pengawasan	60%	79.77%
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60%	95.04%
B	Komponen Hasil (40%)			
	1	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	18.25	19.62
	2	Survei Persepsi Anti korupsi	15.75	17.12
	3	Kinerja Lebih Baik	2.50	2.50
	4	Survey Pelayanan Publik yang prima	14.00	14.81
C	Lain-Lain			
LHKPN			100 %	100 %
LHKASN			100 %	100 %
Presentasi TLHP			100 %	96.00 %
Predikat SAKIP			B	B
Jumlah Responden			30	33

Sumber: Hasil Assessment TPI Tahun 2022

Dari **Tabel 3.16** di atas dapat diketahui bahwa nilai total (pengungkit dan hasil) sudah memenuhi syarat penilaian dimana total nilai pengungkit dan hasil yaitu 86,15 dari nilai 75 yang disyaratkan. Bobot nilai per indikator pengungkit berkisar antara 79,77% - 95,04% dan komponen hasil 2,50- 19,62.

b. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja yang ditargetkan pada tahun 2022 mencapai nilai 86,15 dengan komponen pengungkit untuk masing-masing pokja minimal 60. Trend capaian dalam meraih Predikat WBK/WBBM selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat dilihat pada grafik capaian sebagai berikut:

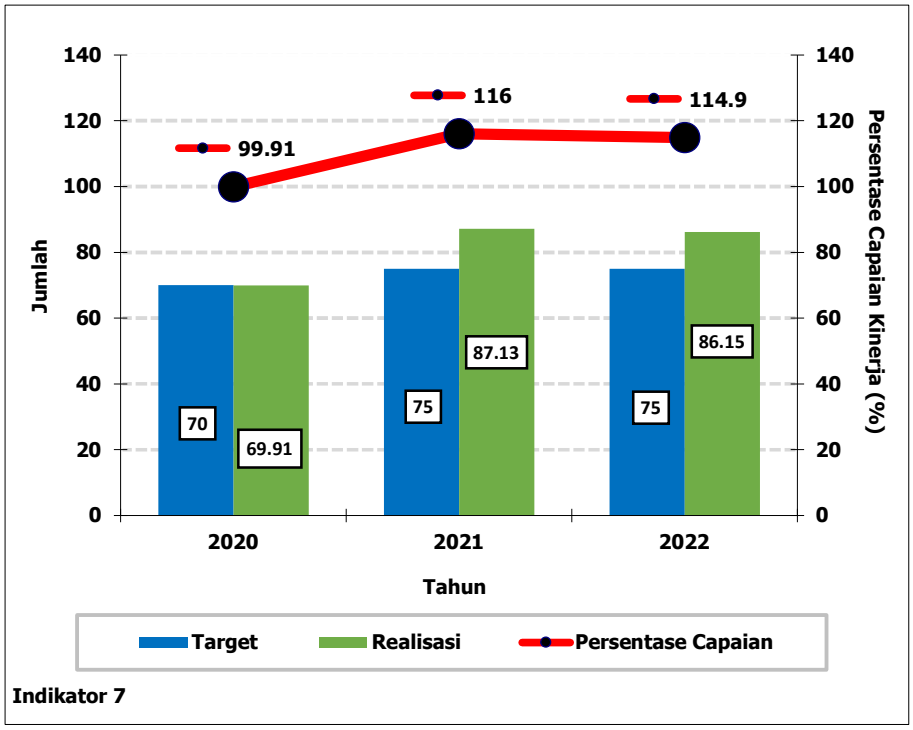

Grafik 3.19 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Implementasi Satker WBK Tahun 2020, 2021, dan 2022

Dari **Grafik 3.19** dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2022 BTKLPP Kelas I Makassar berhasil mencapai target dengan nilai 86,15. Apabila dibandingkan tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan pada tahun 2022 telah dilaksanakan *Self Assessment* oleh penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian RI, sedangkan tahun 2021 merupakan hasil penilaian *Self Assessment* mandiri. Perbedaan penilaian ini disebabkan oleh perbedaan persepsi penilaian antara Tim Penilai Internal (TPI) dengan Tim Penilai Mandiri.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan melihat realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dimana untuk mencapai Predikat WBK minimal meraih nilai 75, sedangkan untuk WBBM dari Kementerian PAN/RB memperoleh nilai 80.

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

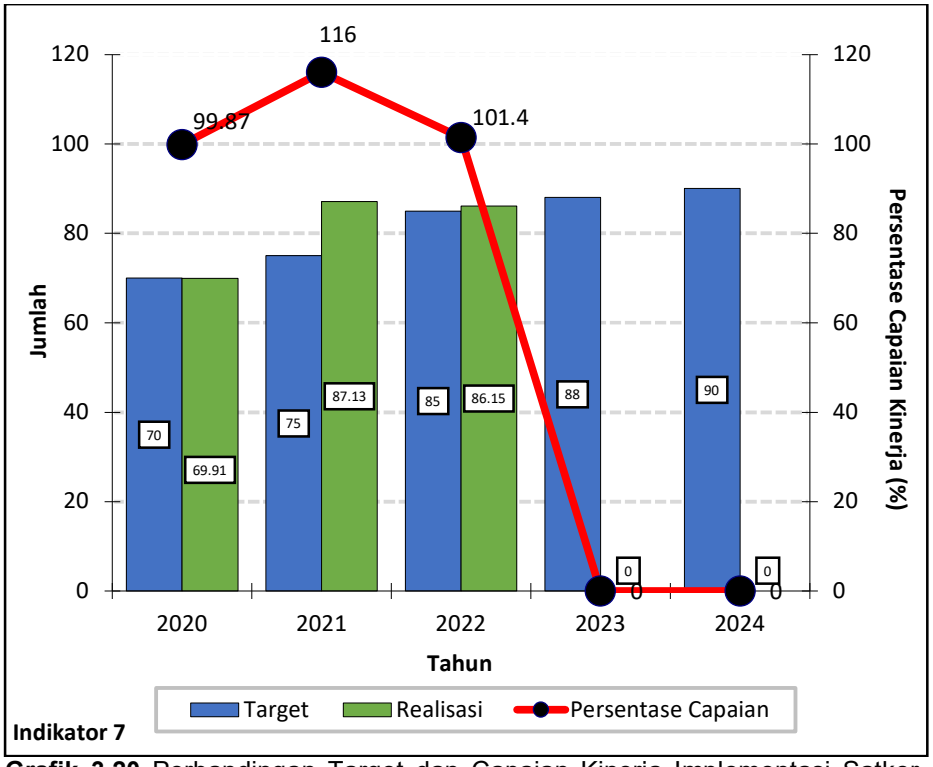

Grafik 3.20 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Implementasi Satker WBK Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan **Grafik 3.20** dapat dikemukakan bahwa pada periode tahun 2022 kegiatan belum memperlihatkan trend yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun kedepan, akan tetapi capaian kinerja di tahun ini menunjukkan nilai kinerja melebihi target yang ditetapkan, yakni 86,15. Diharapkan trend positif ini terus dapat ditingkatkan hingga tahun 2024.

d. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator Kinerja Implementasi Satker WBK dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Perbandingan Indikator Kinerja Implementasi Satker WBK antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Kinerja Implementasi Satker WBK		
	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	75	86,15	114,9
BTKLPP Kelas I Palembang	75	87,08	116,11
BTKLPP Kelas I Batam	75	79,75	106,33
BTKLPP Kelas I Manado	75	76,65	102,2

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.17** dapat dikemukakan bahwa keempat satker setingkat menetapkan target yang sama dan semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keempat satker setingkat ini dapat memaksimalkan capaian kinerjanya.

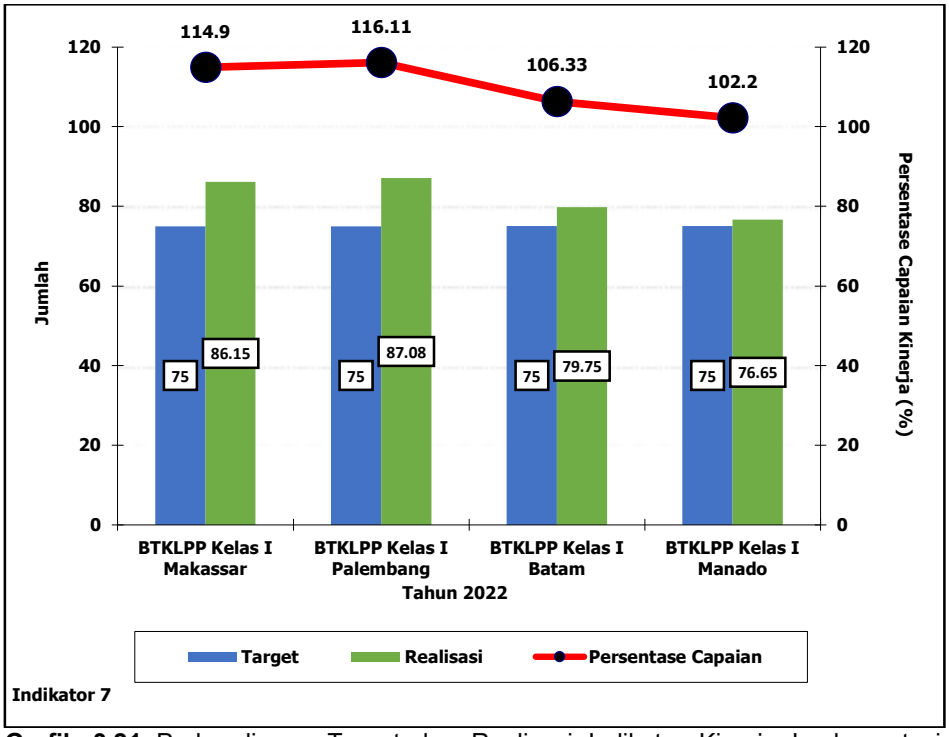

Grafik 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi Satker WBK antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Dari **Grafik 3.21** diatas diperoleh informasi bahwa BTKLPP Kelas I Makassar memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan dengan BTKLPP Kelas I Batam dan BTKLPP Kelas I Manado. Sedangkan capaian BTKLPP Kelas I Palembang

sedikit diatas capaian BTKLPP Kelas I Makassar, namun perbedaan tersebut tidak cukup signifikan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dari BTKLPP Kelas I Makassar telah mampu dalam meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama penguatan komunikasi dengan *stakeholder,* khusunya di wilayah layanannya. Hal ini juga didukung peningkatan upayanya dalam peningkatan pembenahan dan perbaikan administrasi dalam rangka meraih predikat WBK dan WBBM.

f. Analisis Peningkatan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Kendala/ Masalah Yang Dihadapi

(1) Faktor Internal:

1. Kurangnya kedisiplinan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan setiap pokja.
2. Kurangnya konsistensi dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di setiap pokja.

(2) Faktor Eksternal:

1. Pemahaman yang berbeda pada definisi operasional pencapaian unsur WBK dari tiap pendamping;
2. Penyesuaian kondisi pasca pandemi COVID-19.

Pemecahan Masalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Meningkatan kegiatan internalisasi, sosialisasi dan refreshing terkait unsur-unsur Pembangunan Zona Integritas; dan
3. Meningkatkan intensitas review kinerja Tim Pembangunan Zona Integritas dan melakukan perubahan SK bila diperlukan.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   BTKLPP Kelas I Makassar telah memberdayakan SDM yang tersedia secara optimal dalam upaya peningkatan pembangunan ZI menuju WBK / WBBM, serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada. Pemberdayaan SDM dilakukan melalui pembentukan Tim ZI yang akan menjadi pelopor dalam langkah-langkah nyata meraih WBK yang dipilih dari SDM ASN dan memberikan keterwakilan dari semua lini. Anggota pokja diberikan pelatihan

sesuai dengan penugasannya, seperti Pokja IV yang bekerja dalam pengawalan akuntabilitas diberikan keahlian khusus melalui pelatihan SAKIP, dan pemanfaatan sebagian besar tim Pokja V untuk duduk sebagai tim WBS, Dumas, UPG.

2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran juga dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp 19.690.149.841,- atau 95,53% dari alokasi pagu Rp 20.611.169.000,-.

Tabel 3.18 Pagu Anggaran dan Realisasi Kinerja Implementasi Satker WBK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Kinerja Implementasi Satker WBK	20.611.169.000,-	19.690.149.841,-	95,53

Sumber: Sub. Bag. Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.18** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator Kinerja Implementasi Satker WBK serapan anggaran sebesar 95,53% dan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp20.611.169.000,-; RAKi = Rp19.690.149.841,-; CKi = 114,9% (1,149), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(20.611.169.000 \text{ x } 1{,}149) - 19.690.149.841}{(20.611.169.000 \text{ x } 1{,}149)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{3.985.212.950}{23.675.362.791}\ x\ 100\%$$

$$= 16{,}83\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 16,83%.

3. *Material*s

   Efisiensi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal selain itu juga ditempuh upaya penerapan *paperless* dengan cara meminimalisir penggandaan *hardcopy* Laporan Keuangan, baik untuk keperluan dokumentasi maupun *review*.

4. *Method*

   Dalam proses penyesuaian dampak pasca pandemi COVID-19, dilakukan redesain/ penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya adalah penilaian WBK oleh tim internal dan eksternal yang semula dilakukan dengan tatap muka, dialihkan secara virtual/online menggunakan platform *Zoom Meeting*.

5. *Machine*

   Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini, tanpa perlu pengadaan khusus untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ZI menuju WBK.

h. Analisis Faktor Pendukung dan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Analisis Penyebab Keberhasilan:

1. Peningkatan kegiatan internalisasi, sosialisasi dan *refreshing* terkait unsur-unsur Pembangunan Zona Integritas; dan
2. Pasca Pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya intensitas dan kualitas komunikasi internal.

Indikator 8. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Pengertian

Peningkatan kapasitas ASN adalah proses dimana setiap ASN mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk untuk melaksanakan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan sesuai tupoksi organisasi.

Defenisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

Cara Perhitungan

Persentase dari Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL selama 1 (satu) tahun (A) dibagi dengan Jumlah ASN pada Satuan Kerja selama 1 (satu) tahun (B).

(A/B) * 100%

Capaian Indikator

a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Target : 80%

Realiasi : (68/68)*100% = 100%

% Capaian : 100/80 =125%

Adapun jenis peningkatan kapasitas yang diikuti oleh Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar sebagai pengungkit utama adalah:

1) *Workshop online systematic review* dan meta analisis;
2) *In house training* Tata Naskah Dinas manajemen kearsipan;
3) Literasi Digital Kemenkes RI;
4) Webinar implementasi dan internalisasi *core values* Berakhlak dan *Employer Branding* “Bangga melayani bangsa di lingkungan Kemenkes”;
5) Webinar peningkatan kontribusi ATLM di bidang molekuler;
6) Pelatihan protokol lab kredit;
7) *In house training* analisis data (*kobocollect* dan analisis risiko);
8) *Workshop* manajemen spesimen COVID-19 dan penyakit menular lainnya;
9) Webinar Indonesia bebas *dengue*;
10) Manajemen Terapan (AMTC) berbasis Epidemologi dalam mendukung transformasi kesehatan;
11) Penguatan kolaborasi *One Health* Bebas Rabies;
12) Webinar tantangan, peluang dan riset dalam pengendalian penyakit tropis terabaikan;
13) Webinar Survei Penilaian Integritas cermina implementasi budaya anti korupsi;
14) Webinar deteksi penyakit yang berpotensi KLB termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;
15) Pemanfaatan *wolbacia* dalam strategi pengendalian penyakit Demam berdarah *Dengue*;
16) Webinar penyakit gagal Ginjal anak, Apa yang perlu diwaspadai;
17) Webinar akses pengobatan hepatitis;
18) Webinar *Embody Healthy societies through youth creativity in creating appropriate technology for environment health*;

19) Reformulasi IKPA;
20) Sosialisasi Surveilans *Plasmodium knowlesi*;
21) Webinar *World Rabies Day*;
22) Webinar *Aedes aegypti* dan *albopictus*;
23) Pelatihan Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017;
24) Webinar Pelatihan identifikasi semut, Semut dalam kehidupan manusia dan perannya bagi lingkungan dan pertanian;
25) *Basic Training* Malaria untuk Daerah Endemis Sedang dan Endemis Tinggi;
26) *Laboratory Handing for Public Health pecimens*:
27) Webinar Penyakit Tropis Terabaikan, " Situasi Terkini Filariasis, Kecacingan dan *Schistosomiasis* di Indonesia";
28) *In House Training* Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko;
29) *In House Training* Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah;
30) Peningkatan Kapasitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

1 orang ASN yang mengambil tugas belajar pada tahun 2022 menjadi salah satu pengungkit capaian juga, di samping beberapa kegiatan lain yang diikuti baik secara mandiri ataupun berdasarkan undangan.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian persentase peningkatan SDM sebanyak 20 JPL pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 100% dengan target yang sama (80%) sehingga persentase capaian sebesar 125%. Sedangkan pada tahun 2020, capaian persentasenya sebesar 70,49 % dengan target 45%, sehingga persentase capaian sebesar 156%.

Apabila kita hendak membandingkan persentase jumlah peningkatan SDM sebanyak 20 JPL dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

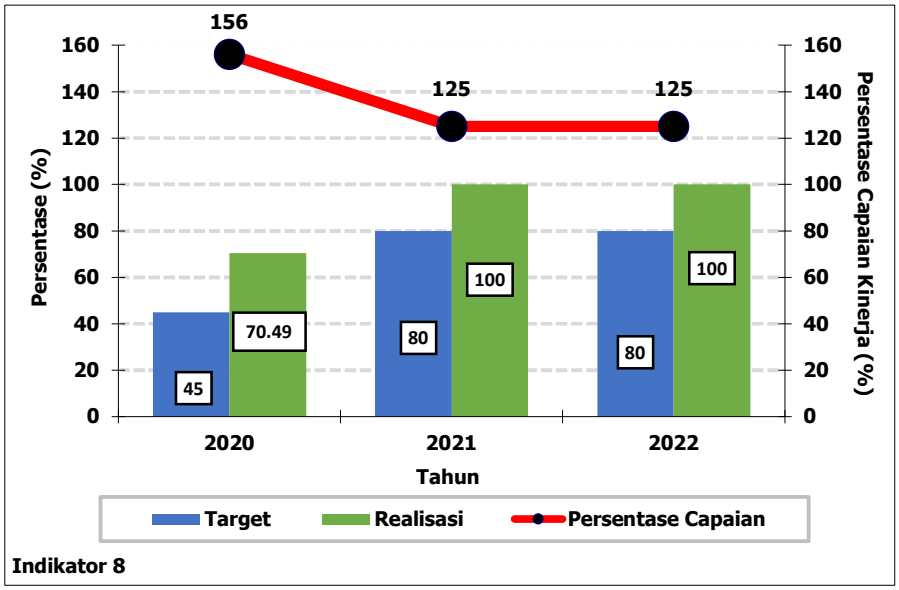

Grafik 3.22 Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan **Grafik 3.22** dapat dikemukakan bahwa capaian peningkatan kapasitas ASN selama tiga tahun terakhir (2020, 2021, dan 2022) mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun perbedaan capaian di tahun 2020 disebabkan oleh jumlah target yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Capaian ini diharapkan mampu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya, sehingga kompetensi sumber daya manusia dapat mendukung peningkatan kinerja dan tuntutan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

c. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian target jangka menengah ditentukan dengan menjumlahkan target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 365%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 merupakan jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan masing-masing pada tahun 2020 (70,49%), tahun 2021 (100%), tahun 2022 (100%), dan untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terdapat realisasi. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif jangka menengah, maka realisasi tercapai sebesar 74,1% (270,49%/365%x100% = 74,1%). Berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan bahwa realisasi kinerja BTKLPP Kelas I Makassar baru mencapai 74,1%.

Adapun target dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

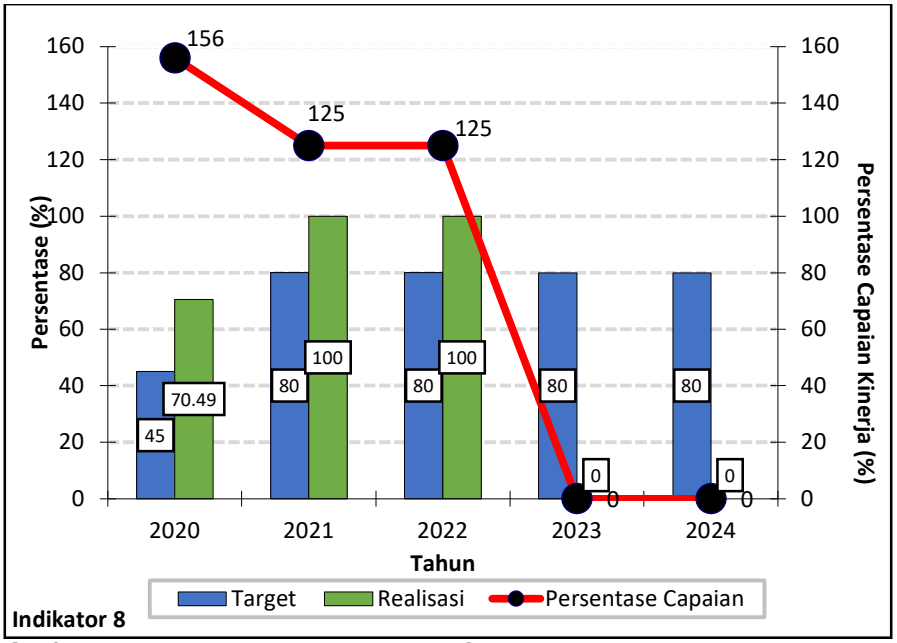

Grafik 3.23 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024; Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Berdasarkan **Grafik 3.23** dapat dikemukakan bahwa target yang telah ditentukan pada pelaksanaan rencana aksi kegiatan untuk 5 tahun ke depan belum tercapai karena pencapaian tahun 2020 – 2022 sebesar 74,1 %, hal ini dikarenakan pelaksanaan rencana aksi kegiatan masih pada periode tahun ketiga (2020-2022).

d. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja (Satker) Setingkat

Analisis perbandingan capaian kinerja pada indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator antar satker setingkat dalam hal ini BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado. Adapun capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Perbandingan Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Satker setingkat	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL		
	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)
BTKLPP Kelas I Makassar	80	100	125
BTKLPP Kelas I Palembang	80	95	119,3
BTKLPP Kelas I Batam	80	96,23	120,29
BTKLPP Kelas I Manado	80	83	103,76

Sumber: Data Primer, Makassar 2022; Data Sekunder, Palembang, Batam, Manado 2022

Berdasarkan **Tabel 3.19** dapat dikemukakan bahwa keempat satker setingkat menetapkan target yang sama, yaitu 80%. Keempat satker setingkat ini berhasil mencapai target, bahkan melebihi target yang ditentukan, dengan realisasi tertinggi dicapai oleh BTKLPP Kelas I Makassar sebesar 100%.

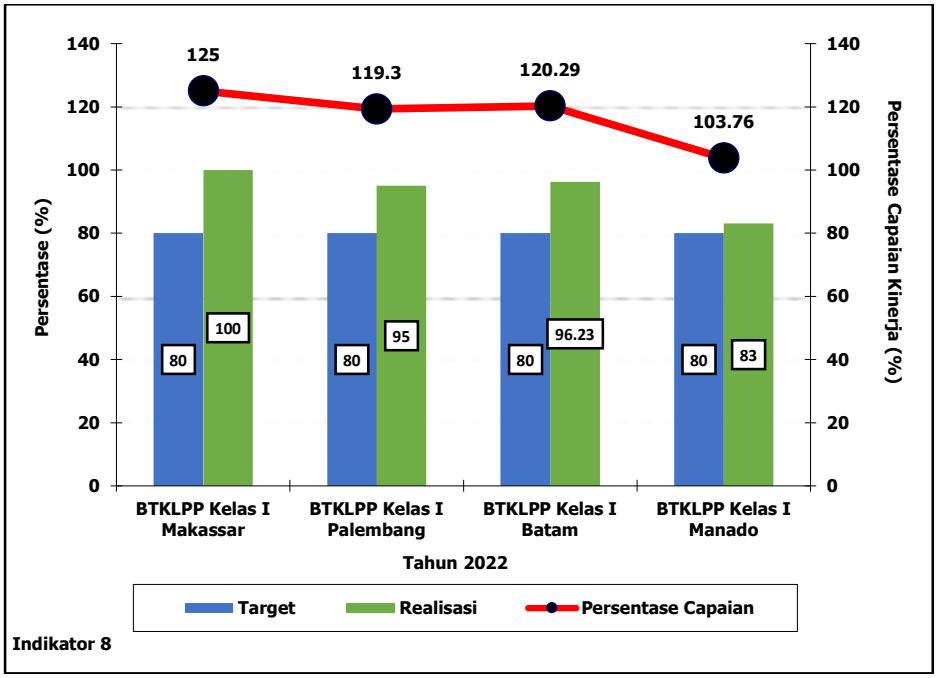

Grafik 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL antara BTKLPP Kelas I Makassar dengan BTKLPP Kelas I Palembang, BTKLPP Kelas I Batam, dan BTKLPP Kelas I Manado

Berdasarkan **Grafik 3.24** dapat dikemukakan bahwa BTKLPP Kelas I Makassar telah mampu memenuhi target dengan persentase capaian sebesar 125% dibandingkan dengan BTKLPP Kelas I Palembang dengan persentase capaian sebesar 119,3%, BTKLPP Kelas I Batam dengan persentase capaian sebesar 120,29 %, dan BTKLPP Kelas I Manado dengan persentase capaian sebesar 103,76%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BTKLPP Kelas I Makassar mampu memaksimalkan potensi capaian pembelajaran untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusianya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan:

1. Adanya beberapa pelatihan yang dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan, baik dari P2P ataupun PPSDM yang diikuti oleh ASN BTKLPP Kelas I Makassar;

2. Terdapat beberapa pelatihan yang biaya penyelenggaraannya dibawah anggaran yang telah direncanakan. Kelebihan dari anggaran tersebut kemudian digunakan untuk menambah kegiatan diklat yang lain (menambah peserta pelatihan); dan
3. Adanya pelatihan, *workshop* dan seminar menggunakan system non klasikal *(daring)*.

Kendala/Masalah yang Dihadapi:

1. Keterbatasan kemampuan teknologi informasi bagi sebagian kecil SDM;
2. Waktu pelaksanaan in house training sangat terbatas sehingga tidak mencapai output yang diharapkan;
3. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang bersamaan dengan jadwal kegiatan internal BTKLPP Kelas I Makassar; dan
4. Terkait peningkatan kapasitas manajemen, misalnya SPIP, SKI atau PIPK, harus menyesuaikan dengan jadwal narasumber.

Pemecahan Masalah:

1. Menyusun jadwal peningkatan kapasitas di awal tahun anggaran;
2. Mengupayakan penambahan waktu pelaksanaan *in house training*;
3. Menyediakan sarana dan prasarana bagi ASN ynag memiliki keterbatasan kemampuan dalam teknologi informasi;
4. Meningkatkan kualitas analisa kebutuhan pelatihan; dan
5. Meningkatkan jejaring, komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga penyelenggara pelatihan, baik pemerintah ataupun swasta.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Money, Material, Method,* dan *Machine*) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Man*

   BTKLPP Kelas I Makassar mengoptimalkan seluruh SDM untuk secara mandiri melakukan pemutakhiran pencatatan terhadap peningkatan kompetensi yang telah dilakukan menggunakan Laporan Kinerja BBTKLPP Kelas I Makassar 2022 melalui pembiayaan APBN maupun mandiri, atau atas penugasan instansi maupun inisiatif sendiri.

2. *Money*

   Efisiensi penggunaan dana/anggaran juga dapat dicapai secara maksimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja sebesar Rp21.052.000,- atau 85,79% dari alokasi pagu Rp24.540.000,-.

Tabel 3.20 Pagu Anggaran dan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL_sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Indikator Kinerja	Pagu/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	24.540.000,-	21.052.000,-	85,79

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari **Tabel 3.20** menunjukkan bahwa dalam pencapaian indikator Kinerja persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan serapan anggaran sebesar 85,79% dan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi\ x\ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka PAKi = Rp24.540.000,-; RAKi = Rp21.052.000,-; CKi = 125% (1,25), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(24.540.000 \text{ x } 1{,}25) - 21.052.000}{(24.540.000 \text{ x } 1{,}25)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{9.623.000}{30.675.000}\ x\ 100\%$$

$$= 31{,}37\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 31,37%.

3. *Material*s

Efisiensi dilakukan dengan penerapan *paperless*, antara lain untuk materi-materi dan sertifikat, sehingga ATK peserta dapat diminimalisir kebutuhannya.

4. *Method*

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan redesain/ penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya adalah diklat/seminar/*workshop*/sosialisasi/e-learning

diikuti secara *virtual/online* menggunakan platform *Zoom Meeting/Google Meeting*/webinar.

5. *Machine*

Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini. Selama masa pandemi tahun 2020-2022, pegawai mengikuti berbagai jenis peningkatan ASN secara mandiri karena sebagian besar diselenggarakan secara daring, sehingga dapat diikuti dari tempat kerja masing-masing.

h. Analisis Faktor Pendukung dan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator:

1. Adanya perencanaan kebutuhan pelatihan;
2. Optimalisasi penggunaan anggaran; dan
3. Meningkatkan jejaring, komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga penyelenggara pelatihan, baik pemerintah ataupun swasta.

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal BTKLPP Kelas I Makassar yang terbit pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.**24.531.157.000**,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pada tahun 2022 terdapat penambahan anggaran, sehingga setelah melalui proses revisi kewenangan DJA, maka pada tanggal 1 April 2022, pengesahan DIPA revisi ke-1 yang **semula** Rp. 24.531.157.000,- bertambah sehingga pagu alokasi anggaran **menjadi Rp. 29.078.247.000,-** (dua puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan sarana gedung seperti perangkat mekanikal elektrikal jaringan listrik, alat laboratorium lingkungan (alat pemeriksaan kualitas udara) serta bahan operasional lainnya.

Pada tahun anggaran berjalan, pengajuan Revisi DIPA ke-3, ke-4 dan ke-5 yang diajukan ke Kantor Wilayah Perbendaharaan (DJPBn) Prov Sulsel merupakan revisi halaman III DIPA (administratif) guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja.

Pada tanggal 16 Desember 2022, pengesahan revisi DIPA ke-6 dalam rangka Pemutakhiran Data dengan tidak mengubah alokasi pagu anggaran sebelumnya.

Dari penjabaran diatas, Anggaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 29.078.247.000,-.**

Tabel 3.21 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2022	29.078.247.000	28.007.561.642	96,32%	1.070.685.358

Sumber: OM-SPAN Kementerian Keuangan RI Tahun 2022

Berdasarkan **Tabel 3.21** di atas dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran di BTKLPP Kelas I Makassar pada tahun 2022 mencapai 96,32%.

Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
1.	Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan	3.518.146.200	3.487.081.283	99,12
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dimanfaatkan	183.092.000	180.300.995	98,48
3.	Persentase Respon Signal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam	499.636.000	491.419.047	98,36
4.	Teknologi Tepat Guna Yang Dihasilkan	81.971.800	79.440.470	96,91
5.	Nilai Kinerja Anggaran	3.992.608.000	3.963.190.516	99,26
6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	167.084.000	164.500.015	98,45
7.	Kinerja Implementasi Satker WBK	20.611.169.000	19.690.149.841	95,53
8.	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	24.540.000	21.052.000	85,79
	Jumlah	**29.078.247.000**	**28.077.134.167**	**96,56**

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran untuk indikator 1 sampai 7 tersebut di atas mencapai >90% dan indikator delapan (Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL) mencapai <90% .

Untuk dapat mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai kinerja tahun 2022 adalah **Rp.29.078.247.000,-** dengan realisasi penggunaan sebesar **Rp.28.007.561.642,-** atau 96,32% dari total anggaran yang tersedia.

Dengan formula tersebut: PAKi = **Rp.29.078.247.000,-** RAKi = **Rp.28.007.561.642,-** ; CKi = 115,2% (1,152), sehingga efisien dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(29.078.247.000 \text{x } 1{,}152) - 28.007.561.642}{(29.078.247.000 \text{ x } 1{,}152)} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{5.412.540.726}{33.489.674.839} \; x \; 100\%$$

$$= 16{,}16\%$$

Dengan capaian kinerja 115,2%, terdapat efisien penggunaan anggaran sebesar 16,16% dalam pencapaian kinerjanya.

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan per Kegiatan Tahun 2022

Anggaran tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam 3 jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Berikut ini disajikan realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2022.

Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	9.375.885.000	8.476.455.093	90.41%
2	Belanja Barang	12.602.362.000	12.490.037.303	99.11%
3	Belanja Modal	7.100.000.000	7.041.069.246	99.17%
	Jumlah	**29.078.247.000**	**28.007.561.642**	**96,32%**

Sumber: OM-SPAN Kementerian Keuangan RI Tahun 2022

Berdasarkan **Tabel 3.23** di atas dapat dikemukakan bahwa penyerapan anggaran di BTKLPP Kelas I Makassar tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa BTKLPP Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan memenuhi *output* yang ditargetkan baik kegiatan teknis, manajerial,

belanja barang ataupun belanja modal. Hal ini juga menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

3. **Anggaran dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Tahun 2022**

Realisasi anggaran per Rincian Output (RO) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2022

Kode	Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Capaian (%)
QAH.001	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit berpotensi wabah	499,636,000	491,419,047	98.36
QAH.003	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit tular vektor zoonotik	2,050,954,000	2,042,723,074	99.60
QAH.004	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular langsung	76,576,000	76,435,173	99.82
QAH.005	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit karena faktor lingkungan	1,310,188,000	1,297,363,811	99.02
QAH.006	Layanan deteksi dini dan respon penyakit pada situasi khusus	123,500,000	114,652,695	92.84
QAH.U01	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium	38,900,000	35,347,000	90.87
QJB.001	Kalibrasi alat laboratorium	278,068,000	275,944,395	99.24
QJC.001	Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan	1,030,138,000	1,014,673,161	98.50
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	2,458,691,000	2,452,350,850	99.74
RCB.001	Pemeliharaan alat kesehatan	225,711,000	220,222,110	97.57
AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	68,652,000	68,652,000	100
AEA.503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	68,652,000	67,121,020	97.77
AEA.505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	45,788,000	44,527,975	97.25
EBA.956	Layanan BMN	12,838,000	12,838,000	100
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	16,250,000	16,250,000	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34,128,000	33,089,140	96.96
EBA.962	Layanan Umum	72,068,000	69,335,650	96.21
EBA.994	Layanan Perkantoran	13,375,885,000	12,472,905,378	93.25
EBB.951	Layanan Sarana Internal	7,100,000,000	7,085,731,673	99.80

Kode	Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Capaian (%)
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	24,540,000	21,052,000	85.79
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	127,084,000	124,889,115	98.27
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	36,800,000	36,799,400	100
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3,200,000	2,811,500	87.86
	Jumlah	**29,078,247,000**	**28,077,134,167**	**96.56**

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Target realisasi anggaran adalah ≥90%, sehingga masing-masing rincian output diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian realisasi ini. Dari **Tabel 3.24** terlihat bahwa realisasi total anggaran telah mencapai target, yaitu 96,56%. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada rincian output AEA.501.Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program, EBA.956.Layanan BMN, EBA.958.Layanan Hubungan Masyarakat, dan EBD.955.Layanan Manajemen Keuangan dengan realisasi yang sama, yaitu masing-masing 100%. Realisasi anggaran terendah terdapat pada rincian output EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan (85,79%). Dari 23 rincian output, sebagian besar (21 RO) mencapai realisasi anggaran ≥90%, sementara 2 RO mencapai target <90%.

21 (dua puluh satu) RO yang mencapai target 90,87% s.d. 100% atau ≥90% adalah:

1. QAH.001. Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit berpotensi wabah
2. QAH.003. Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit tular vektor zoonotik
3. QAH.004. Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular langsung
4. QAH.005. Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit karena faktor lingkungan
5. QAH.006. Layanan deteksi dini dan respon penyakit pada situasi khusus
6. QAH.U01. Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium
7. QJB.001. Kalibrasi alat laboratorium
8. QJC.001. Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan
9. RAB.001. Pengadaan alat dan bahan laboratorium
10. RCB.001. Pemeliharaan alat kesehatan
11. AEA.501. Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program
12. AEA.503. Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran

13. AEA.505. Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum
14. EBA.956. Layanan BMN
15. EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat
16. EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
17. EBA.962. Layanan Umum
18. EBA.994. Layanan Perkantoran
19. EBB.951. Layanan Sarana Internal
20. EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
21. EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan

Selain mencapai realisasi anggaran sesuai/melebihi target, 21 rincian output di atas juga memenuhi Capaian Realisasi Output.

2 (dua) rincian output dengan capaian <90% adalah:

1. EBC.996. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

   Realisasi anggaran RO ini adalah 85,79% atau di bawah target. Dalam RO ini anggaran yang semula untuk kegiatan *Workshop Service Excellent* dan *Inhouse Training* Sistem Kepatuhan Internal (SKI) yang disediakan biaya honor narasumber tidak terealisasi dikarenakan adanya kebijakan tentang batasan pembayaran honor narasumber yang berasal dari kementerian yang sama.

   Besaran anggaran yang tidak terserap ini Rp3.488.000,- dari pagu sebesar Rp24.540.000,-.

2. EBD.974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

   Realisasi anggaran RO ini adalah 87,86% atau di bawah target. Adapun penyebabnya karena adanya kegiatan yang tidak perlu dilakukan secara luring. sehingga anggaran tidak terserap anggaran tidak terserap sebesar Rp388.500,- dari pagu sebesar Rp3.200.000,-.

4. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021 dan 2022

Adapun perbandingan realisasi anggaran tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021 dan 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentaase (%)	Anggaran Tidak Terealisasi (Rp)
2020	25.476.526.000	24.219.753.141	95,07%	1.256.772.859
2021	45.432.106.000	44.761.808.187	98,52%	670.297.813
2022	29.078.247.000	28.007.561.642	96,32%	1.070.685.358

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022

Berdasarkan **Tabel 3.25** diatas dapat dikemukakan bahwa trend realisasi anggaran BTKLPP Kelas I Makassar selama tiga tahun terakhir (2020 sampai 2022) mengalami *fluktuasi*. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam evaluasi perencanaan kinerja tahun berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari kedelapan indikator yang dilaksanakan, seluruhnya mencapai target, dengan uraian sebagai berikut:
   - Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan mencapai 57 rekomendasi dari target 46 rekomendasi atau sebesar **124%**;
   - Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan mencapai 87% dari target 75% atau sebesar **116%**;
   - Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam mencapai 100% dari target 95% atau sebesar **105,26%**;
   - Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan mencapai 4 jenis dari target 3 jenis atau sebesar **133%;**
   - Nilai kinerja anggaran mencapai 86,61 dari target 85 atau sebesar **101,9%;**
   - Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 94,02 dari target 93 atau sebesar **101,1%;**
   - Kinerja implementasi satker WBK mencapai 86,15 dari target 75 atau sebesar **114,9%**;
   - Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL mencapai 100% dari target 80% atau sebesar **125%.**
2. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 96,32% dari keseluruhan anggaran Rp. 29.078.247.000,-.

B. TINDAK LANJUT

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan pencapaian yang telah sesuai dengan target dan mempersiapkan untuk pencapaian target berikutnya;
2. Penyesuaian target indikator dengan alokasi anggaran berjalan;
3. Mereviu kembali atas Defenisi Operasional untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan;
4. Mereviu kembali Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024 dengan merujuk kepada Rencana Aksi Program sehingga benar-benar dapat memberikan gambaran kinerja yang dilaksanakan BTKLPP Kelas I Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, beserta revisinya;
Lampiran 2. Analisa SMART Indikator Kinerja;
Lampiran 3. Matriks RAK Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020 – 2024;
Lampiran 4. Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022;
Lampiran 5. Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022;
Lampiran 6. Capaian Kinerja, Realisasi Penggunaan Anggaran, dan Efisiensi Indikator Tahun 2022;
Lampiran 7. Rencana Kerja Tahun 2022, beserta revisinya;
Lampiran 8. Pernyataan Reviu atas Pelaporan Kinerja T.A 2022;
Lampiran 9. SK Tim Penyusun LAKIP dan SAKIP; dan
Lampiran 10. SOP Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, beserta revisinya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Sudirman, ST, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 24,531,157,000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS	**Maman Sudirman, ST, M.Kes**
NIP 196405201991031003	NIP 197001121994031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KELAS I MAKASSAR

NO	NAMA SASARAN	NO	NAMA INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46
		2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%
		3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95%
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Nilai Kinerja Anggaran	85
		6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		7	Kinerja Implementasi WBK Satker	75
		8	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	7,545,272,000,-
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	16.965.885.000,-
	TOTAL	**Rp.**	24,531,157,000,-

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar,

Maman Sudirman, ST, M.Kes
NIP 197001121994031004

Revisi I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Sudirman, ST, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 29,078,247,000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS	**Maman Sudirman, ST, M.Kes**
NIP 196405201991031003	NIP 197001121994031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR

NO	NAMA SASARAN	NO	NAMA INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46
		2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%
		3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95%
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Nilai Kinerja Anggaran	85
		6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		7	Kinerja Implementasi WBK Satker	75
		8	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	8,092,362,000,-
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	20.985.885.000,-
	TOTAL	**Rp.**	**29,078,247,000,-**

Jakarta, April 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar,

Maman Sudirman, ST, M.Kes
NIP 197001121994031004

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan (SMART)
Satuan Kerja: BTKLPP Kelas I Makassar
Tahun Anggaran Pelaksanaan 2022

Pada tahun anggaran 2022, Pimpinan BTKLPP Kelas I Makassar melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada bulan Desember 2021. Kedelapan Indikator tersebut diatas dapat diuraikan berdasarkan penilaian *Spesific*, *Measurable*, *Attainable*, *Relevan*, dan *Timebond* (SMART) sebagai berikut:

Indikator 1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan.

Definisi Operasional:

Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survey penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Jumlah pelaksanaan kegiatan surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium.
2) *Measurable*: Akumulasi jumlah hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit yang berbasis laboratorium, baik analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium bidang surveilans dalam satu tahun.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti sumber daya manusia, peralatan, dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor terkait.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan.

Definisi Operasional:

Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit,

kajian/ survey penyakit dan faktor risiko pemyakit, pengembangan pengujian dan kendali muutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam 3 tahun terakhir.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan dari kegiatan surveilans faktor risiko.
2) *Measurable*: Akumulasi persentase rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit yang berbasis laboratorium, baik analisis dampak kesehatan lingkungan, surveilans epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium bidang surveilans dalam satu tahun.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti Sumber Daya Manusia, peralatan, dukungan anggaran, dan kerjasama lintas sektor/program terkait.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 3. Persentase Respon Signal KLB/Bencana kurang dari 24 Jam.

Definisi Operasional:

Respon signal Sistem Kewaspadaan Dini (SKD), Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya kurang dari 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respon berupa komunikasi, rencana Penyelidikan Epidemiologi/Investigasi, Laporan Penerimaan Spesimen.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Salah satu tugas dan fungsi B/BTKLPP adalah Pelaksanaan Penilaian dan Respon Cepat, Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah dan Bencana.
2) *Measurable*: Jumlah signal SKD, KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dibagi dengan jumlah seluruh laporan signal yang diterima dari stakeholder dikali 100%.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti Sumber Daya Manusia, peralatan, dukungan anggaran, dan kerjasama lintas sektor/program terkait.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 4. Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun.

Definisi Operasional: Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Salah satu tugas dan fungsi B/BTKLPP adalah Pelaksanaan Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna.
2) *Measurable*: Akumulasi Jumlah teknologi tepat guna (*prototype*) yang dihasilkan dan disosialisasikan selama satu tahun.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti Sumber Daya Manusia, peralatan, dukungan anggaran dan Kerjasama lintas sektor/program terkait.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 5. Nilai Kinerja Anggaran.

Definisi Operasional:

Capaian Keluaran kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Capaian realisasi satuan kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas.
2) *Measurable*: Akumulasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja seperti Sumber Daya Manusia, peralatan dan dukungan anggaran.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Definisi Operasional:

Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap Regulasi.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Capaian realisasi indikator kinerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja.
2) *Measurable*: Akumulasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti Sumber Daya Manusia, peralatan dan dukungan anggaran.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 7. Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Satuan Kerja.

Definisi Operasional:

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja melalui penilaian mandiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Capaian nilai perolehan *assessment*.
2) *Measurable*: Jumlah laporan bulanan kegiatan Tim WBK dalam mendukung penerapan WBK dalam kurun waktu satu tahun.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti Sumber Daya Manusia, peralatan dan dukungan anggaran.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Indikator 8. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

Definisi Operasional:

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

Analisis SMART.

1) *Spesific*: Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan minimal 20 jam dalam 1 tahun.
2) *Measurable*: Jumlah peningkatan kapasitas yang diikuti ASN minimal 20 JPL yang dihitung berdasarkan sertifikat/surat keterangan yang diperoleh.
3) *Attainable*: Indikator ini dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki satuan kerja, seperti Sumber Daya Manusia, peralatan, dukungan anggaran dan Kerjasama lintas sektor/program terkait.
4) *Relevan*: Target indikator dapat dibandingkan antara target dengan realisasi kegiatan yang dicapai.
5) *Timebond*: Indikator ini dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Analisa indikator kegiatan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Satuan Kerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2022. Diharapkan melalui penyusunan dokumen ini, dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan komitmen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan data dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Makassar, Januari 2022
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Maman Sudirman, ST., M.Kes
NIP 197001121995031004

Lampiran 3. Matriks RAK Revisi-2 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022-2024

MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan	Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP.	Jumlah surveilans, kajian, rekomendasi survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP selama 1 (satu) tahun.	1. Laporan Pelaksanaan Surveilans Epid 2. Laporan Pelaksanaan Kajian 3. Laporan Pelaksanaan Survei 4. Laporan Pelaksanaan Pengujian 5. Laporan Pelaksanaan Kendali Mutu Laboratorium	21	40	50	60	65
2	Persentase Rekomendasi Hasil Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dimanfaatkan	Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam periode 3 tahun terakhir.	(A/B)*100% A= Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang dilaksanakan/ ditindaklajuti oleh B/BTKLPP dan atau stakeholder terkait sampai dengan 3 tahun sejak rekomendasi dikeluarkan. B= Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang disampaikan kepada stakeholder terkait selama 3 (tiga) tahun terakhir.	1. Paparan Dinkes Kab/Kota, Provinsi, Tim Kerja, Direktur, Sesditjen, Dirjen, Ka. B/BTKLPP, Litbang, LS,LP, dll terkait 2. Sambutan/ Pidato/ Wawancara/ *Pers Release* 3. Jukren/ Juknis yang mengutip rekomendasi kita 4. Kegiatan dalam RKAKL/ RKA 5. RAP/ RAK 6. Laporan/ Foto yang menunjukkan rekomendasi kita ditindaklanjuti 7. Surat Pernyataan/ Apresiasi Pemanfaatan Rekomendasi Stakeholder/ LPLS	25%	50%	90%	95%	100%
3	Persentase Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	Respon sinyal Kewaspadaan dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya <24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, laporan penerimaan spesimen.	(A/B)*100% A= Jumlah sinyal SKD KLB/Bencana yang direspon oleh B/BTKLPP < 24 jam dalam 1 (satu) tahun. B= Jumlah sinyal SKD KLB/Bencana yang diterima oleh B/BTKLPP dalam 1 (satu) tahun.	1. Lap/catatan respon KLB/Bencana 2. Laporan PE KLB/Bencana 3. Hasil pemeriksaan spesimen KLB/Bencana	100%	95%	95%	96%	97%
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu 1 (satu) tahun.	Akumulasi jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun.	1. Laporan TTG baru 2. Laporan sosialisasi TTG	3	3	3	4	5

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA				
					2020	2021	2022	2023	2024
5	Nilai Kinerja Anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.	diambil dari dashboard E-Monev DJA Kemenkeu $\frac{Realisasi\ volume\ kegiatan}{target\ volume\ kegiatan} \times \frac{Realisasi\ indikator\ kegiatan}{target\ indikator\ kegiatan}$	E-Monev DJA (*dashboard*)	80	83	90	93	95
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	diambil dari aplikasi OM-SPAN Kemenkeu 1. Penyerapan Anggaran dengan bobot penilaian 15%; 2. Data Kontrak dengan bobot penilaian 15%; 3. Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 12%; 4. Konfirmasi Capaian Output, bobot penilaian 10%; 5. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 8%; 6. Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5%; 7. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5%; 8. LPJ Bendahara dengan bobot penilaian 5%; 9. Renkas dengan bobot penilaian 5%; 10. Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5%; 11. Retur SP2D dengan bobot penilaian 5%; 12. Pagu Minus dengan bobot penilaian 5%; 13. Dispensasi dengan bobot 5%.	OM SPAN (monev PA) Kemenkeu	80	80	90	93	95
7	Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan Nilai Implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*Self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P (*Pre-Assesment*).	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.	1. *Assessment* Unit Utama 2. *Assessment* TPI	70	75	85	88	90
8	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.	(A/B)*100% A= Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL selama 1 (satu) tahun. B= Jumlah ASN pada satuan kerja selama 1 (satu) tahun.	1. Instrumen Perhitungan 2. Laporan peningkatan kapasitas ASN	45%	80%	80%	80%	80%

Lampiran 4. Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022

Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	Rekomendasi	46	57	124
2	Persentase Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Persen	75	87	116
3	Persentase Respon Sinyal KLB/ Bencana kurang dari 24 jam	Persen	95	100	105.26
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Jenis	3	4	133
5	Nilai Kinerja Anggaran		85	86.61	101.9
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	94.02	101.1
7	Kinerja Implementasi WBK Satker		75	86.15	114.9
8	Persentase Peningakatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persen	80	100	125
Nilai Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Satker			**115.2**		

Makassar, Januari 2023
Kasubbag Administrasi Umum
BTKLPP Kelas I Makassar

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP 197908122008011023

Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tahun 2020 s/d 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	Rekomendasi	21	30	143	40	42	105	46	57	124
2	Persentase Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Persen	25	80	320	50	67	133	75	87	116
3	Persentase Respon Sinyal KLB/ Bencana kurang dari 24 jam	Persen	90	100	111	95	100	105.26	95	100	105.26
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Jenis	3	3	100	3	3	100	3	4	133
5	Nilai Kinerja Anggaran		80	93	116	83	88.44	106.5	85	86.61	101.9
6	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Persen	80	98	123						
6*	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran					80	86.77	108	93	94.02	101.1
7	Kinerja Implementasi WBK Satker		70	69.94	99.91	75	87.13	116.17	75	86.15	114.9
8	Persentase Peningakatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persen	45	(43/61)*100	70.49	80	100	125	80	100	125
Nilai Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Satker			**135.4**			**112.4**			**115.2**		

Keterangan:
* = Terjadi perubahan indikator kinerja pada indikator 6 di tahun 2021

Makassar, Januari 2023
Kasubbag Administrasi Umum
BTKLPP Kelas I Makassar

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP. 197908122008011023

Lampiran 5. Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR
BTKLPP KELAS I MAKASSAR
TAHUN PELAKSANAAN 2022

Indikator 1.
Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

DO : Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survey penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP.

Target : 46 SE = 18
Realisasi : 57 ADKL = 32
% Capaian : 124% PTL = 7

1. Pemetaan Reseptivitas Malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemetaan Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Survei Evaluasi Dampak POPM Filariasis Alternatif di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
8. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Survei EvaluasiPrevalensi Kecacingan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Surveilans Sentinel Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Surveilans Zoonosis (Brucellosis) di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Surveilans Pemantauan Indeks Morfologi dan Indeks Bakteriologi Kusta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Surveilans Penemuan Kasus TB baru dan Pemantauan Pengobatan di Tempat Khusus Provinsi Sulawesi Barat;
19. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
22. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Majene Prov. Sul-Bar;
25. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Pinrang Prov. Sul-Sel;
26. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Pangkep Prov. Sul-Sel;
27. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Wakatobi Prov. Sul-Tra;
28. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Buton Prov. Sul-Tra;
29. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Banggai Prov. Sul-Teng;
30. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Morowali Utara Prov. Sul-Teng;
31. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Tanah dan Bahan Pangan) di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Konawe Utara Prov. Sul-Tra;
35. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Toli-Toli Prov. Sul-Teng;
36. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Buol Prov. Sul-Teng;
37. Surveilans Faktor Risiko Legionellosis di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
38. Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I (Erapo) di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
39. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan;
40. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;

41. Surveilans pada Situasi Khusus (Nataru) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
42. Surveilans pada Situasi Khusus (Porprov) di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
43. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan di Wilayah Layanan (Provinsi Sulawesi Tenggara) dalam rangka Hari Nusantara;
44. Surveilans FR KesLing dlm rangka pelaksanaan PE Kasus Leptospirosis di Kota Kendari Prov. Sul-Tra;
45. Gambaran Kualitas Air Badan Air Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
46. Gambaran Kualitas Air Bersih Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
47. Gambaran Kualitas Air Limbah Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
48. Gambaran Kualitas Air Minum Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
49. Gambaran Kualitas Makanan dan Swab (Peralatan Makan, Rectal dan Tangan) Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
50. Gambaran Kualitas Udara Ambien Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
51. Survei Monitoring Resistensi Vektor Malaria di Kab. Tojo Una-Una Prov. Sulawesi Tengah;
52. Survei Sentinel Tikus di Kab. Enrekang Prov. Sulawesi Selatan;
53. Survei Perubahan Iklim Vektor Malaria di Kab. Wajo Prov. Sulsel (Musim Penghujan dan Musim Kemarau);
54. Survei Perilaku Vektor di Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan;
55. Survei Monitoring Resistensi Vektor DBD di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan;
56. Pengembangan Pengujian dan Kendali Mutu Laboratorium Penyakit; dan
57. Pengembangan Pengujian dan Kendali Mutu Laboratorium Faktor Risiko.

Indikator 2. (Tahun 2020 - 2022)

Persentase Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan

DO: Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survey faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/ survey penyakit dan faktor risiko pemyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam 3 tahun

Target : 75%
Realisasi : 87%
% capaian : 116%

1. Uji RDT Malaria di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
2. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis Pre-TAS di Kab. Tojo Una-Una Prov. Sul-Teng Tahun 2020;
3. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis Pre-TAS di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
4. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis Pre-TAS di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
5. Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis (S3A) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
6. Survei Kepadatan Tikus di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020;
7. Survei Perilaku Vektor DBD di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020;
8. Surveilans Monitoring IM dan IB Pada pasien kusta di Kota Makassar tahun 2020;
9. Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
10. Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
11. Survei Perilaku Vektor DBD di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
12. Kajian FR Penyakit/Gangguan Pernafasan pd Masyarakat yg bermukim di sekitar Lokasi Pertambangan Semen di Kel.Taraweang Kec.Labakkang Kab. Pangkep Prov. Sul-Sel Tahun 2020;
13. Kajian FR KesLing Pasca Bencana Banjir Bandang di Kab. Luwu Utara Prov. Sul-Sel Tahun 2020;
14. Surveilans Faktor Risiko Natal dan Tahun Baru di Malino Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
15. Kajian FR Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Toraja Utara Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020;
16. Kajian FR Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020;
17. Kajian FR Gangguan Pencernaan pada TPM di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
18. Surveilans FR Penyakit Bersumber Air melalui DAMIU di Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
19. Surveilans FR Penyakit Bersumber Air melalui DAMIU di Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020;
20. Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I (Erapo) di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
21. Gambaran Kualitas Air Minum dan Kejadian Diare di Kota Kendari berdasarkan Data Profil Kesehatan Kota Kendari Tahun 2018-2019;
22. Kajian Kuantitas dan Kualitas Air Minum berdasarkan Jenis Sarana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
23. Kajian FR Penyakit Menular melalui Makanan (*Foodborne Diseases*) berdasarkan Data Profil Kesehatan Prov. Sul-Bar Tahun 2017;

24. Kajian FR Penyakit Menular melalui Makanan (*Foodborne Diseases*) berdasarkan Data Profil Kesehatan Prov. Sul-Teng Tahun 2018;
25. Gambaran Kualitas Air Minum di Provinsi Sulawesi Selatan (Kajian Data Pasif Hasil Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2019);
26. Dampak Faktor Risiko Penyakit Gangguan Pencernaan pada Tempat Pengolahan Makan/Minum di sekitar Kantor BTKLPP Kelas I Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
27. Melakukan Pemeriksaan Sampel Lingkungan Tahun 2020;
28. Melakukan Pemeriksaan Sampel COVID-19 Tahun 2020;
29. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre TAS) di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
30. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre TAS) di Kab. Konawe Utara Prov. Sul-Tra Tahun 2021;
31. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre TAS) di Kab. Banggai Kepulauan Prov. Sul-Teng Tahun 2021;
32. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (Pre TAS) di Kab. Morowali Provinsi Sul-Teng Tahun 2021;
33. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis (Pre TAS) di Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
34. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis (TAS 1) di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
35. Survei Evaluasi Efektifitas POPM Filariasis (TAS 2) di Kabupaten Sidrap propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
36. Survei Evaluasi Efektivitas POPM Filariasis (TAS 3) di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
37. Surveilans S3A di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
38. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
39. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
40. Survei Brucellosis di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
41. Survei Brucellosis di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
42. Surveilans DBD di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
43. Pemetaan Luas Wilayah Reseptivitas Malaria di Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
44. Pemetaan Luas Wilayah Reseptivitas Malaria di Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
45. Surveilans Monitoring IM dan IB pada Pasien Kusta di Kota Makassar Tahun 2021;
46. Surveilans FR Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
47. Surveilans FR Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kab. Kep. Selayar Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021;
48. Surveilans FR Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
49. Surveilans FR Penyakit bersumber Air melalui DAM di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
50. Surveilans FR Penyakit Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
51. Surveilans FR Penyakit Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
52. Surveilans FR Penyakit Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021;
53. Surveilans FR Penyakit Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021;
54. Surveilans FR Penyakit Gangguan Pencernaan pada TPM di Kab. Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021;
55. Kajian FR Penyakit terhadap KesMas sekitar Pertambangan Emas di Kab. Bombana Prov. Sul-Tra Tahun 2021;
56. Kajian Faktor Risiko Legionellosis di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
57. Kajian Faktor Risiko Legionellosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
58. Analisis FR Merkuri terhadap KesMas sekitar Penambang Emas Tradisional di Kab. Luwu Prov. Sul-Sel Tahun 2021;
59. Kajian FR Penyakit pd TPM dlm pelaksanaan Adaptasi Kebiasan Baru di Kab. Enrekang Prov. Sul-Sel Tahun 2021;
60. Kajian Faktor Risiko Legionellosis di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
61. Kajian Faktor Risiko Penyakit terhadap Kesehatan Masyarakat di sekitar Penambangan Emas di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
62. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Arus Mudik Natal dan Tahun Baru di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
63. Surveilans Faktor Risiko Penyakit PD3I (Erapo) di Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
64. Kajian Faktor Risiko Lingkungan Penyakit DBD di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
65. Melakukan Pemeriksaan Sampel Lingkungan Tahun 2021;
66. Melakukan Pemeriksaan Sampel COVID-19 Tahun 2021;
67. Pemetaan Reseptivitas Malaria di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
68. Survei Evaluasi Dampak POPM Filariasis Alternatif di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
69. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
70. Survei Evaluasi POPM Filariasis Alternatif di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
71. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
72. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
73. Survei Evaluasi Kecacingan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
74. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
75. Survei EvaluasiPrevalensi Kecacingan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;

76. Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
77. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
78. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
79. Surveilans Sentinel Arbovirosis di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
80. Surveilans Sentinel Leptospirosis di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
81. Surveilans Zoonosis (Brucellosis) di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
82. Surveilans Pemantauan Indeks Morfologi dan Indeks Bakteriologi Kusta di Kota Makassar Prov. Sul-Sel Tahun 2022;
83. Surveilans Penemuan Kasus TB baru dan Pemantauan Pengobatan di Tempat Khusus Prov. Sul-Bar Tahun 2022;
84. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
85. Surveilans Faktor Risiko Penyakit pada Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
86. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
87. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Makanan) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
88. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Majene Prov. Sul-Bar Tahun 2022;
89. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Pinrang Prov. Sul-Sel Tahun 2022;
90. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Pangkep Prov. Sul-Sel Tahun 2022;
91. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Wakatobi Prov. Sul-Tra Thn 2022;
92. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Buton Prov. Sul-Tra Tahun 2022;
93. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Banggai Prov. Sul-Teng Tahun 2022;
94. Surveilans FR Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum RT di Kab. Morowali Utara, Sul-Teng Tahun 2022;
95. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
96. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Udara) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
97. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan (Tanah dan Bahan Pangan) di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
98. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Konawe Utara Prov. Sul-Tra Tahun 2022;
99. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Toli-Toli Prov. Sul-Teng Tahun 2022;
100. Surveilans FR Lingkungan (Media Lingkungan) di sekitar Area Pertambangan Kab. Buol Prov. Sul-Teng Tahun 2022;
101. Surveilans Faktor Risiko Legionellosis di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
102. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan Tahun 2022;
103. Surveilans pada Situasi Khusus (Lebaran) di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022;
104. Surveilans pada Situasi Khusus (Nataru) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Tahun 2022;
105. Surveilans pada Situasi Khusus (Porprov) di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Tahun 2022;
106. Surveilans FR Lingkungan di Wilayah Layanan (Provinsi Sulawesi Tenggara) dalam rangka Hari Nusantara Tahun 2022;
107. Surveilans FR KesLing dlm rangka pelaksanaan PE Kasus Leptospirosis di Kota Kendari Prov. Sul-Tra Tahun 2022;
108. Gambaran Kualitas Air Bersih Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
109. Gambaran Kualitas Air Limbah Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
110. Gambaran Kualitas Air Minum Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
111. Gambaran Kualitas Makanan dan Swab (Peralatan Makan, Rectal dan Tangan) Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
112. Gambaran Kualitas Udara Ambien Berdasarkan Hasil Uji Sampel di Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2022;
113. Survei Sentinel Tikus di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022; dan
114. Survei Perubahan Iklim Vektor Malaria di Kab. Wajo Prov. Sulsel (Musim Penghujan dan Musim Kemarau) Tahun 2022.

Rumus Capaian Indikator 2 :

$$\text{Capaian} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ surveilans\ FR\ dan\ penyakit\ berbasis\ laboratorium\ yang\ dimanfaatkan\ 3\ tahun\ terakhir}{Jumlah\ rekomendasi\ surveilans\ FR\ dan\ penyakit\ berbasis\ laboratorium\ yang\ dikeluarkan\ 3\ tahun\ terakhir}\ x\ 100\%$$

Jumlah rekomendasi yang **dikeluarkan** 3 tahun terakhir = 131 rekomendasi
Jumlah rekomendasi yang **dimanfaatkan** 3 tahun terakhir = 114 rekomendasi

Indikator 3.

Persentase Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

DO: Respon signal Sistem Kewaspadaan Dini (SKD), Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya kurang dari 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respon berupa komunikasi, rencana Penyelidikan Epidemiologi/Investigasi, Laporan Penerimaan Spesimen.

Target : 95%
Capaian : 100%
% Capaian : 105.26%

1. Kasus COVID-19 Varian Omicron di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;

2. KLB DBD di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif ATIPICAL di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan; dan
4. Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif ATIPICAL di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Indikator 4.

Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

DO		Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan disosialisasikan dalam waktu satu tahun.
Target	:	3 Jenis
Capaian	:	4 Jenis
% Capaian	:	133%

1 TTG Pengolahan Air Bersih dengan Proses Desinfeksi menggunakan Chlorinator Sistem Infus;
2 TTG Pengolahan Air Bersih Saringan Sederhana untuk menurunkan Kekeruhan, TDS;
3 TTG Septic Tank Apung; dan
4 TTG Septic Tank Vertikal.

Indikator 5.

Nilai Kinerja Anggaran

DO		Capaian Keluaran kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.
Target	:	85
Capaian	:	86.61
% capaian	:	101.9%
		Sumber : SMART DJA Kemenkeu, 2022

Indikator 6.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

DO		Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap Regulasi.
Target	:	93
Capaian%	:	94.02
% capaian	:	101.1%
		Sumber : OM-SPAN Kemenkeu, 2022

Indikator 7.

Kinerja Implementasi WBK Satker

DO		Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja melalui penilaian mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Target	:	75
Capaian	:	88.57
% Capaian	:	118%
		Sumber: Hasil Assessment TPI Tahun 2022

Indikator 8.

Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

DO		Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.
Target	:	80%
Capaian	:	100%
% Capaian	:	125%
Rumus Capaian Indikator 8	:	$\text{Capaian} = \frac{Jumlah\ pegawai\ yang\ mengikuti\ peningkatan\ kapasitas\ ASN\ paling\ sedikit\ 20\ jpl\ (JPPK)}{Jumlah\ keseluruhan\ ASN\ (JKASN)}\ x\ 100\%$

Jumlah seluruh pegawai ASN = 68 orang

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan minimal 20 JPL = 68 orang

Makassar, Januari 2023

Kasubbag Administrasi Umum

BTKLPP Kelas I Makassar

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes

NIP 197908122008011023

Kertas Kerja/ Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Pimpinan
Tahun Pelaksanaan 2022

No		Uraian Catatan Reviu	Disposisi	TL TIM Penyusun	Checklist perbaikan
1	BAB I	Lapkin telah menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi, dasar hukum, permasalahan utama (*Strategic Issued),* kegiatan organisasi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta sistematika penyajian.			
2	BAB II	Lapkin telah menyajikan tentang perencanaan kinerja dan indikator yang diperjanjikan.			
3	BAB III	1 Lapkin telah menyajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran; 2 Belum terdapat klausul **pengertian** pada setiap indikator, sesuai pedoman sistematika yg disampaikan Unit Esselon1; 3 Untuk setiap indikator telah menyajikan : Definisi Operasional, Cara perhitungan capaian, data perbandingan Tahun ini, Tahun lalu, dan tahun terakhir, data perbandingan tahun ini dengan target jangka menengah, data perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional; 4 Menyajikan analisis perbandingan capaian kinrja dengan satuan kerja setingkat; 5 Terdapat Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya: masalah yang dihadapi dan solusinya; 6 Telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan RUMUS yang telah diberikan; 7 menyajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target perindikatornya.	tambahkan klausul pengertian pada setiap indikator	akan dilakukan perbaikan dengan menambahkan klausul *pengertian* pada setiap indikator	
4	BAB IV	Lapkin telah menyajikan kesimpulan dan tindak lanjut.			
5	Lampiran	Lapkin telah melampirkan beberapa dokumen pendukung pencapaian kinerja selama setahun (Tahun 2022), diantaranya :	tambahkan lampiran SK TIM Penyusun LAKIP dan SAKIP	akan dilampirkan	
		1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022, beserta revisinya; 2 Analisa SMART Indikator Kinerja; 3 Matriks RAK Revisi-1 BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024; 4 Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022; 5 Rencana Kerja Tahun 2022, beserta revisinya; 6 Kertas Kerja Capaian Kinerja; 7 Tidak terdapat Analisis SMART untuk indikatornya pada lampiran.	lengkapi lampiran Analisis SMART	akan dilampirkan	
6	Mekanisme Penyusunan	1 Lapkin telah disusun oleh tim penyusun Lapkin, dengan nomor SK.02.03/1/2392/2022 tentang Penunjukan TIM Penyusunan LAKIP dan SAKIP, namun belum terlampir; 2 Data dan informasi yang disampaikan dalam Lapkin didukung dengan data valid; 3 Terdapat mekanisme pengumpulan dan pengukuran Kinerja (SOP), namun belum terlampir; 4 Terdapat penanggung jawab pengumpulan data/ informasi disetiap substansi dan subag; 5 Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam Lapkin telah diyakini keandalannya; 6 Analisis / penjelasan dalam Lapkin telah diketahui oleh unit kerja terkait.	lampirkan SOP terkait lampirkan SK Tim	akan dilampirkan akan dilampirkan	

Yang melakukan Review
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Maman Sudirman, ST.,M.Kes
NIP. 197001121994031004

Koordinator TIM

Mahyuddin Asang, SKM.,M.Kes
NIP. 197908122008011023

Lampiran 5.a. Kertas Kerja Persentase Kapasitas ASN 20JPL (indikator 8)

DAFTAR PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
BTKLPP KELAS I MAKASSAR

Tahun Pelaksanaan : 2022

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MAMAN SUDIRMAN, ST, M.Kes	Kepala BTKLPP Kelas I Makassar	1. Workshop online systematic review dan meta analisisis; 2. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan; 3. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 4. Literasi Digital Kemenkes RI; 5. SOP	0			21								18	39
2	dr TRISNAWATY	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Pelatihan Sampling bagi petugas pengambil contoh air, 2. Pelatihan Kompetensi Petugas Haji , 3. Bimbingan Teknis Integrasi Petugas Haji					91								91
3	YUSTINA MARIA ODA, SKM, M.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya (JF)	1. Peningkatan Kontribusi ATLM di Bidang Molekuler, 2. Peran Ahli Tenaga Laboratorium Medik(ATLM) dalam Manajemen Penanggulangan &Pengendalian Kasus hipertensi di Indonesia; 3. Literasi Digital; 4. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi						2		4	4			16	26
4	TABITA MINTU, SKM, M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1 Peduli Kanker, 2. Seminar Nasional Kewaspadaan Penyebaran varian Omicron di Indonesia, 3. Manajemen Spesimen COVID-19 dan Penyakit Menular Lainnya		25										52	77
5	YULCE RAKKANG, SKM,M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Workshop Manajemen Spesimen COVID-19 dan Penyakit Menular Lainnya, 2. Seminar Nasional Kewaspadaan Penyebaran Varian Omicron di Indonesia		22											22
6	H. I SRINATA, SKM, M.Kes	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JP)	1. Pengembangan kuisioner berbasis android; 2. Webinat Literasi digital				24						4			28
7	NASWIR, S.Si, M.Si	Entomolog Kesehatan Ahli (JP)	1. Workshop Pengawasan Binatang Pengerat dan Pencegahan Leptospirosis, 2 Workshop Leptospirosis. , 3. Surveilans dan Penanggulangan Leptospirosis dengan Pendekatan One Health				19	15								34

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	dr. KADEK IRAWATI KESUMANINGSIH	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	1. Pertanda Pandemi COVID-19 akan menjadi Endemi?, 2. perawatan diri pada kusta, 3. Pencegahan dan Pengendalian Frambusia, 4. Rokok dan Pandemi COVID-19, 5. Tatalaksana Kusta, 6. World Malaria Day : Reaching the Zero Target, 7.seluk beluk penyakit TBC, 8. sistem informasi kesling berbasis android			8	24									32
9	SUARNI AS., SKM, M.Kes	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JP)	1. Upaya bersama dalam menjaga kualitas air minum aman yang berkelanjutan; 2. penelitian berbasis android, 3. pelatihan sanitiarian kit, 4 Climate change: How we survive, Adapt, and mitigate; 5. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko.			6	29	7	2						24	68
10	Dr.Eng. ERNAWATY, S.Si,	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1. Groundwater - Make the invisible visible,2 Pertemuan Ilmiah Epidemoilogi Internasional; 2. In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 3. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko;			2	24				28				24	78
11	SUWARDI, ST,M.Kes	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JP)	1. In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 2. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko; 3. In House Training Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah;				24								48	72

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	MUSTAMAN, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. webinar peduli kanker, 2. Omicron : Pertanda Pandemi Covid-19 Akan Menjadi Endemi ?, 3. Surveilans Kusta, Respon One Health dalam penanggulangan wabah PMK, 4. Yang terbaru dari Strategi Pencegahan dan Intervensi Dengue di Indonesia; 5. webinar akses pengobatan hepatitis; 6. SOP; 7. Literasi Digital Kemenkes RI		6	2	2	2	2						30	44
13	NURALIM AHZAN, SKM,M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1, Symposium Multi Profession Scientific Series in The Management of COVID-19 In Indonesia; 2. Pelatihan Untuk Pelatihan Penanggulangan Zoonosis untuk Pengelola Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. Foundation in Health Security in Indonesia				74	30	4							108
14	Hj. YUSNANI, S.KM	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	1. Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko, 2. Pelatihan operasional alat sanitarian kit, 3. Tata naskah dinas dan manajemen kearsipan, 4. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko; 5. In House Training Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah.			2		14	7						48	71
15	MUKHLIS,, SKM	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1. Workshop penyusunan SKP dan DUPAK Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL); 2. In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 3. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko; 4. In House Training Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah.				24		7						48	79

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	SYACHRUDDIN, SE.M.Ak	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	1 in house training SKI; 2.Reformulasi IKPA; 3. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan; 4. Webinar perpajakan; 5. Pelatihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 6. Literasi Digital Kemenkes RI; 7. satuan Kepatuhan Interen; 8. SOP				4					7			11	22
17	dr. YOHANA P., M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Perawatan Diri pada Kusta, 2. Omicron: Pertanda Pandemi Covid-19 akan Menjadi Endemi?, 3. Pencegahan dan Pengendalian Frambusia,4. Ayoo..Kita Selamatkan Bangsa dari TB,4. Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android			8	24								21	53
18	MAHYUDDIN ASANG, SKM,M.Kes	Analis Kepegawaian Ahli Muda (JF)	1. sosialisasi SPIP; 2. In House Training SKI; 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas					2				222				224
19	AFSAHYANA, SKM,M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Peduli Kanker, 2. Seminar Nasional Kewaspadaan Penyebaran Varian Omicron di Indonesia, 3. Upaya Promosi Kesehatan Program Penanggulangan Kusta; 3. Manajemen Spesimen COVID-19 dan Penyakit Menular Lainnya		27										11	38
20	PAHRUL RAZAK, SKM	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1 Literasi Digital; In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 2. In House Training Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah.				24					4			24	52
21	ST.HADIJAH SYAM, SKM,M.Adm.Kes	Arsiparis Ahli Muda (JF)	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, 2. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 3. Literasi Digital Kemenkes RI				4		14						14	32

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	MUHAMMAD AKBAR GANI, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JP)	1. Omicron:Pertanda pandemi Covid19 menjadi endemi, 2. Surveilans kusta, 3. Workshop Peningkatan Kapasitas dalam memberikan layanan KLB Hepatitis, 4. Strategi Pencegahan dan Intervensi Dengue 5. Indonesia Dengue Congres			4		7	2		21					34
23	A. FARADILLAH, SKM	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	1.Strategi pencapaian ikpa 2022, 2.Profesi keuangan dalam era ekonomi berkelanjutan; 3. Rakernas akutansi dan pelaporan keuangan; 4. E-learning perumusan klarifikasi rincian output (KRO/RO); E-learning MKN dasar prinsip - prinsip manajemen keuangan satuan kerja pemerintah pusat					2			4	7	12			25
24	SULFIANA, S.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Pelatihan Operasional Sanitarian Kit; 2. Webinar Pelatihan Literasi Digital; 3. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 4.Pelatihan protokol lab kredit; 5. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan; 6. IHT Pelatihan Petugas Call Centre ; 7. SOP					14					4		5	23
25	ST. MUFIDAH, ST., M.T	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Pelatihan dan Sertifikasi Petugas PPC				21									21
26	NURHAYATI, S.Si	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	,1. Sosialisasi Silantor 2.0, 2. Aedes Aegypti and Ae. Albopictus : diversity, phylogeny, and phylogeography, 3. Inonesia Dengue Congres "wujudkan Indoensia Benas Dengue"					7			16					23
27	DWITA RATNA SARI, SE	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	1. Open Class (AP Corner) REFORMULASI IKPA T.A. 2022: Isu Terkini dalam Akselerasi Belanja dan Pencapaian Output; 2. Webinar Aplikasi Sakti dan Moon Sakti; 3. webinar perpajakan; 4. Pelatihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 5. Literasi Digital Kemenkes RI; 6. SOP.						4			4			14	22

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	ASNIATI, SKM, M.Kes	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1. Workshop penguatan masyarakat dalam pengenalan pengelolaan air minum rumah tangga; In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 2. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko; 3. In House Training Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah;				24							2	48	74
29	ROSMIATI, S.Farm	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Literasi digital; 2. Laboratory Handling for Public Health Specimens; 3. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, Pelatihan laboratorium; 4.Pelatihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 5. Literasi Digital Kemenkes RI;									4	2		18	24
30	IKA SEPTIANY, S.Si, M.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Workshop Petugas Pengambil Contoh Uji Air Berbasis Kompetensi,2. Pelatihan Sanitarian Kit				14	14								28
31	AMISRA, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Seminar Nasional Kewaspadaan Penyebaran Varian Umicron di Indonesia, 2 Systematic Review & Meta Analysis		7		21									28
32	A. YULI ROHMA, S.Si, M.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Pelatihan Penerapan Protokol Lab Predict			35										35
33	ISNADIYAH, S.Si, M.Biomed	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JF)	1. Pelatihan Penerapan Protokol Laboratorium PREDiCT bagi Petugas Labkesmas			35										35
34	FARIDA, S.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli / Penata Laboratorium Diseminasi (JP)	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2.Literasi Digital Kemenkes RI; 3. Pelatihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 4. IHT Pelatihan Petugas Call Centre; 5. SOP				4					4			14	22

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	NURHAENI, SKM	Analis Kepegawaian Ahli Pertama (JF	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2. Webinar sosialisasi Birokrasi Manajemen; 3. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 4. Literasi Digital Kemenkes RI; 5. SOP				4								18	22
36	IMELDA, S.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JF)	1. Interpretasi Data Hasil Sertifikat Kalibrasi Lingkup Suhu & Massa, 2. Pelatihan Operasional Alat Sanitarian Kit; Literasi digital			2		14				4				20
37	ZASIMAH MARGAWATY DJAMIL, SH, MH	Analis BMN	1. Upaya Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga dan Daerah, 2, Konseptual Penjenjangan Kinerja Berdasarkan Permenpan RB No.89/2021 sebagai penguatan perencanaan melalui proses bisnis, pohon kinerja dan cascading, 3. sosialisasi penggunaan aplikasi srikandi; 4. in house training peran SKI terhadap transformasi dalam transformasi digital dalam mendukung reformasi birokrasi; 5. Webinar Mewujudkan Tertib Arsip Kemenkes Melalui Pengelolaan Arsip Vital Aset; 6. Webinar Literasi Digital Sektor Pemerintahan			4					2	7	8			21
38	ADISTI DIAH SETIAWATI, SST	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1. Pelatihan Protokol Lab Predict					35								35
39	LUKMAN, SE, M.Acc	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli	1. E lerning Manajemen									42				42
40	SITTI MULIANA, S.Kom, M.A.P	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	1. Pelatihan online indikator kinerja u perencanaan dan akuntabilitas; 2. literasi digital; 3. Professional Service (Pelatihan Call Centre dan Pelayanan Prima)			14						4		18		36

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	RUSMAN VELMAN KOLEBA, SKM	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JF)	1 Training PPC Udara; 2. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan; 3. Pelatihan laboratorium udara; 4. Pelatihan/ training sampling air; 5. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 6. Literasi Digital Kemenkes RI; 7. IHT Pelatihan Petugas Call Centre; 8. SOP; 9. Manajemen Mutu Laboratoriun SNI ISO/EIC 17025 :2017									14			8	22
42	FARIED MAKMUR	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	1,. World Class Laboratory Personel, 2. Training Air Sampling Officer; 3 Literasi Digital						2		14	4			39	59
43	NURUL KHOLIJAH ASPIA, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama(JF)	1. Perawatan Diri pada Kusta,, 2. Perawatan Diri pada Kusta, 3 Rokok dan Pandemi COVID-19, 4. Tatalaksana Kusta, 5. Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android		12		24									36
44	IRMAWATI	Pranata Laboratorium Kesehatan (JP)	1. Manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO/ IEC 17025 : 2017; 2.Pemutakhiran data pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan; 3. Implementasi dan Internalisasi Core BerAKHLAK; 4. Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada ASN;5 Peningkatan Kapasitas petugas PD3i											20	20	40
45	SURAYA	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	1. PELATIHAN ALAT SANITARIAN KIT, 2. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, 3. Pelatihan sosialisasi aplikasi Srikandi, 4. Literasi Digital Kemenkes RI, 5. Manajemen Mutu Laboratoriun SNI ISO/EIC 17025 :2017; 6. IHT Pelatihan Petugas Call Centre ; 7. SOP					14							8	22

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46	ST. ICA. HT	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	1. workshop pemutakhiran data pegawai di lingkungan kementerian kesehatan; 2. Implementasi dan Internalisasi Core BerAKHLAK; Manajemen Mutu Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC; 3. Literasi Digital Kemenkes RI; 4. IHT Pelatihan Petugas Call Centre; 5. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 6. SOP; 7. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi				4							14	18	36
47	RAJAMANG, S.Sos	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	1. in house training Tata Naskah Dinas; 2. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 3. Literasi Digital Kemenkes RI; 4. SOP						14						8	22
48	SAENAB A, SKM	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	1. Sosialisasi penyusunan SKP Arsiparis, 2. SRIKANDI	7							14					21
49	LILI ADRIANI	Pranata Laboratorium Kesehatan (JP)	1. Statistika Uji Banding Dan Uji Profisiensi Sesuai ISO 13528:2015; 2. Pelatihan Kalibrasi Massa dan Volumetrik, dan Pelatihan Mid Mapping			4							25			29
50	NURHAYATI	Arsiparis / Pranata Kearsipan	1 Webinar Mewujudkan Tertib Arsip Kemenkes Melalui Pengelolaan Arsip Vital Aset; 2. Webinar Literasi Digital Sektor Pemerintahan; 3. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 4. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 5. Literasi Digital Kemenkes RI; 6. IHT Pelatihan Petugas Call Centre; 7. SOP										6		27	33
51	YANTI WIJAYANTI AYU EDHI ADHISYAH	Arsiparis Terampil (JF)	1. Gerak Cepat Persiapan Evaluasi SAKIP tahun 2022, 2. Webinar Pemberkasan Arsip Elektronik, 3. ARSIP SEBAGAI BUKTI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN; 4. Literasi Digital; 5. in house training peran SKI terhadap transformasi dalam transformasi digital dalam mendukung reformasi birokrasi			2	4		4			11				21

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	KARTIKA RATU RANDA TAPPARAN	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	1. Pelatihan pengambilan sampel air, 2. Webinar literasi digital; 3. Webinar Laboratory Handling for Public health spesimens				14						6			20
53	ANGKA WIJAYA	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	1 in house training Tata Naskah Dinas & Manajemen Kearsipan; 2. Literasi Digital; 3. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 4. SOP						14			4			4	22
54	ULFA MARLIAWATI, A.Md.KL	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan (JP)	1. Gerak Cepat Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2022; 2. Webinar Literasi Digital; In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan"			3	24						4			31
55	SITTI FATIMAH, A.Md.KL	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan (JP)	1. Pentingnya Pengelolaan Limbah Medis di Masa Pandemi Covid-19, 2. Pedoman Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko. 3. Groundwater-Make The Invisible Visible "Menjaga Kualitas Air Minum Aman Berkelanjutan", 4. Pelatihan sanitarian kit; In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 5. In House Training Analisis Data Laboratorium dan Penulisan Ilmiah;			14	24	14								52
56	WARDA AMALIAH, A.Md.AK	Pranata Laboratorium Kesehatan (JP)	1. Pelatihan Saniyatian Kit, 2. Peran Ahli Laboratorium Medik (ATLM) dalam Manajeman Penaggulangan dan Pengendalian Kasus Hipertensi di Indonesia; 3. Literasi Digital					14			4	4				22

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57	ARIFIN NGAMBA	Petugas Keamanan (JP)	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 3. Literasi Digital Kemenkes RI; 4. Service Excelent; 5. SOP												22	22
58	RUSLAN	Pengadministrasi Umum (JP)	1. Pelatihan AMDAL Tipe A					35								35
59	SODDIN S	Petugas Keamanan (JP)	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 3. Literasi Digital Kemenkes RI; 4. Service Excelent; 5. SOP												22	22
60	ABDUL RAHMAT	Pengelola Instalasi Air dan Listrik (JP)	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 3. Literasi Digital Kemenkes RI; 4. Service Excelent; 5. SOP												22	22
61	SARIF	Pramubakti (JP)	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 3. Literasi Digital Kemenkes RI; 4. Service Excelent; 5. SOP												22	22
62	Erlina Hamzah, SKM	Penata Muda Tk.I / III.b	1. Pendekatan Manajemen Terapan (AMTC) Berbasis Epidemiologi dalam Mendukung Transformasi Kesehatan; 2. Pelatihan Identifikasi Semut; "Semut dalam Kehidupan Manusia dan Perannya bagi Lingkungan dan Pertanian"/;3. Basic Training Malaria untuk Daerah Endemis Sedang dan Endemis Tinggi									71				71

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	Heri Santoso	Pranata Keuangan APBN	1. Pelatihan Dasar CPNS golongan II Tahun 2022; 2. 6 Pilar Internalisasi ASN; 3. SOP; 4. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 5. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 6. Literasi Digital Kemenkes RI									647			42	689
64	Devi Gusni Yanti	Entomolog Kesehatan	1,Indonesia Dengue Congre, 2.Aedes Aegypti and Ae. Albopictus : diversity, phylogeny, and phylogeography; 3.Pelatihan Dasar CPNS golongan II Tahun 2022; 4. 6 Pilar Internalisasi ASN								23	647			42	712
65	Zhuhria Alifsya Ramadhani	Epidemolog Kesehatan	1. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 2. Pelatihan Dasar CPNS golongan II Tahun 2022; 3. webinar akses pengobatan hepatitis; 4. Pelatihan tenaga Pelatih kesehatan angkatan ke 7; Pelatihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 8. SOP; 9. Literasi Digital Kemenkes RI; 10. Pelatihan Fundamental Epidemiologi; 11. 6 Pilar Internalisasi ASN; 12. Workshop Pengisian SKDR				40		4	41	12	647			42	786
66	Islamiaty Gandhy, A.Md.Kes	Epidemolog Kesehatan	1. Pertemuan Pembahasan Jejaring Labkesmas; 2. Pendekatan Manajemen Terapan berbasis Epidemiologi; 3. Pelatihan Dasar CPNS golongan II Tahun 2022; 4. 6 Pilar Internalisasi ASN								14	2	647		42	705
67	Evi Nursyafitri	Ahli Pertama - Sanitarian	1. Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim 2022; 2. Pelatihan Dasar CPNS golongan III Tahun 2022; In House Training "Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Berbasis Android (Kobocollect) dan Pengolahan Data Risiko Kesehatan Lingkungan" 3. In House Training Analisis Data Metodologi dan Analisis Risiko; 4. 6 Pilar Internalisasi ASN				24					4	647		66	741

NO	NAMA	JABATAN	JENIS PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH JAM PELAJARAN (JPL)												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68	Irwan Yahya Setiadi	Pranata Komputer	1. Pelatihan Dasar CPNS golongan II Tahun 2022; 2. 6 Pilar Internalisasi ASN; 3. SOP; 4. In house training Tata naskah Dinas manajemen kearsipan, webinar; 5. Peltihan sosialisasi aplikasi Srikandi; 6. Literasi Digital Kemenkes RI.									647			25	672

Mengetahui,
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Maman Sudirman, ST.,M.Kes
NIP. 197001121994031004

Makassar, Januari 2023
Kasubbag Administrasi Umum

Mahyuddin Asang, SKM.,M.Kes
NIP. 197908122008011023

Lampiran 6. Capaian Kinerja, Realisasi Penggunaan Anggaran, dan Efisiensi Indikator Tahun 2022

Rekapitulasi Capaian Kinerja, Realisasi Penggunaan Anggaran, dan Efisiensi Indikator Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022				Anggaran Tahun 2022			Efisiensi Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp) / PAKi	Realisasi (Rp) / RAKi	% Penyerapan Anggaran	Capaian Keluaran / CKi	(PAKi*CKi)	(PAKi*CKi)-RAKi	Tingkat Efisiensi (%)
1	Jumlah Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	Rekomendasi	46	57	124	3,518,146,200	3,487,081,283	99.12	1.24	4,359,442,030	872,360,747	20.01
2	Persentase Rekomendasi Surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Persen	75	87	116	183,092,000	180,300,995	98.48	1.16	212,386,720	32,085,725	15.11
3	Persentase Respon Sinyal KLB/ Bencana kurang dari 24 jam	Persen	95	100	105.26	499,636,000	491,419,047	98.36	1.05	525,932,632	34,513,585	6.56
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Jenis	3	4	133	81,971,800	79,440,470	96.91	1.33	109,295,733	29,855,263	27.32
5	Nilai Kinerja Anggaran		85	86.61	101.9	3,992,608,000	3,963,190,516	99.26	1.019	4,068,232,693	105,042,177	2.58
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	94.02	101.1	167,084,000	164,500,015	98.45	1.011	168,916,534	4,416,519	2.61
7	Kinerja Implementasi WBK Satker		75	86.15	114.9	20,611,169,000	19,690,149,841	95.53	1.149	23,675,362,791	3,985,212,950	16.83
8	Persentase Peningakatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persen	80	100	125	24,540,000	21,052,000	85.79	1.25	30,675,000	9,623,000	31.37
Nilai Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Satker					**115.2**	**29,078,247,000**	**28,077,134,167**	**96.56**	**1.152**	**33,489,674,893**	**5,412,540,726**	**16.16**

Keterangan:

Rumus: $E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Makassar, Januari 2023
Kasubbag Administrasi Umum
BTKLPP Kelas I Makassar

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP 197908122008011023

Lampiran 7. Rencana Kerja Tahun 2022, beserta revisinya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,
Email : btklmakassar@gmail.com

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BTKLPP KELAS I MAKASSAR
TAHUN PELAKSANAAN 2022

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	BTKLPP Kelas I Makassar
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Menurunnya Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa
Kegiatan	:	1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada P2P 2 Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk P2P

Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan

01	Pelayanan Publik Lainnya	4,004,094,000
02	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	278,068,000
03	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	1,030,138,000
04	Sarana Bidang Kesehatan	2,007,261,000
05	OM Sarana Bidang Kesehatan	225,711,000
06	Koordinasi	183,092,000
07	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,511,169,000
08	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,100,000,000
09	Layanan Manajemen SDM Internal	24,540,000
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	167,084,000
	Keseluruhan Anggaran	**24,531,157,000**

A. RINCIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN

Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk P2P

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Alokasi Rp
01	Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46	4,004,094,000
		Persentase Respon Sinyal KLB / Bencana kurang dari 24 jam	95%	
		Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3	
02	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	Nilai Kinerja Anggaran	85%	278,068,000
03	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			1,030,138,000
04	Sarana Bidang Kesehatan			2,007,261,000
05	OM Sarana Bidang Kesehatan			225,711,000

06	Koordinasi	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%	183,092,000
07	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kinerja implementasi satker WBK	75	13,511,169,000
08	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			3,100,000,000
09	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	24,540,000
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93%	167,084,000

B. SUMBER PENDANAAN

No	Output dalam RKAKL	Pendanaan Tahun 2022 (Rp)		Jumlah	Lokasi
		Rupiah	PNBP		
01	Pelayanan Publik Lainnya	3,601,082,000	403,012,000	4,004,094,000	Wilayah layanan
02	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	278,068,000		278,068,000	Makassar
03	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	1,030,138,000		1,030,138,000	Makassar
04	Sarana Bidang Kesehatan	2,007,261,000		2,007,261,000	Makassar
05	OM Sarana Bidang Kesehatan	61,723,000	163,988,000	225,711,000	Makassar
06	Koordinasi	183,092,000		183,092,000	Makassar
07	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,511,169,000		13,511,169,000	Makassar
08	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,100,000,000		3,100,000,000	Makassar
09	Layanan Manajemen SDM Internal	24,540,000		24,540,000	Makassar
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	167,084,000		167,084,000	Makassar

Makassar, Januari 2022

Maman Sudirman, ST., M.Kes

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,
Email : btklmakassar@gmail.com

Revisi 01

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BTKLPP KELAS I MAKASSAR
TAHUN PELAKSANAAN 2022

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	BTKLPP Kelas I Makassar
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Menurunnya Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa
Kegiatan	:	1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada P2P 2 Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk P2P

Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan

01	Pelayanan Publik Lainnya	4,099,754,000
02	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	278,068,000
03	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	1,030,138,000
04	Sarana Bidang Kesehatan	2,458,691,000
05	OM Sarana Bidang Kesehatan	225,711,000
06	Koordinasi	183,092,000
07	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,511,169,000
08	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7,100,000,000
09	Layanan Manajemen SDM Internal	24,540,000
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	167,084,000
	Keseluruhan Anggaran	**29,078,247,000**

A. RINCIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN

Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk P2P

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Alokasi Rp
01	Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46	4,099,754,000
		Persentase Respon Sinyal KLB / Bencana kurang dari 24 jam	95%	
		Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	3	
02	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	Nilai Kinerja Anggaran	85%	278,068,000
03	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			1,030,138,000
04	Sarana Bidang Kesehatan			2,458,691,000
05	OM Sarana Bidang Kesehatan			225,711,000

06	Koordinasi	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	75%	183,092,000
07	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kinerja implementasi satker WBK	75	13,511,169,000
08	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			7,100,000,000
09	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	24,540,000
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93%	167,084,000

B. SUMBER PENDANAAN

No	Output dalam RKAKL	Pendanaan Tahun 2022 (Rp)		Jumlah	Lokasi
		Rupiah	PNBP		
01	Pelayanan Publik Lainnya	3,696,742,000	403,012,000	4,099,754,000	Wilayah layanan
02	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	278,068,000		278,068,000	Makassar
03	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	1,030,138,000		1,030,138,000	Makassar
04	Sarana Bidang Kesehatan	2,458,691,000		2,458,691,000	Makassar
05	OM Sarana Bidang Kesehatan	61,723,000	163,988,000	225,711,000	Makassar
06	Koordinasi	183,092,000		183,092,000	Makassar
07	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,511,169,000		13,511,169,000	Makassar
08	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7,100,000,000		7,100,000,000	Makassar
09	Layanan Manajemen SDM Internal	24,540,000		24,540,000	Makassar
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	167,084,000		167,084,000	Makassar

Makassar, Mei 2022

Maman Sudirman, ST., M.Kes

Lampiran 8. Pernyataan Reviu atas Pelaporan Kinerja T.A 2022

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29-31 Makassar, Telp/Fax: 0411-871620
Email: btklmakassar@gmail.com

PERNYATAAN REVIU ATAS PELAPORAN KINERJA
TAHUN PELAKSANAAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2022. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab satuan kerja.

Reviu bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 tahun 2020, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 – 2024, dan Petunjuk Teknis Perencanaan tahun 2022.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja secara akurat, handal, dan valid.

Makassar, Januari 2023

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Maman Sudirman, ST., M.Kes
NIP 197001121994031004

Lampiran 9. SK Tim Penyusun LAKIP dan SAKIP

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,
Email : btklmakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR
Nomor : HK.02.03/1/2392/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA BTKLPP KELAS I MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara Kementerian RI Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BTKLPP Kelas I Makassar.
b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dilampiran ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas masing-masing sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BTKLPP Kelas I Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusnan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelakasana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BTKLPP Kelas I Makassar.

: 2. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ini, dibebankan pada DIPA Tahun 2022 Nomor : SP/DIPA 024.05.2.613132/2020 tanggal 17 November 2021.

: 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam tahun anggaran 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 September 2022

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar,

Maman Sudirman, ST, M.Kes

Tembusan :
1. Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/1/2392/2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA BTKLPP KELAS I MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ NIP	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	Maman Sudirman, NIP. 197001121994031004	Penanggung Jawab
2.	Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes NIP. 197908122008011023	Koordinator
3.	D.Eng. Ernawaty, S.Si, M.Si NIP. 1979112020002122001	Anggota
4.	dr. Trisnawaty NIP. 197309302001122004	Anggota
5.	Yulce Rakkang, SKM, M.Kes NIP. 197008031993032002	Anggota
6.	Tabita Mintu, SKM, M. Kes NIP. 197201091998032001	Anggota
7.	Sitti Muliana, S. Kom, M.AP NIP.198312262006042015	Anggota
8.	A. Yuli Rohma, S.Si, M.Kes NIP. 198207092001122001	Anggota
9.	Farida, S.Si NIP. 198304212005012001	Anggota
10.	Pahrul Razak, SKM NIP. 198103182008121001	Anggota
11.	Zasimah Margawati Djamil, SH, MH NIP. 198108142015032001	Anggota
12.	Evi Nursyafitri, S.Tr. KL NIP. 199407072022032004	Anggota
13.	Irmawati NIP. 198006042010122001	Anggota
14.	Ulfa Marliawati, A.Md.KL NIP. 199503132020122006	Anggota
15.	Yanti Wijayanti Ayu Edhi A NIP.199107292015032002	Anggota

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 September 2022

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar,

Maman Sudirman, ST, M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 10. SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Nomor SOP : OT.02.02/1/ 201/2019
Tgl Pembuatan : 10 Januari 2019
Tgl Revisi : 20 Desember 2022
Tgl efektif : 02 Januari 2023
disahkan oleh Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Mamam Sudirman, ST, M.Kes
NIP 197001121994031004

Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpen RB No.12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memiliki Kemampuan/ kompetensi dalam menganalisa data
2. memahami tentang kinerja organisasi
3. selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu pengetahuan mampu kejadian laiinya
4. Bertanggungjawab

Peralatan / perlengkapan :

1. Peraturan perundang-undang yang berlaku dan yang terkait
2. seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office
3. Data Pelaksanaan Kegiatan

Peringatan :

Apabila Pengelola data kinerja tidak dikelola dengan baik maka penilaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tidak dapat mencapai target

Pencatatan dan Pendataan :

Setiap data capaian kinerja seksi/sub didokumentasikan

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu Baku			Ket
		Kepala	Kasubag TU	Kasie ADKL	Kasie SE	Kasie PTL	JFU	Kelengkapan	Waktu/ Menit	Output	
1	Memerintahkan dan memberi arahan untuk menyusun data untuk laporan Kinerja							Perjanjian Kinerja, RKT	60	Arahan	
2	Mengkoordinasi bahan yang terakait dengan pengumpulan data kinerja							Catatan Pengarahan dan disposisi	60	Catatan hasil koordinasi	
3	Menyampaikan Form perhitungan data kinerja tiap seksi							Hasil rapat	30	Form Isian data	
4	Melakukan pengisian form data kinerja dan diserahkan ke Sub Bag TU							RKAKL/DIPA, Monitoring pelaksanaan kegiatan	360	Draft Capaian Hasil Kerja	
5	Melakukan Kompilasi data kinerja dari seluruh data yang diterima							Hasil isian capaian kinerja	720	Hasil Kompilasi dokumen kinerja	
6	Menelaah dokumen data kinerja dan ditandatangani oleh kepala balai							Draft Dokumen Kinerja	60	Dokumen Kinerja Balai	
7	Menyapaikan dokumen data kinerja ke direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit							Dokumen Kinerja	10	Tanda Terima Dokumen Kinerja	
8	Mendokumentasikan dokumen kinerja							Dokumen Kinerja	30	Dokumen Kinerja Balai	

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Nomor SOP : OT.02.02/1/5024/2019
Tgl Pembuatan : November 2019
Tgl Revisi : 20 Desember 2022
Tgl efektif : 02 Januari 2023
disahkan oleh : Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Mamah Sudirman, ST, M.Kes
NIP 197001121994031004

Nama SOP : Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenkes RI No.2349/MENKES/per/XI/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
4. Kepmenkes RI No. 266/MENKES/SK/III//2004 tentang Tata Cara Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksanaan Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
5. Kepmenkes RI No. 1251/Menkes/SK/VII/2005 tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan B/BTKLPPM.
6. Kepmenkes RI No. 589/Menkes/SK/IV/2007 tentang Tata Hubungan Kerja BBTKL PPM.
7. PMK RI No.6 Tahun 2015 tetang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015.

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memiliki Kemampuan mengoperasikan computer/laptop.
2. Mengetahui tugas dan fungsi sub bagian/seksi.
3. Memiliki kemampuan menganalisis kegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Keterkaitan:

1. SOP Pengumpulan Data Kinerja

Peralatan / perlengkapan :

1. Rencana Aksi Kegiatan
2. Perjanjian Kinerja
3. DIPA-POK
4. Komputer dan Printer
5. Jaringan Internet
6. ATK

Peringatan

Apabila Pengumpulan dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) terhambat, target waktu penyelsaian LAPKIN tidak tercapai dan pengiriman ke Ditjen P2P terhambat

Pencatatan dan Pendataan

Dikirim/ disampaiakn ke Ditjen P2P dan disimpan dalam bentuk elektronik dan manual

Prosedur Pengukuran Kinerja

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		Kepala	Kasubag TU	JFU	Kelengkapan	Waktu/ Menit	Output	
1	Menugaskan kasubag TU untuk mengkoordinasikan penyusunan LAPKIN				Nota dinas kepala Balai tentang pengumpulan data kinerja, SK tim penyusun LAPKIN, bahann/data kinerja seksi dan sub.bagian TU, Permenpan No.53 tahun 2014	15 menit	disposisi	
2	Menugaskan dan memberi arahan kepada staf/tim untuk menyusun LAPKIN				disposisi	30 menit	disposisi	
3	Menganalisis dan mengolah data kinerja seksi dan sub bagian TU ke dalam kertas kerja perhitungan kinerja				Nota dinas kepala Balai tentang pengumpulan data kinerja, SK tim penyusun LAPKIN, bahann/data kinerja seksi dan sub.bagian TU, Permenpan No.53 tahun 2014	360 menit	kertas kerja perhitungan kinerja	
4	Memeriksa kertas kerja perhitungan kinerja, jika ada koreksi kembali ke staf/tim, jika tidak ada koreksi lanjut ke kepala				kertas kerja perhitungan kinerja dengan paraf ka.sub tata usaha	90 menit	kertas kerja perhitungan kinerja dengan paraf ka.sub tata usaha	
5	Kepala BTKLPP Kelas I Makassar menandatangani/mengesahkan kertas kerja perhitungan kinerja				kertas kerja perhitungan kinerja dengan paraf ka.sub tata usaha	5 menit	kertas kerja perhitungan kinerja dengan tanda tangan kepala balai	
6	Menyusun hasil pengolahan/kertas kerja ke dalam draft LAPKIN				Kertas Kerja perhitungan kinerja dengan tanda tangan kepala balai dan permenpan No.53 tahun 2014	360 menit	Draft LAPKIN	
7	Memeriksa Draft LAPKIN, jika ada koreki kembali ke staf/tim, jika tidak ada koreksi berlanjut ke kepala Balai				Draft LAPKIN dengan paraf ka. Sub bagian TU	120 menit	Draft LAPKIN dengan paraf Ka.Sub Bagian Tata Usaha	
8	Kepala BTKLPP Kelas I Makassar menandatangani/ mengesahkan draft LAPKIN dan menyerahkan ke Ka. Sub Bagian TU				Draft LAPKIN dengan paraf ka. Sub bagian TU	5 menit	LAPKIN satker sudah ditandatangani/disahkan kepala balai	
9	Menyerahkan draft LAPKIN satker yang sudah disahkan oleh kepala balai untuk digandakan, dikirim dan diarsipakan				LAPKIN satker sudah ditandatangani/disahkan kepala balai	15 menit	surat pengantar	
10	Menggandakan, menjilid, mengarsipakn secara manual dan elektronik (scan) serta mengirimkan LAPKIN satker ke unit utama (Ditjen P2P)				surat pengantar & Draf LAPKIN satker sudah disahkan/ditandatangani kepala balai	180 menit	LAPKIN sudah dijilid dan digandakan sesuai jumlah yang dibutuhkan, Arsip LAPKIN, Surat Pengantar Pengiriman LAPKIN	

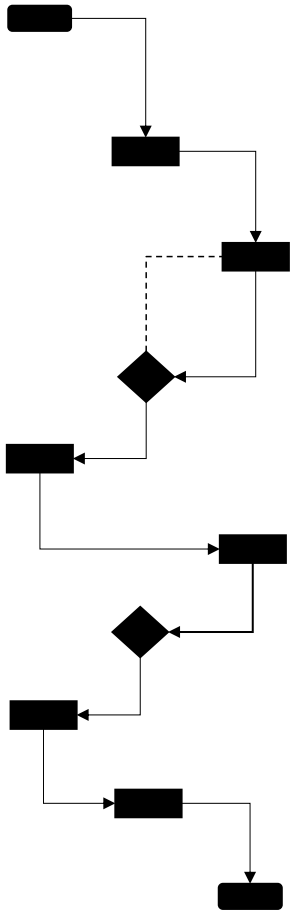

TIM PENYUSUN

Maman Sudirman, ST., M.Kes
Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
Dr.Eng. Ernawaty, S.Si., M.Si
Tabita Mintu, SKM, M.Kes
Sitti Muliana, S.Kom., M.AP
A. Yuli Rohma, S.Si., M.Kes
Farida, S.Si
Pahrul Razak, SKM
Zasimah Margawati Djamil, SH, MH
Evi Nursyafitri, S.Tr.KL
Irmawati
Ulfa Marliawati, A.Md.KL
Yanti Wijayanti Ayu Edhi A